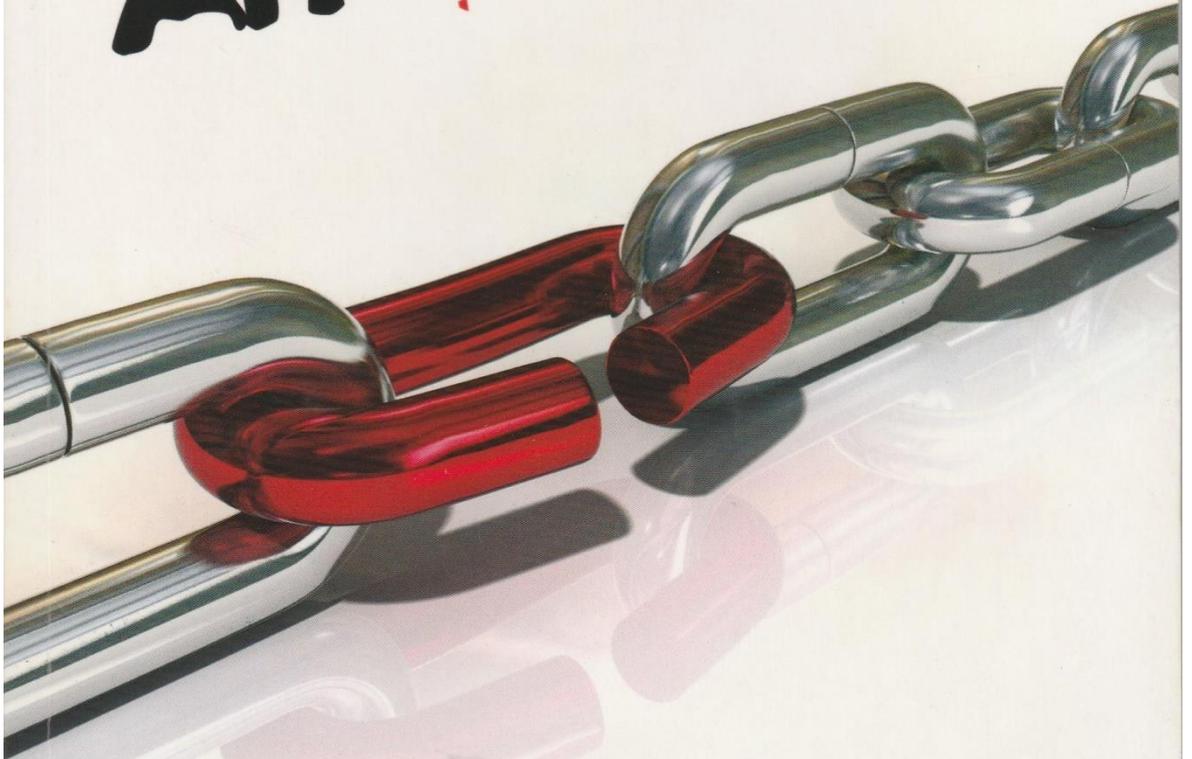


Moh. Yamin

B 40

# Pendidikan Antikorupsi





# Pendidikan Antikorupsi

RR.PK0352-01-2016

Penulis	Moh. Yamin
Editor	Pipih Latifah
Proofreader	Nur Asri
Desainer sampul	Toto Rianto
Layout	Tony Suchendra

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**

Jln. Ibu Inggit Gamasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: [rosdakarya@rosda.co.id](mailto:rosdakarya@rosda.co.id)

[www.rosda.co.id](http://www.rosda.co.id)

Anggota Ikapi

Cetakan pertama, November 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 978-979-692-721-0

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung



# Daftar Isi

Perlawanan Literasi Indonesia Membumi—iii
Pengantar—vii
Daftar Isi—xi

<b>Bab I</b>	<b>Korupsi dan Hancurnya Keadaban Bangsa—1</b>
A.	Redupnya Masa Depan Bangsa—10
B.	Kemiskinan Struktural—18
C.	Pembangunan di Tengah Kepungan Korupsi—26

<b>Bab II</b>	<b>Pendidikan Antikorupsi—31</b>
A.	Definisi Korupsi dan Bentuk Korupsi—36
B.	Penyebab Korupsi—43
C.	Mengapa Perlu Pendidikan Antikorupsi—52
D.	Darurat Pendidikan Antikorupsi—58

**Bab III Kurikulum Pendidikan Antikorupsi—65**

- A. Kurikulum Jantung Pendidikan—69
- B. Meninjau Definisi Kurikulum—77
- C. Macam Model Konsep Kurikulum—84
- D. Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi—87

**Bab IV Gerakan Kolektif Pemberantasan Korupsi—97**

- A. Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi—101
- B. Melawan Korupsi dengan Hidup Sederhana—110
- C. Revolusi Mental dalam Pemberantasan Korupsi—117
- D. Kearifan Lokal dalam Pemberantasan Korupsi—123

**Glosarium—129**

**Daftar Pustaka—131**

**Indeks—137**

**Tentang Penulis—139**

Buku ini saya persembahkan untuk buah hati tersayang  
Azmi Daffa Al-Firdaus dan istri terkasih Vivi Aulia.  
Lewat buku ini, saya mendoakan semoga kalian menjadi  
pribadi-pribadi yang sederhana dalam menjalani hidup dan kehidupan

## Pengantar Penulis

Korupsi di republik tercinta ini benar-benar menjadi penyakit yang sangat luar biasa destruktif dan telah meluluh-lantakan sendi-sendi kehidupan berbangsa, mulai dari pendidikan, agama, hukum, dan lain sejenisnya. Korupsi telah membuyarkan masa depan bangsa menuju bangsa beradab dan besar. Pasalnya, akibat korupsi yang menelan miliaran rupiah, banyak agenda bangsa dan pembangunan bangsa kemudian menjadi macet dijalankan secara konkret dan praksis. Seharusnya agenda bangsa yang meliputi pembangunan gedung sekolah, meratanya akses pendidikan gratis bagi anak-anak orang tidak mampu, dan lain sejenisnya akhirnya menjadi terbengkalai dengan sedemikian rupa, termasuk di dalamnya akses kesehatan bagi mereka yang hidup di garis kemiskinan. Dengan kata lain, korupsi sudah meruntuhkan impian dan cita-cita bersama untuk menjadi bangsa.

Korupsi memberikan sumbangsih signifikan bagi tersungkurnya bangsa ini ke jurang kehancuran. Bisa dibayangkan ketika uang negara yang seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakuran rakyat justru ditilep dan masuk ke kantong-kantong pribadi, maka sangat dimungkinkan apabila pembangunan untuk hajat hidup orang banyak akan gagal dijalankan dengan sedemikian rupa.

Tentunya, akibat tindakan korupsi yang telah berlangsung dengan sedemikian masif dimana-mana baik di pemerintahan pusat maupun daerah, maka ke depan, kita semua tidak bisa berharap banyak bahwa akan perbaikan kehidupan berbangsa. Tak hanya itu saja, harapan untuk bisa memiliki nasib bangsa yang baik ke depannya, itu pun hanya isapan jempol belaka. Memang diakui maupun tidak, persoalan korupsi bukanlah sesuatu yang kebetulan sudah *nge-trend* saat ini. Jauh-jauh sebelumnya pra Indonesia merdeka tanggal 14 Agustus 1945, korupsi dengan variannya sudah muncul. Hanya saja, tingkat volume tindakan korupsinya tidak sehebat saat ini pasca reformasi 1998. Apabila korupsi di masa lampau tidak terlalu besar, justru kini tindakan mengorupsi uang rakyat sudah besar, semakin besar, dan bertambah besar.

Takala kemudian dimunculkan pertanyaan, mengapa korupsi muncul dan bagaimana kemunculan korupsi tumbuh dan berkembang biak, maka ini tidak terlepas dari kata kunci: serakah, tamah, dan rakus. Sifat dasar manusia yang buruk tersebut muncul ketika kemudian mendapatkan kesempatan. Kesempatan ada ketika pada umumnya seseorang memiliki jabatan, wewenang, dan kekuasaan. Oleh sebab itu, jabatan yang melekat di dalamnya adalah wewenang dan kekuasaan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan dan tujuan yang tidak amanah. Jabatan kemudian kerap kali ditumpangi kepentingan sempit untuk memperkaya diri sendiri. Biasanya, korupsi kemudian akan lebih mudah terjadi ketika sistem yang berlaku di dalamnya bisa dikatakan longgar dan sangat longgar. Akibat sistem yang tidak berjalan maksimal dan optimal, maka di situlah korupsi kemudian dijalankan. Di situ pula, kejahatan-kejahatan yang merusak mandat rakyat kemudian juga terjadi.

Atas beberapa catatan dan pandangan umum tersebut, buku ini hadir untuk menjawab persoalan korupsi atau mengulas tindakan korupsi dalam perspektif pendidikan. Buku ini terbagi menjadi empat bab. Bab pertama membahas korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Bab kedua berbicara tentang pendidikan antikorupsi. Bab ketiga berbincang tentang kurikulum pendidikan antikorupsi. Sedangkan pada bab terakhir atau bab keempat mengurai secara jernih dan bernas tentang gerakan kolektif pemberantasan korupsi. Bab pamungkas inilah sesungguhnya memberikan tawaran-tawaran alternatif dalam pemberantasan korupsi menurut kacamata pendidikan. Usulan alternatif tersebut dimulai dari perlunya memasang strategi internalisasi pemberantasan korupsi, yang kemudian dilanjutkan dengan melawan korupsi dengan hidup sederhana, revolusi mental untuk pemberantasan korupsi serta kearifan lokal untuk pemberantasan korupsi. Untuk dua sub judul terakhir, usulan ini muncul ketika saya mengamati visi dan misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait pendidikan. Oleh karenanya, revolusi mental kemudian mendapatkan porsi pembahasan walaupun tidak terlalu banyak. Dalam pandangan penulis, revolusi mental kemudian akan semakin kokoh dan kuat dijalankan ketika kemudian ditambah dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam pandangan penulis secara pribadi, antara

revolusi mental dan kearifan lokal adalah dua elemen penting yang saling komplementer dalam membentuk pribadi-pribadi manusia antikorupsi.

Kini usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah hampir setengah periode memimpin republik ini sejak dilantiknya sebagai presiden dan wakil presiden sejak tanggal 20 Oktober 2014. Banyak agenda pemerintahannya baik yang sudah dijalankan maupun belum ditunaikan demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Ketika ini dikaitkan dengan revolusi mental, apa yang dituangkan dalam buku ini menjadi catatan kritis untuk menjawab konsep revolusi mental dalam konteks penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.

Selanjutnya, atas selesainya penulisan buku ini, saya kemudian akan menyampaikan terimakasih kepada beberapa orang yang dianggap secara langsung berkontribusi terhadap buku ini. Pertama, saya mengucapkan terimakasih kepada Agus Wibowo, penulis produktif dari Yogyakarta yang mengajak saya untuk menulis bersama tentang pendidikan antikorupsi. Targetnya Mas Agus Wibowo saat itu adalah satu bulan harus selesai. Awalnya memang saya mengiyakan namun dalam perjalanan waktu, itu tidak terealisasi sehingga saya pun merasa beban moral. Hutang saya saat itu kemudian harus terbalas dengan menulis sendiri saja. Itu yang saya tanamkan dalam hati dan jiwa. Ajakan Agus Wibowo tentu menjadi inspirasi bagi saya untuk juga harus menulis tentang pendidikan antikorupsi. Karena inspirasi tersebut itulah, saya kemudian harus bisa menulis sendiri. Ternyata seiring perjalanan waktu, saya berusaha untuk menyelesaikan naskah tersebut secara sendiri dan akhirnya buku ini rampung ditulis.

Kedua, kepada Mas Luthfi J. Kurniawan selaku ketua yayasan Malang Corruption Watch (MCW), saya juga menyampaikan terimakasih sebab ikut memfasilitasi beberapa materi tentang korupsi dan ini semakin memudahkan saya untuk menyelesaikan penulisan buku tersebut. Ketiga, kepada Kang Suyidno, saya tak lupa mengucapkan banyak terimakasih sebab yang bersangkutan telah ikut memberikan materi tentang pendidikan antikorupsi. Awalnya, saya mengajak yang bersangkutan untuk menulis bersama, namun ternyata karena kesibukannya yang padat, saya kemudian

mengambil inisiatif untuk menulis sendiri sebagai bentuk komitmen moral untuk ikut serta berbicara tentang pendidikan antikorupsi.

Akhirnya, tanpa mengurangi rasa hormat, pihak-pihak lain baik yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung atas ide dan pemikiran yang saya tulis ini, maka saya menyampaikan terimakasih. Pasalnya, ide bagi saya tidak akan bisa tumbuh dan berkembang biak tanpa adanya pergumulan dan diskusi dengan pihak-pihak lain. Selanjutnya, kepada penerbit ROSDA KARYA yang berkenan menerbitkan buku ini, saya berucap terimakasih. Terakhir kepada para pembaca budiman, saya selalu berharap ada masukan dan kritikan atas penyempurnaan buku ini ke depan dalam rangka menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya, semoga buku ini memberikan inspirasi dan motivasi serta kesadaran baru dalam konteks pemberantasan korupsi melalui pendidikan.

Banjarmasin, Mei 2016

Moh. Yamin

# PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

## PENGANTAR PENULIS

## BAB I KORUPSI DAN HANCURNYA KEADABAN BANGSA

- A. Redupnya Masa Depan Bangsa
- B. Kemiskinan Struktural
- C. Pembangunan di Tengah Kepungan Korupsi

## BAB II PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

- A. Definisi Korupsi dan Bentuk Korupsi
- B. Penyebab Korupsi
- C. Mengapa Perlu Pendidikan Antikorupsi
- D. Darurat Pendidikan Antikorupsi

## BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

- A. Kurikulum itu Jantung Pendidikan
- B. Meninjau Definisi Kurikulum
- C. Macam Model Konsep Kurikulum
- D. Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

## BAB IV GERAKAN KOLEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI

- A. Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi
- B. Melawan Korupsi dengan Hidup Sederhana
- C. Revolusi Mental untuk Pemberantasan Korupsi
- D. Kearifan Lokal untuk Pemberantasan Korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

## GLOSARIUM

## INDEKS

## BIODATA PENULIS

## BAB I KORUPSI DAN HANCURNYA KEADABAN BANGSA

Pemerintahan yang bersih (good governance) menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelasan bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Tidak ada kerja-kerja yang menyimpang yang kemudian merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang dihasilkan pada era reformasi 1998 sudah sangat jelas berbunyi “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Persoalannya adalah kini pemerintahan saat ini bukan bebas dari korupsi dan lain sejenisnya. Justru pemerintahan saat ini semakin dihuni oleh para manusia yang berhati culas, picik, dan berpikir sempit. Pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya pemerintahan daerah sudah tidak lagi ditempati para penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Justru mereka adalah mantan narapidana yang pernah melakukan korupsi.

Dengan kata lain, para kepala daerah mempromosikan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya menjadi terpidana korupsi. Sebut saja, Azirwan mantan terpidana korupsi pelepasan hutang lindung di Bintan yang dipromosikan menjadi kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepulauan Riau. Yan Indra mantan napi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia yang dipromosikan oleh Bupati Karimun menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Karimun. Raja Faisal Yusuf mantan napi korupsi pembangunan gedung serbaguna Tanjung Pinang yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Tanjung Pinang oleh Bupati Tanjung Pinang. Senagip mantan napi korupsi dana bagi hasil migas yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Keselamatan Bangsa Natuna oleh Bupati Natuna. Di antara yang lain adalah Yusrizal, Iskandar Ideris dan

masih banyak yang lain (Kompas, 5/11). Potret sejumlah para napi korupsi yang dipromosikan menjadi penyelenggara negara sesungguhnya menjadi fakta bahwa kini para pemangku kepentingan di tingkat daerah sangat tidak mendukung pada pemberantasan korupsi. Justru genderang mendukung korupsi semakin ditabuh dengan sedemikian rupa.

Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa. Bagi sejumlah kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi untuk mengisi kursi kekuasaan di tingkat daerah menjadi sebuah realitas sangat pahit dan ironis bahwa ternyata komitmen untuk melahirkan pemerintahan yang bersih masih ibarat menegakkan benang basah. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat sejumlah pejabat negara baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis, justru di tingkat daerah pun juga demikian. Pertanyaannya adalah apakah mental para pejabat kita di republik tercinta ini sudah sangat keropos dan rapuh? Yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Nasib jutaan rakyatnya tidak lagi dipikirkan sama sekali. Penderitaan rakyatnya akibat perilaku para elit yang lebih suka mengorupsi uang rakyat tidak pernah menjadi sebuah cermin kritis bahwa sesungguhnya di negeri ini sedang terjadi preseden buruk tentang carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu, realitas mengenai masih banyaknya sejumlah mantan napi yang diangkat menjadi pejabat negara kemudian memberikan sebuah potret nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan dan dijalankan dengan sedemikian konkret dan praksis. Pemberantasan korupsi yang seharusnya kemudian menutup sejumlah kelompok tertentu untuk semakin bebas dan berani dalam menggarong uang rakyat tidak terjadi sama sekali. Oleh karenanya, pemerintahan yang bersih tidak berjaln kelindan erat dengan harapan publik. Korupsi sudah melahirkan pemerintahan yang busuk. Akhirnya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun dikecewakan dengan perilaku dan tindakan para elit yang sangat berpikir kerdil dan

sempit. Yang mereka perjuangkan bukan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Rakyat sebagai bagian terbesar dari kehidupan berbangsa dan seharusnya diperjuangkan sampai titik penghabisan oleh para elit tidak dilakukan sama sekali. Kendatipun rakyat hidup dalam jeritan tangis antah berantah akibat krisis ekonomi, ternyata para elit tidak memerhatikan sama sekali.

Inilah yang kemudian disebut kegagalan reformasi 1998. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ikut meneriakkan anti korupsi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Teriakan SBY hanya sebatas jargon belaka yang tidak berbuah kerja-kerja konkret bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Ini adalah sebuah ironi. Pertanyaannya adalah apakah para elit saat ini sudah berhenti untuk bekerja untuk rakyat? Apakah para elit yang sudah diberi mandat untuk mengelola republik ini sudah kehilangan kesadaran profetisnya untuk mengangkat hajat hidup orang banyak? Terlepas apa pun jawabannya, sepertinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera tidak akan menjadi sebuah realitas ketika para elit selama ini selalu menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang diderita rakyatnya. Saat para elit selalu dan terus menerus menabuh genderang politik sektarianisme yang lebih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, maka kondisi rakyat dan bangsa ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang konstruktif sekaligus dinamis. Pembangunan bangsa di segala sektor tidak akan pernah terjadi.<sup>1</sup>

Ada hal menarik lain terkait korupsi sebagaimana disampaikan Susilo Bambang Yudhyono bahwa “Prioritas pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sedikit demi sedikit banyak telah membuahkan hasil. Dengan mempercepat pemberantasannya, kini setahap demi setahap mulai timbul budaya takut melakukan korupsi,” dikutip dari pidato kenegaraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR/MPR (16/08/06).

---

<sup>1</sup> Moh. Yamin. *Genderang Mendukung Korupsi*. (Sinar Harapan, Kamis 6 Desember 2012).

Kalimat di atas merupakan satu ungkapan seorang kepala negara yang seolah telah yakin dan percaya bahwa korupsi sudah terkubur dengan sangat mendalam. Korupsi telah dilumat oleh zaman yang tidak menghendaknya. Ini adalah sebuah “kejujuran ekspresi berbasis politik tertentu”. Ini merupakan satu manifestasi persepsi pemerintah dalam mengkacamatakan sebuah masalah dengan sangat sempit dan kerdil. Kalimat di atas adalah satu perwujudan tafsiran dan pemahaman seorang pemimpin yang dengan sangat mudahnya menyimpulkan sebuah penyelesaian persoalan tanpa coba menelisik lebih mendalam apa benar bahwa korupsi dengan menyebabkan para pelakunya dijebloskan ke penjara, kemudian melahirkan budaya takut melakukan korupsi. Dengan perkataan lain, korupsi itu lenyap bersamaan dengan diseretnya pelaku kejahatan uang negara oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. SBY seolah sudah merasa berhasil dengan usahanya itu, terlepas kita kemudian harus tetap memberikan apresiasi tinggi bahwa ini adalah kerja SBY yang sangat gigih selama beberapa tahun memimpin republik ini.

Akan tetapi kendatipun demikian, masih banyak pakar politik, hukum, ekonomi dan lain seterusnya meragukan ucapan presiden SBY bahwa korupsi itu sudah wafat akibat terpenjaranya koruptor-koruptor. Sebuah keraguan tersebut diwujudkan dengan tidak adanya data valid dari pemerintah yang membeberkan dengan sangat telanjang bulat bahwa korupsi memang tidak ada. Lebih dari itu, dengan tidak dibuatnya sebuah database yang akurat dan cermat mengenai seberapa banyak koruptor yang telah masuk bui dari pada yang masih bergentayangan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan sebuah hal yang lebih ironis. Secara tegas, pemerintah berbohong kepada publik. Pemerintah sangat tidak konsisten dengan ucapannya. Ucapan dan tindakannya sangat tidak sebangun. Bahkan, ini juga dibuktikan dengan masih belum jelasnya penuntasan kasus Century, kasus korupsi Wisma Atlet, kasus pemilihan deputy senior BI dan kasus-kasus korupsi lainnya.

Oleh karena itu, ini semakin membuktikan bahwa ucapan SBY tersebut hanya sebuah retorika kosong yang tak bermakna. Ucapan tersebut masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dengan begitu, ini sudah memperkuat

sebuah ketidaktepatan ucapan SBY tentang percepatan pemberantasan korupsi yang konon telah membuahkan hasil. Padahal, database legal formal sedemikian itu sangat penting guna menunjukkan prestasi tertentu yang telah digarap oleh pemerintahan SBY. Pertama; ini adalah sebuah bentuk konkret yang dapat diketahui publik kemudian hari sehingga masyarakat puas dengan kinerja pemerintah SBY selama berkuasa. Kedua; hal semacam itu menjadi sebuah pembenar ucapan pemerintah di tengah publik Indonesia sekaligus pembantah secara hukum positif bila ada sebuah keraguan dan ketidakpercayaan yang muncul dari pusara publik, entah masyarakat, LSM dan lain seterusnya.

Dalam kacamata etika politik, ucapan percepatan pemberantasan korupsi yang membuahkan banyak hasil adalah sebuah kata-kata berlapiskan kepalsuan *an sich*. Ucapan tersebut berbalutkan nilai-nilai machivellianisme. Hal semacam ini merupakan gambaran hidup dan kehidupan pemerintah yang munafik dalam menjalani kerja-kerja kenegaraannya ke depan, termasuk dalam kepemimpinannya pada jilid ke dua ini. Ucapan tersebut adalah cerminan jiwa pemerintahan yang dengan sangat sengaja ingin mengelabui masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemerintah sudah tidak memiliki visi dan misi jelas serta terang benderang yang berbasiskan kerakyatan dan kemanusiaan Indonesia. Ia terjebak pada kepentingan politik segolongan tertentu dengan menggadaikan amanat rakyat yang suci dan mulia. Pemerintah sangat licik dan picik dalam menghadapi dan berhadapan dengan masyarakatnya. Seolah, masyarakat Indonesia adalah tumbal politik sekelompok yang berkuasa dan memiliki modal. Masyarakat akar rumput pun ditindih, diperkosa, dan ditindas dengan segala macam cara akibat kerja-kerja negara yang tidak mementingkan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Oleh karenanya, korupsi yang selama ini berlangsung dalam segala lini mengindikasikan bahwa bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bangsa yang dikelilingi oleh para koruptor justru akan semakin hidup dalam ketidakjelasan masa depan. Diakui maupun tidak, garis perjuangan yang dilakukan para koruptor adalah bukan untuk membangun kedaulatan bangsa, melainkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa

sekaligus bernegara. Para koruptor tidak menghendaki sebuah peradaban yang harus dicapai sebuah bangsa. Peradaban dalam konteks ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana kemajuan dalam segala aspek kehidupan bisa diraih dengan sedemikian rupa.

Dalam *The History of Manner*, Elias berusaha mendefinisikan konsep peradaban dan menguraikan bagaimana sesungguhnya asal muasal sosial peradaban itu dalam sejarah Eropa di abad-abad pertengahan. Untuk mendeskripsikan konsep peradaban, ia kemudian berbicara tentang kemajuan teknologi, tipe-tipe watak manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, gagasan dan kebiasaan sosial masyarakat. Konsep peradaban juga bisa dirujuk pada bagaimana wanita dan laki-laki hidup bersama, bentuk-bentuk hukuman atau malahan pada berbagai hal yang dipandang sangat sepele seperti cara menghidangkan makanan. Definisi peradaban pun bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan pemikiran manusia.<sup>2</sup> Stephen Mennel kemudian menambahkan penjelasan apa itu perubahan dan dia mencoba menggambarannya:

“Menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya.”<sup>3</sup>

Apa yang disampaikan baik oleh Mennel maupun Elias setidaknya memberikan sebuah interpretasi bahwa peradaban adalah sebuah kemajuan yang dicapai sebuah bangsa. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini disebut beradab dan memiliki peradaban tinggi, sementara prestasi yang dilahirkan republik tercinta ini sangat jauh dari harapan publik. Dalam konteks ini, korupsi yang sudah menggurita di semua kelas sosial memberikan sebuah jawaban bahwa memang tidak ada sesuatu yang diharapkan dalam pembangunan bangsa yang beradab. Hasuballah mengatakan perilaku korupsi bukan hanya terjadi di kalangan elit, namun juga menjangkiti kehidupan masyarakat di akar rumput. Perilaku korupsi yang lebih menghalalkan segala cara (permisivisme) tentu mendorong

---

<sup>2</sup> Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). Hal. 321.

<sup>3</sup> Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner. New Edition. *Dictionary of Sociology*. (England: Penguin Book, 1988). Hal. 35.

setiap masyarakat untuk apatis dalam keberpihakan demi kepentingan bersama di atas segala-galanya.<sup>4</sup>

Harian Kompas menurunkan berita terkait dengan indeks perilaku korupsi sebagaimana yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK) 2012 yang dilakukan BPS dan Bappenas pada Oktober 2012 lalu memberikan potret bahwa korupsi terjadi mulai dari level rumah tangga, komunitas, hingga publik secara luas. Korupsi sudah menjadikan bangsa ini dengan perilaku manusianya yang sangat bejat amburadul. Satu akibat sangat mendasar dari akibat tindakan tersebut adalah bagaimana bangsa ini akan bisa maju ketika sendi-sendi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah hancur lebur. Di sinilah titik paling kronis dari hancurnya sebuah peradaban bangsa ketika korupsi sudah dimulai sejak dari paling bawah sampai paling atas.

Oleh karenanya, korupsi dengan segala piranti lunak dan kasar sebenarnya harus menjadi musuh bersama (*common enemy*). Menjadi musuh bersama dapat dimaknai bahwa membangun bangsa dengan mengubur dalam-dalam mental koruptif akan menjadikan bangsa ini bersih dari segala bentuk kehancuran dan kemunduran peradaban. Bisa kita bayangkan ketika kas negara yang seharusnya dialirkan dalam rangka pembangunan pendidikan, namun kemudian itu ditilep oleh kelompok tertentu yang semata berbicara demi kepentingan sempit dan kerdil, dunia pendidikan yang seharusnya bisa menghadirkan dirinya sebagai ruang pencerahan bagi rakyat kemudian tidak akan bisa ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis.

Seharusnya, pendidikan sebagai jalan menuju pembangunan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat mampu ditunaikan dengan sedemikian mudah, itu pun tidak akan bisa dilakukan dengan sedemikian mudah dan berhasil. Anggaran pendidikan sudah habis dirampok para penjahat berdasi yang konon merupakan wakil dan pengemban amanat rakyat baik mereka yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif.

---

<sup>4</sup> Jousairi Hasbullah. *Memaknai Angka Perilaku Korupsi*. (Kompas, Kamis\_12 Januari 2013).

Sementara Febri Hendri AA mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, korupsi pendidikan potensial terjadi. Hal itu terlihat dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Departemen Pendidikan Nasional, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Berdasarkan perhitungan ICW atas audit BPK hingga semester II-2007, ditemukan potensi penyelewengan di Depdiknas sebesar Rp 852,7 miliar. Penyimpangan itu antara lain terjadi pada pengelolaan aset (Rp 815,6 miliar), tidak tepat sasaran (Rp 10,5 miliar), tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp 16,8 miliar), pemborosan (Rp 6,9 miliar), penyimpangan lain (Rp 2,9 miliar).

Selain itu, potensi penyimpangan juga ada dalam pengelolaan DAK 2007 untuk rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Penyimpangan terjadi dalam bentuk pengadaan sarana prasarana dinas pendidikan, penunjukan pihak ketiga tanpa melibatkan sekolah, dan pemotongan dana oleh dinas pendidikan. Bahkan, pihak ketiga juga menjadi kolektor terselubung guna mengumpulkan dana sekolah untuk pejabat di dinas pendidikan. Hal serupa terjadi dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan audit BPK tahun 2007, enam dari 10 sekolah penerima dana BOS tidak mencantumkan BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sekolah ini juga terbukti melakukan penyimpangan dari petunjuk teknis BOS. Praktik itu antara lain terjadi melalui penggunaan dana BOS untuk acara pisah sambut kepala dinas pendidikan, uang lelah kepala sekolah, iuran PGRI, dibungkakan oleh kepala sekolah/bendahara, dan penyimpangan lain.

Masih menurut Febri Hendri AA, ternyata tingginya potensi korupsi pendidikan ternyata tak disertai penindakan maksimal. Dari pantauan ICW selama lima tahun, penegak hukum hanya berhasil menindak 142 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 243,3 miliar. Adapun 287 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Temuan menarik dalam pemantauan ini adalah dinas pendidikan diduga merupakan institusi pendidikan paling korup. Dari 142 kasus, 70 kasus terjadi di lingkungan dinas pendidikan dengan kerugian negara Rp 204,3 miliar. Kepala dinas dan jajarannya diduga merupakan tersangka paling banyak di antara pelaku lain. Di antara

142 kasus, 42 orang adalah kepala dinas pendidikan dan 67 birokrat di bawah kepala dinas pendidikan. Selain itu, sekolah juga tidak luput dari praktik korupsi. Sebanyak 46 kasus terjadi dalam lingkungan sekolah dan 43 kepala sekolah telah ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak sedikit, lebih dari Rp 4,1 miliar.<sup>5</sup>

Membaca hasil analisis di atas, ini semakin menunjukkan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengenai korupsi yang telah mencabik-cabik kehidupan bangsa. Bagaimana bangsa ini akan bisa maju dan peradabannya mampu diraih dengan sedemikian tinggi ketika pendidikan sebagai sektor terpenting sudah disalahgunakan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pembangunan peradaban bangsa. Hal lain yang juga sangat mengesankan tentang perilaku korupsi juga terjadi di Kementerian Agama yang konon disebut gerbang terakhir pembangunan moralitas bangsa. Menurut hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012 terhadap 85 instansi pusat/vertikal/daerah ternyata menempatkan Kementerian Agama pada urutan 65 atau di poin 6,07.

Bahkan, penilaian tentang korupsi di kementerian ini kini tidak hanya datang dari kalangan luar, melainkan juga muncul dari dalam Kementerian Agama itu sendiri. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, M Jasir menemukan potensi korupsi triliunan rupiah dalam penyelenggaraan pernikahan. Aturan menetapkan biaya administrasi pernikahan hanya sebesar Rp30.000, tetapi banyak penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang memungut hingga jutaan rupiah. Jika setiap pernikahan dipungut biaya Rp500.000, dengan perkiraan ada 2,5 juta pernikahan per tahun, maka total pungutan liar mencapai Rp1,2 triliun. Dalam kesempatan berbeda, Jasir juga mengungkapkan adanya sejumlah pejabat Kemenag yang memiliki rekening gendut atau di luar batas kewajaran.

Jumlah saldo dalam rekening mereka tidak sesuai dengan profil jabatan yang diemban. Rekening mencurigakan ini tak hanya dimiliki oleh pejabat Kemenag pusat, tetapi juga yang ada di daerah-daerah. Meski belum

---

<sup>5</sup> Febri Hendri AA. *Korupsi Menggerogoti Dunia Pendidikan Kita*. (Kompas, 24 September 2009).

menyebut angka pasti jumlah pejabat yang memiliki rekening gendut tersebut, pihak Irjen mengakui bahwa angkanya lumayan banyak. Sedangkan penilaian telak yang berasal dari luar berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut juga mengindikasikan adanya pengeluaran yang tidak transparan terkait pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp80 triliun dengan bunganya yang mencapai sekitar Rp2,3 triliun.<sup>6</sup>

Dengan demikian, potret mengenai tindak korupsi di Kementerian Agama setidaknya menambah potret buruk mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak jujur dan bersih. Penyelenggara negara seharusnya mampu bekerja secara jujur dan bersih dalam rangka membangun bangsa yang beradab, ternyata kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan dikotori oleh perilaku para pejabatnya yang tidak mampu mengemban amanat. Agama yang seharusnya mampu membawa pencerahan dalam rangka pembangunan moralitas bangsa kemudian dihancurkan oleh para penyelenggara publik itu sendiri. Keadaban bangsa pun menjadi gagal diperjuangkan dengan sedemikian konkret dan praksis. Peradaban bangsa pun gagal dicapai.

Ternyata, korupsi dan para pelakunya sudah tidak mengenal mana baik dan buruk, mana benar dan salah, dan begitu seterusnya. Korupsi sudah menjadi sebuah tempat yang dipandang benar untuk dikerjakan oleh para penyelenggara di republik tercinta ini. Mengapa harus disebut demikian? Karena ketika ada orang jujur yang mau berkata tidak untuk berkorupsi, justru ia kemudian dimusuhi, disingkirkan, dan dipinggirkan. Orang baik sudah dibuang jauh-jauh dalam lingkungan kehidupan penyelenggara pelayanan publik. Itulah yang selanjutnya dinamakan menghalalkan segala cara kendatipun sudah menghancurkan keadaban publik. Keadaban publik kendatipun sudah tercabik-cabik sudah tidak dipedulikan sama sekali. Keadaban publik walaupun sudah hilang dalam kehidupan sudah tidak menjadi persoalan sebab keberadaan keadaban publik menghambat para penyelenggara publik untuk bermain kotor dan curang. Keadaban publik

---

<sup>6</sup> Muh. Kholid AS. *Ironi di Kementerian "Santri"*. (Solopos, 18 Januari 2013).

memperlambat-lambat kerja-kerja koruptif yang memang ditujukan untuk menggarong uang negara dengan beratasnamakan sektarianisme.

#### A. Redupnya Masa Depan Bangsa

Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Husein Alatas mengatakan (1968) bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap (1) terbatas, (2) meluas, dan (3) menghancurkan masyarakat dimana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas (*wide-spread, deeply rooted*). Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Sehingga pada tahap itulah, korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas.<sup>7</sup>

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus menerus berada dalam masa depan yang redup? Mengutip pendapat Shidqi, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja, bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, dan bagaimana roda itu berputar.<sup>8</sup>

Tentu, apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). Hal. 132.

<sup>8</sup> Ahmad Shidqi. *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008). Hal. 103.

berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan.

Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan keadaban dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa, kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika para penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor wahid untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik sudah diabaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditanggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya.

Rasa manis dan nyaman berada di kursi kekuasaan menjadikan mereka lupa untuk menjalankan amanat dan mandat rakyat dalam rangka mengawal perubahan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Rasa nyaman dan tentram berada dalam kursi kekuasaan menjadikan mereka terlena dan terbius sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan publik. Ini adalah sebuah ironisitas. Kepekaan mereka kemudian menjadi tumpul dan ditumpulkan akibat sudah diperbudak oleh kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Keinginan untuk berbuat untuk bangsa selanjutnya sudah dikalahkan oleh nafsu pribadi dan golongan yang sangat anarkis dan destruktif.

Oleh karenanya, jangan banyak berharap akan ada cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini ketika cahaya itu sudah hilang dan mati. Ia dimatikan oleh keserakahan dan ketamakan yang dilakukan para pejabat publik. Sudah menjadi mustahil akan menjadi

bangsa besar sebagaimana yang diimpikan rakyat di republik tercinta ini. Akan menjadi utopia belaka ketika menghendaki agar terjadi sebuah perubahan yang bermakna bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ibarat seseorang yang ingin segera lepas dari kematian, namun segala arah sudah menutupi segala jalan dan ini tentu menghambat tujuan tersebut.

Realitas mengenai kondisi rakyat yang terus menerus berada dalam himpitan ekonomi, ditambah dengan ruwetnya kehidupan sosial yang ditandai dengan konflik horisontal menjadi sebuah indikasi lain bahwa masa depan bangsa benar-benar redup antah berantah. Redupnya bangsa benar-benar menjadi sebuah realitas tak terbantahkan dan kondisi ini benar-benar semakin mempertontonkan bahwa itulah kenyataan mengenai bangsa yang sedang redup. Memang aneh dan ajaib namun nyata perjalanan bangsa ini. Di tengah begitu kayanya sumber daya alam dan kualitas manusia Indonesia, ternyata perjalanan bangsa ini terseok-seok dalam jalan yang terjal dan membingungkan.

Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memedulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarakan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Uang rakyat tidak dikelola dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Uang rakyat justru dihabisi sehabis-habisnya untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan:

1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik

Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari pelbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya dan lain seterusnya, ini kemudian berjaln kelindan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Para pemimpin di republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya

untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih mengedepankan pada upaya diri untuk melakukan kebohongan dan pembohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Dari sinilah, cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Tak mungkin lagi membawa harapan perbaikan bagi semua. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa sebab para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

## 2. Pragmatisme dan primordialisme

Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung-rugi. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. Kondisi ini memang sangat ironis. Ke depan bagaimana akan bisa mengerjakan kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan ketika ukuran dalam menunaikan setiap pekerjaan sangat sempit dan kerdil. Berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa kemudian berdekatan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kebermanfaatan sektoral. Tentu, kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri ini ke depan. Tak akan pernah ada sebuah pengelolaan negara dan negeri yang benar-benar sehat. Bagaimana sebuah tugas akan dikerjakan secara sehat ketika para penyelenggara kepentingan publik sudah menutup mata dan telinga atas pelbagai kepentingan publik secara konkret dan praksis. Dari sinilah, sebuah kata paling tepat bisa dimunculkan bahwa jangan pernah ada optimisme membangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depan.

### 3. Kerja tanpa Visi

Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan nurani paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa visi. Yang bervisi selalu meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik.

Membaca tiga gejala umum di atas yang berpotensi meredupkan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, maka sesungguhnya kita di republik ini sudah mengalami hal-hal demikian. Kepentingan pribadi dan golongan sudah sangat dominan dan ini mencelakai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatisme dan primordialisme pun sudah semakin menjadi-jadi. Penyakit sangat anarkis dan destruktif ini telah memberikan sumbangan sangat signifikan bagi runtuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatisme dan primordialisme telah membawa kapal bangsa ini harus tenggelam di lautan lepas sehingga dari sinilah kondisi bangsa yang harus terus menerus terpuruk dalam kemuraman masa depan.

Masa depan yang muram berarti bahwa sudah tidak ada lagi sebuah kemajuan yang bisa diharapkan bersama. Masa depan yang muram mengindikasikan bahwa kehancuran yang harus dialami bangsa ini benar-benar sangat luar biasa kronis dan kondisi sedemikian pun bukanlah sebuah ramalan yang hanya sebatas ramalan, akan tetapi sudah berada di depan mata. Ketika keberadaan bangsa sudah kian memudar dan muram, ke depan perjalanan republik ini pun semakin tidak jelas arahnya kemana

harus melangkah. Akibat korupsi yang kian merajalela, maka yang bisa dinanti adalah kehancuran sebuah bangsa di masa depan.

Memang dalam kondisi ini kita semua tidak bisa menyalahkan siapapun mengapa bangsa ini harus menjadi suram dan tak bervisi ke depan. Terlepas dari hal tersebut, sesungguhnya ada satu hal mendasar yang kemudian bisa dipertegas bersama bahwa ternyata akibat korupsi yang sangat kronis sudah mencelakakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat korupsi kemudian memunculkan anomali-anomali kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak akan ada lagi sesuatu hal yang bernama keadaban dan peradaban publik. Tak ada lagi sesuatu hal yang disebut kemajuan bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila salah satu tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pun menjadi ibarat menegakkan benang basah.

Negeri ini kemudian harus menangis dan menderita. Bangsa ini dan seluruh rakyat pun kemudian harus sengsara dan nestapa akibat korupsi yang sangat luar biasa menghancurkan masa depan bangsa. Seharusnya negeri ini dengan segala isinya kemudian bisa dimajukan dengan sedemikian rupa, hal tersebut pun kemudian menjadi mustahil terjadi. Kehancuran masa depan bangsa di depan mata benar-benar berada di depan mata. Semuanya tinggal menunggu kehancurannya saja kalau saat ini kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan bangsa dan rakyat akibat korupsi sebenarnya hanyalah bagian terkecil dari bencana besar yang akan segera terjadi di hari depan. Nestapa bangsa yang sesungguhnya adalah yang dirasakan anak cucu negeri di masa depan. Sebuah bencana dahsyat yang mesti terjadi di hari depan adalah kian tidak jelasnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari potret seperti inilah, kita di republik tercinta ini akan terus menerus berada di dalam ketidakjelasan nasib dan masa depan bersama.

Menarik apa yang disampaikan Yudi Latif, '*where there is no vision, the people perish*'. Visi ini harus mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa

tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial budaya, sistem pemaknaan dan pandangan dunianya sendiri. Sementara kehidupan bangsa yang tidak sehat diakibatkan oleh tidak sehatnya para penyelenggara negara dalam melayani kepentingan publik. Ketika bangsa ini kemudian tidak sehat, sesungguhnya itu terjadi karena keteledoran, ketidaktaatan dan penyelewengan terhadap mandat rakyat.<sup>9</sup> Akhirnya, dari sinilah bintang terang yang menerangi kehidupan bangsa ini pun menjadi redup. Bintang dalam pengertian ini adalah semangat memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Dengan demikian, redupnya masa depan sebuah bangsa secara jelas dan konkret terjadi karena tidak adanya ketulusan dan keikhlasan diri dalam berbuat yang terbaik bagi semua dan sesama. Yang kemudian dilakukan hanyalah melayani kepentingan pribadi dan golongan yang menghamba kepada sektarianisme belaka. Pembangkangan diri terhadap sebuah idealisme kebangsaan kemudian kian mempertegas diri bahwa bangsa ke depan akan semakin meredup dan kehilangan jati diri. Yang kemudian muncul pertanyaan adalah mengapa para penyelenggara di republik tercinta ini yang konon akan mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa kemudian melalaikan tugas mulianya itu? Terlepas apa pun jawabannya, ada satu jawaban menarik bahwa sebenarnya persoalan mengenai karut marut kehidupan berbangsa yang diakibatkan oleh perilaku penyelenggara negara yang sudah sektarian memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya sudah gagal menjadi pelindung untuk rakyat. Mereka justru menjadi pembunuh bagi hajat hidup orang banyak. Menjadi perampok bagi rakyat ternyata menjadi pilihan yang dijalankan para penyelenggara di republik tercinta ini. Sebuah keadaan ironis yang sangat mencabik-cabik idealisme kebangsaan yang mengedepankan kepentingan bangsa.

Tentu, apa yang disampaikan Yudi Latif tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Soedarsono bahwa ternyata manusia Indonesia, terutama para penyelenggara negara lebih suka menjadi sosok-sosok yang seolah berbuat baik padahal justru sedang menyusun strategi untuk melakukan

---

<sup>9</sup> Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hal. 49.

kejahatan demi kejahatan. Atas nama seolah-olah kepentingan rakyat dan bangsa, mereka mencoba dengan sebaik mungkin memoles diri untuk bisa ditampilkan sebagai manusia yang baik hati dan penyayang kepada semua dan sesama. Di balik itu semua, mereka kemudian menghancurkan masa depan rakyat dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis serta destruktif. Dari penampilan kinerja semacam inilah, manusia Indonesia yang memimpin republik ini sudah redup dan kehilangan jati diri sebagai pemimpin bangsa yang bertekad untuk berjuang demi kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Jati diri pemimpin yang berhati mulia dan agung dalam rangka menyelamatkan bangsa dari pelbagai persoalan sudah tidak tergambar sama sekali dalam konteks kongkret dan praksis.<sup>10</sup>

Kondisi ini sangat menyedihkan dada dan seluruh rakyat pun tidak bisa memiliki harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi kehidupan bangsa ke depannya. Sebuah perbaikan dan kemajuan yang semu selanjutnya menjadi sebuah realitas sebab para penyelenggara negara sudah tidak lagi memiliki keinginan sangat serius dalam membetulkan kehidupan bangsa. Mereka sudah sibuk mencari sesuatu yang tidak mempunyai hubungan sangat signifikan dan nyata dengan kehidupan rakyat. Yang kemudian dikerjakan selama ini adalah bagaimana tujuan jangka pendek dan sesaat serta merupakan kenikmatan duniawi sektoral kemudian bisa terpenuhi dengan sedemikian rupa.

Sebuah gambaran bangsa yang memang diakui maupun tidak telah jauh dari idealitas untuk sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dalam pembangunan kehidupan rakyat. Sebuah kegagalan tentunya bisa dinamakan sedemikian ketika tidak ada sebuah prospek penting yang bisa dinikmati oleh semua. Rakyat tetap saja tersungkur dalam ketidakjelasan masa depan dan bangsa pun kian masuk dalam lubang kegelapan masa depan. Rakyat tetap saja tidak bisa keluar dari jeratan kemiskinan sedangkan bangsa secara terus menerus dipermainkan oleh oknum penyelenggara negara yang sangat rakus dan tamak dengan kekuasaan dan

---

<sup>10</sup> Soemarno Soedarsono. *Membangun Jati Diri Bangsa..* (Jakarta: Elex Media Komputindo, Tanpa Tahun). Hal. 7.

lain sejenisnya. Praktik-praktik yang menodai amanat suci untuk bekerja sepenuh hati untuk rakyat sudah dijalankan dengan sedemikian rupa.

Menarik apa yang disampaikan Haryatmoko tentang kondisi bangsa yang karut marut dan meredup, ia mengatakan bahwa kunci dan akar utama mengapa itu bisa terjadi karena perilaku para penyelenggara negara yang koruptif. Dominasi kepentingan sektarian begitu mengakar dengan sedemikian rupa sedangkan kebersamaan atas nama bangsa sudah dinomorduakan. Tak pernah ada lagi upaya diri para penyelenggara negara untuk mau meletakkan dominasi perjuangan rakyat di atas segala-galanya. Dalam kondisi demikian, menjadi mustahil untuk mengharapkan sebuah realisasi pekerjaan penyelenggara negara yang bersih dan tulus untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Justru para penyelenggara negara kian rakus dan tamak dengan menunaikan segala kebutuhan sektariannya. Diakui maupun tidak, korupsi sebagai akar persoalan dari redupnya masa depan bangsa bisa disebut sebuah habitus buruk bangsa. Apa yang kemudian dipertaruhkan dalam habitus buruk korupsi adalah pembentukan mentalitas bangsa, sebut saja mental menerabas, egoisme, tak peduli kesejahteraan bersama, tak peka terhadap ketidakadilan, redupnya solidaritas.<sup>11</sup>

Mengapa sejumlah perilaku tersebut kemudian menjadi terbentuk dalam kehidupan para penyelenggara negara, maka ini selanjutnya tidak lepas dari sebuah pembiasaan diri yang tidak pernah disadari sebelumnya. Habitus, dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa ia merupakan sebuah keterampilan yang menjadi tindakan praktis dan tidak selalu disadari sama sekali. Tindakan praktis ini menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, mengapa banyak penyelenggara negara kemudian tidak pernah peka dan memekakan diri terhadap nasib bangsa yang semakin redup, ini selanjutnya memang menjadi bebalnya para pejabat dalam memikirkan kehidupan rakyatnya.

---

<sup>11</sup> Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hal. 61.

<sup>12</sup> P. Bourdieu. *The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature*. (Cambridge: Polity Press, 1994). Hal. 16-17.

Walaupun rakyatnya semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan kehidupan yang kian akut, para penyelenggara negara sepertinya sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Rakyat memang harus miskin dan dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan negara yang elitis. Kehidupan rakyat memang harus berada di bawah sedangkan para penyelenggara negara berada di menari gading. Kondisi rakyat yang miskin adalah sebuah drama kehidupan agar para penyelenggara negara kemudian bisa lebih nyaman dalam menduduki kursi kekuasaannya.

Oleh sebab itu, bangsa redup sesungguhnya bukan karena ia redup sendiri, namun ada yang menjadikan redup. Bangsa yang kehilangan semangat untuk meraih mimpi yang besar di masa depan, bukan pula karena bangsa tidak mau meraih mimpi itu akan tetapi ada oknum yang menghambat untuk mencapai itu. Bangsa yang terus menerus tetap terbaring sakit sebetulnya bukan karena tidak mau sembuh namun karena ada sejumlah manusia teras atas di republik tercinta ini yang tidak menghendaki agar bangsa ini menjadi sembuh. Bangsa yang menangis meratapi nasibnya yang malang sebetulnya juga terjadi akibat ada manusia-manusia Indonesia yang sudah menjadikan bangsa ini menangis dan sedih.

Sebuah potret kehidupan bangsa yang sangat luar biasa memprihatinkan di tengah keinginan kuatnya untuk mau maju. Sebuah tekad bulat untuk menjadi bangsa besar namun itu kemudian berhenti di tengah jalan akibat perilaku para elit negeri yang sangat luar biasa apatis dan tidak mau tahu sama sekali. Yang ada dalam benak para penyelenggara negara yang konon mewakili rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah bagaimana mereka untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang tidak jelas mengamankan posisi dirinya dari kehancuran. Tentu, tindakan tepat yang harus dilakukannya adalah menikam bangsa ini dari segala penjuru agar tidak mengganggu kepentingan sektariannya.

## **B. Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan di republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis penghitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam katagori miskin. Delapan persen

dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrem. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni 2 dollar AS paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) per jiwa per hari, ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional 1 dollar AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrem yang bersifat akut ini adalah sekitar 7 persen dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per 1 dollar AS terhadap beras jenis medium sepuluh tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per 1 dollar AS pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kilogram beras, pada 2010 hanya 1,18 kilogram. Demikian pula kemampuan beli per dollar AS atas minyak goreng, yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter (Koran Jakarta, 9/06).

Pertanyaannya adalah kebijakan ekonomi jenis apa yang sudah dibuat negara (pemerintah) sehingga jumlah rakyat yang miskin bukan semakin berkurang, akan tetapi terus bertumpuk-tumpuk dari fase ke fase? Mengapa negara tetap mempertahankan pola-pola kebijakan yang sangat mencekik rakyat, bukan seharusnya menjadikan kebijakan ekonomi di fase pemerintahan sebelumnya sebagai pelajaran sangat berharga di masa depan? Jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama, yang tidak merubah keadaan menjadi baik dan lebih baik. Oleh sebab itu, ketika negara salah melahirkan kebijakan ekonomi, hal tersebut akan berdampak kepada semakin salahnya orientasi pembangunan kehidupan rakyat. Pasalnya, negara tidak mampu membuat sebuah terobosan kebijakan ekonomi politik yang dapat membebaskan rakyatnya dari persoalan-persoalan kemiskinan dengan segala anak pinaknya. Negara seharusnya menjadi bagian terpenting dari kehidupan rakyat serta merupakan pilar bagi berdirinya kehidupan kesejahteraan yang kokoh, hal sedemikian justru ibarat menegakkan benang basah. Yang terjadi sebaliknya adalah menambah kesengsaraan dan kepedihan kehidupan rakyat. Kebijakan negara menghancurkan masa depan dan nasib rakyatnya sudah sangat luar biasa hebat. Negara bertindak sangat anarkis dan destruktif dengan menampilkan kebijakannya yang

tidak populis dan anti keberberpihakan pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

Negara menghadirkan dirinya sebagai pemusnah massal bagi kehidupan rakyat. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur kemiskinan antah berantah. Sudah tidak tidak memiliki niatan politik yang tulus dan terbuka agar mampu memberikan dedikasi terbaik bagi rakyat. Bahkan, sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat terhadap pelbagai kenyataan pahit yang sedang dialami rakyatnya. Negara sudah mengabaikan tanggung jawab, mandat politik dan amanatnya dalam rangka bekerja sebaik-baik mungkin bagi keberlangsungan hidup rakyat. Ia kemudian lebih memilih mengamankan kepentingan pribadi dan golongannya semata. Ketika rakyat menjerit-jerit dan mati kelaparan akibat kemiskinan, negara tetap tidak mau merubah rumusan dan cara pandangnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Rakyat kemudian menjadi tumbal kepentingan penguasa yang sangat serakah, rakus dan tamak. Rakyat dikorbankan atas nama sebuah kebijakan yang lebih mendukung implimentasi ekonomi kapitalis. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diciptakan negara memberikan dukungan bagi kepentingan para kapitalis dan kroni-kroninya. Bila kemudian ada rakyat yang makan nasi aking, tewul dan selanjutnya berakhir dengan kematian, inilah salah satu bentuk kegagalan negara dalam melayani hajat hidup orang banyak.

Secara berulang-ulang, negara selalu mempublikasikan prestasinya dalam mengangkat capaian-capaian ekonomi makro, namun persoalannya adalah capaian ekonomi makro sangat sulit menyentuh ranah-ranah ekonomi yang dialami rakyatnya. Ekonomi makro lebih bertautan pada bagaimana negara menekan inflasi, mengupayakan prospek ekonomi nasional yang cerah antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral. Ekonomi makro lebih berbicara pada seputar kebijakan-kebijakan negara yang mendorong pada meningkatnya investasi yang masuk ke dalam negeri, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang membaik, dan begitu seterusnya. Persoalannya adalah capaian-capaian ekonomi makro tersebut sangat jauh dari harapan nyata untuk mengangkat

nasib ekonomi rakyat sebab ia lebih berputar-putar pada kepentingan ekonomi para elit, bukan akar rumput. Ini selanjutnya lebih tepat dinamakan sebagai capaian ekonomi lipstick yang sebatas bertujuan memberikan citra yang baik kepada negara dan atau rezim.

Apakah rakyatnya tetap miskin, negara melalaikan itu. Padahal bila negara mempunyai komitmen politik sangat tinggi, memberikan dukungan, dorongan positif dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi mikro, maka ini sangat membuka harapan baru bagi kehidupan rakyat. Memperbaiki ekonomi mikro dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang menyetatkan ekonomi kelas menengah ke bawah merupakan sebuah hal niscaya untuk dipraksiskan dengan sedemikian rupa. Memproteksi ekonomi mikro agar tidak mengalami guncangan, permasalahan serta menyuntik dengan program-program berkelanjutan demi mengawal perekonomian rakyat yang dinamis menjadi agenda mendesak. Konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Bung Hatta perlu dijabarkan dalam wilayah kebijakan-kebijakan negara yang berkeadilan, bukan semata dipajang dalam Konstitusi Dasar Republik ini pasal 33, namun tidak bermakna bagi kehidupan rakyatnya. Perekonomian dijalankan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan yang disebut demokrasi ekonomi, maka itu harus dikonkretkan dalam bentuk yang jelas dan visioner. Apakah itu bisa dilakukan oleh rezim? Rakyat menunggu kerja konkret, bukan sebatas janji dan retorika.

Kini apapun jawabannya, realitas mengenai kemiskinan sesungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian kronis dan ironis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok

negara tertentu.<sup>13</sup> Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil.<sup>14</sup> Pandangan ini juga diperkuat oleh Sachs yang mengatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan disebabkan oleh dampak globalisasi *an sich*, melainkan juga oleh pemerintah dan elit politik yang kurang memberikan perhatian sangat intensif terhadap rakyat dan penyakit yang selama ini mengakar dalam perilaku para elit tersebut adalah korupsi. Dengan demikian, penyebab utama kemiskinan adalah kemiskinan struktural dalam bentuk akses sumber daya, relasi kekuasaan antara rakyat dan negara serta pemerintah dan kreditor. Kemiskinan pun bukanlah produk yang secara tiba-tiba muncul ke permukaan, namun ia merupakan sebuah penindasan dari negara terhadap rakyatnya.<sup>15</sup>

Sementara dalam pandangan strukturalis, kemiskinan struktural bukanlah sebuah kondisi miskin akibat hambatan badaniah, kemalasan ataupun bencana alam, melainkan struktur yang dibuat oleh manusia. Kemiskinan muncul akibat struktur ekonomi, politik, dan budaya. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan kemiskinan struktural yang dibuat oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia. Menurut Selo Soemardjan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat dan penyebab utamanya adalah ketimpangan struktur sosial sehingga mereka yang tergolong miskin tampak tidak berdaya mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki nasibnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suatu suasana kemiskinan secara turun temurun selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, kemiskinan

---

<sup>13</sup> Al. Suroyo FM dkk. *Agama & Kepercayaan Membawa Pembaruan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006). Hal. 97.

<sup>14</sup> Titik Handayani. *Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan Kritis*. (Jakarta: Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI, Jilid XXXIV, No. 2, 2008). Hal. 144.

<sup>15</sup> Sachs, Jeffrey. *The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime*. (USA: Penguin Press, 2005). Hal. 144-145.

yang timbul kemudian lebih disebabkan oleh struktur yang mapan dan menindas.<sup>16</sup>

Masih terkait dengan kemiskinan struktural, kemiskinan tersebut kemudian dapat dibaca dalam beberapa aspek. Kemiskinan dalam bidang ekonomi adalah pendapatan yang lebih rendah dari pada kebutuhan pokok, pemilikan aset ekonomi yang terlalu sedikit, produksi barang atau jasa yang terlalu sedikit dan dengan harga murah. Sementara dalam konteks sosial budaya, kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah dan tidak ada, atau menganut pendapat Oscar Lewis dinamakan kebudayaan kemiskinan. Sementara dalam konteks politik, kemiskinan adalah rendahnya partisipasi politik kaum miskin yang menyebabkan rendahnya pengaruh kaum miskin terhadap kebijakan negara. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan banyak kebijakan negara merugikan kaum miskin.<sup>17</sup>

Dari sekian beberapa pandangan tentang kemiskinan struktural, maka hal tersebutlah yang menjadikan bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada orang miskin tentu memberikan sumbangan sangat signifikan bagi hancurnya keadaban bangsa. Kalau mau dianalisa secara lebih kritis, kebijakan negara yang elitis dan eksklusif sesungguhnya menjadi bagian dari bentuk korupsi bagi hajat hidup orang banyak. Salah satunya adalah tentang pemanjaan diri kepada para abdi negara dalam bentuk perjalanan dinas. Diakui maupun tidak, sesungguhnya anggaran perjalanan dinas yang tinggi menjadi bagian dari kebijakan negara yang tidak populis dan bisa pula disebut sudah melakukan korupsi uang rakyat. Pasalnya, seharusnya anggaran negara diperuntukkan demi hajat hidup orang banyak, itu pun menjadi gagal ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. Anggaran negara tidak lagi difungsikan dengan sedemikian proporsional dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang melayani hajat hidup orang banyak.

---

<sup>16</sup> Maria Hartiningsih (Ed). *Korupsi yang Memiskinkan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hal. 158-161.

<sup>17</sup> Merphin Panjaitan. *Memberdayakan Kaum Miskin*. (Jakarta: BPK Mulia, 2000). Hal. 14.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas di instansi pemerintah pusat maupun daerah selama Semester I Tahun 2012. Total kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas itu mencapai Rp 77 miliar dari 259 kasus yang ditemukan. Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui sebanyak 86 kasus dengan nilai kerugian Rp 40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan 173 kasus dengan nilai Rp 36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan. Penyimpangan penggunaan anggaran tersebut selalu terjadi karena pegawai tidak mematuhi ketentuan, lemahnya kendali dari atasan, serta tidak adanya verifikasi bukti pertanggungjawaban (Jurnas, 20/10).

Temuan BPK pada tahun sebelumnya atau 2011 juga merilis bahwa ternyata telah terjadi pemborosan hingga 40% atau Rp 7,2 triliun dari biaya perjalanan dinas kementerian/lembaga pada 2011 yang mencapai Rp 18 triliun,. Hasil pemeriksaan BPK selanjutnya menegaskan bahwa ada tiga kementerian dengan angka dugaan penyelewengan yang sangat mencengangkan.

Di Kementerian Sosial, telah terjadi kebocoran yang mencapai lebih dari Rp 405 miliar. Kebocoran itu terkait dengan tidak adanya dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sah. Di Kementerian Kesehatan, terjadi kebocoran anggaran akibat termakan oleh perjalanan dinas yang rangkap, kelebihan pembayaran, perjalanan dinas fiktif hingga perjalanan dinas tanpa bukti yang valid. Nilainya mencapai lebih dari Rp 27 miliar. Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga terjadi kebocoran anggaran lebih dari Rp. 700 juta dalam bentuk perjalanan dinas tanpa tiket dan perjalanan dinas dengan tiket yang diragukan kebenarannya (Media Indonesia, 15/09/12). Tentu, laporan temuan BPK tentang anggaran perjalanan dinas 2012 dan 2011 yang sangat memalukan tersebut kian menunjukkan bahwa sesungguhnya anggaran selama ini tidak dan belum disalurkan demi meningkatkan kualitas hidup rakyat. Anggaran selalu masuk dalam pemenuhan kepentingan golongan yang sangat tidak pernah menyentuh nasib jutaan rakyat Indonesia.

Anggaran berhenti dan berputar-putar di ruang kekuasaan sekaligus berakhir pada pemanjaan diri sendiri. Tidak ada anggaran yang kemudian mampu diteteskan pada pembangunan publik. Tidak ada kerja nyata dari perjalanan dinas dengan anggaran yang sangat besar bagi publik. Tidak ada harapan baik dari perjalanan dinas yang dilakukan para abdi negara bagi perbaikan kerja dan kinerja ke depannya. Apakah melakukan perjalanan dinas atau tidak, sesungguhnya itu sebatas formalitas dan ritualitas semata untuk menghabiskan anggaran agar tetap dikesankan seolah-olah sudah bekerja. Perjalanan dinas adalah program yang memang dirancang dengan sedemikian rupa supaya anggaran negara cepat terserap habis. Dengan demikian, perjalanan dinas sebetulnya hanyalah kedok untuk menutupi muka sesungguhnya dari kebohongan-kobohongan dan pembohongan-pembohongan untuk publik.

Oleh sebab itu, apa yang kemudian diperlihatkan para abdi negara dengan kerja-kerja anti rakyat kian mempertontonkan bahwa ada ketidaknyambungan antara apa yang dikerjakan abdi negara terhadap kehidupan rakyatnya. Para abdi negara lebih bekerja sendiri demi kepentingan diri dan golongannya. Peluang adanya perjalanan dinas dengan anggaran yang sudah dimanjakan oleh negara justru semakin dimanfaatkan untuk melakukan pelesiran dan mencari keuntungan-keuntungan sektoral lainnya. Kondisi ini sangat ironis. Di tengah slogan negara yang ingin melakukan reformasi birokrasi dalam rangka melahirkan birokrasi yang transparan dan kemudian bisa menjalankan tugas sekaligus tanggung jawabnya untuk kepentingan publik, ini tidak mampu ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. Reformasi birokrasi gagal diselenggarakan dengan sedemikian berhasil. Agenda reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan para abdi negara mampu bekerja sesuai prinsip *'the right man on the right place'* ternyata tidak dan belum diberlakukan secara serius dan tegas.

Oleh karenanya, selama ini anggaran hanya menjadi bancakan kelompok tertentu yang semata ingin memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Para abdi negara selama ini juga sudah mulai menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat bahwa sesungguhnya adanya anggaran yang besar sebetulnya adalah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

Ketika ada anggaran yang cukup menggiurkan, hal tersebut menjadi upaya diri sejumlah pihak untuk selanjutnya dirampok dengan pelbagai modus. Anggaran tidak lagi dari rakyat dan untuk rakyat. Ia justru berasal dari rakyat dan kemudian dipersembahkan bagi sebesar-besar kemakmuran para abdi negara *an sich*. Rakyat yang memberikan sebagian hartanya dalam bentuk pajak kepada negara agar kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk pembangunan bagi rakyat baik itu dalam berbentuk infrastruktur maupun suprastruktur, itu kemudian menjadi tidak dikerjakan dengan sedemikian nyata dan konkret.

Diakui maupun tidak, mengapa perjalanan dinas selama ini hanya lebih menghabiskan uang rakyat dan tanpa menuai hasil nyata bagi rakyat, maka ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan negara atas pelbagai tindakan yang dilakukan para abdi negara. Ketika ada abdi negara yang melakukan pelanggaran, peringatannya hanya dalam bentuk teguran lisan dan administratif, bukan langsung kepada tindakan-tindakan yang berbuah kepada *shock therapy*. Apakah ini benar-benar teguran dan pengawasan yang benar-benar terjadi atau tidak sengaja atau disengaja, kita semua tidak tahu. Apakah ini justru sudah dilakukan secara sistematis di antara pihak-pihak tertentu, kita pun juga tidak tahu. Setidaknya, semakin membesarnya anggaran untuk perjalanan dinas dari tahun ke tahun dan tidak tepatnya penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas sangat jelas memberikan sebuah jawaban sangat nyata bahwa memang sepertinya tidak ada komitmen sangat serius dari negara untuk mewujudkan birokrasi dan birokrat yang bersih dari kepentingan-kepentingan kerdil serta sempit. Kita kemudian bisa melihat dari besaran anggaran perjalanan dinas pada 2013 yang dialokasikan sebesar Rp 21 triliun dan itu naik Rp 3 triliun dari tahun sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah negara ingin mengulang kesalahan sebelumnya yang hanya memanjakan para abdi negara dengan produktivitas kerja yang sangat menyebalkan? Apa pun jawabannya, adalah sebuah kesalahan besar ketika porsi anggaran hanya digemukkan dan lebih digemukkan untuk peningkatan kepentingan aparatus negara, sedangkan kepentingan yang lebih besar, menyangkut hajat hidup orang banyak kemudian dibuncitkan. Ini sangat tegas memberi

jawaban nyata bahwa negara memang sedang tidak bekerja untuk rakyat, namun untuk diri dan kelompoknya semata. Apakah kehidupan rakyat terus menerus berada dalam penjara penderitaan multidimensi, negara sudah melepaskan tanggung jawab.

Wajah perjalanan dinas yang begitu memalukan tersebut, dengan demikian, sudah sangat jelas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk menuju pemiskinan struktural. Para pejabatnya dimanjakan dengan sedemikian rupa, sementara rakyatnya tidak mendapatkan ruang pelayanan publik yang memuaskan. Ketika para pejabat dan penyelenggara negara meminta anggaran, itu kemudian langsung diamini, sedangkan tatkala rakyat berteriak kelaparan dan memerlukan peran negara guna mengenyangkan rakyatnya, negara tidak memedulikan itu sama sekali. Kondisi sedemikian tentu kian membawa satu kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak jelas visi dan misinya. Kemanakah rakyat harus menjalani kehidupannya agar mampu meraih masa depan yang sejahtera, negara justru sangat mengabaikan itu dengan sedemikian rupa.

Antara kepentingan publik dan personal sekaligus golongan kemudian saling bertarung satu sama lain. Tentu, para pejabat yang memiliki kepentingan personal dan golongan menjadi lebih bebas dan leluasa dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Rakyat akhirnya harus terus menerus dikorbankan dengan sedemikian konkret dan praksis. Mereka tidak memperoleh ruang yang baik dalam rangka mempertahankan kehidupannya baik saat ini maupun masa depan. Rakyat terus menerus diperlakukan secara sewenang-wenang oleh para elit berkuasa. Rasa kebersamaan dalam mengelola republik ini agar kemudian bisa memberikan kehidupan yang baik hajat hidup orang banyak sudah sangat tidak ada sama sekali. Agenda sektoral dan sektarian menjadi lebih mengemuka sehingga keadaan serba menyedihkan ini membuat bangsa tidak bisa mencapai kemajuannya di masa depan. Suka atau tidak suka, perjalanan kehidupan rakyat yang telah dibuat sengsara dan menderita oleh pelbagai kebijakan negara yang anarkis dan destruktif sesungguhnya juga telah menjungkalkan harapan bersama untuk bisa segera keluar dari kemiskinan antah berantah.

Mengenai belum sembuhnya bangsa ini dari penyakit korupsi yang kemudian melahirkan kemiskinan struktural, hal tersebut muncul karena negara memang sudah sangat abai dan mengabaikan keinginannya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tekad bulat untuk membebaskan negeri ini dari kehidupan bangsa yang karut marut sudah tidak pernah dipegang teguh sekaligus menjadi fondasi bergerak. Para elit berkuasa sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat. Tatkala kebijakan muncul dan ternyata kemudian memproduksi kemiskinan-kemiskinan baru di tengah masyarakat, negara seolah-olah tidak pernah mengambil peran sangat serius dalam kerja-kerja pembangunan dan perbaikan. Negara benar-benar minus gerakan dan pergerakan progresif untuk mendorong sebuah perubahan menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama. Negara menjadi lupa terhadap tanggung jawab politiknya untuk bekerja demi melayani hajat hidup orang banyak.

Tanggung jawab publik negara yang sudah mengemban mandat pelayanan hajat hidup orang banyak gagal dilaksanakan dengan sedemikian rupa. Melayani hajat hidup banyak justru kemudian dimaknai dengan melayani diri sendiri dan golongan tanpa tujuan yang jelas dan konkret bagi pembangunan kehidupan rakyat. Inilah sebuah keadaan yang sangat ironis dan mengkhawatirkan. Dimanakah ruang kesadaran negara dalam memahami fenomena kemiskinan-kemiskinan yang dihadapi rakyatnya yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan antirakyat? Dimanakah ruang kepedulian sangat tinggi dari negara dalam rangka melakukan kerja-kerja pemanusiaan rakyat miskin? Memanusiakan rakyat miskin dalam konteks ini dimaknai bahwa negara sudah seharusnya mampu memerhatikan kehidupan rakyat miskin dengan mengambil peran aktif dan progresif dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan justru menyakiti rakyat. Kemiskinan struktural mampu direduksi dan dihilangkan ketika setiap kebijakan negara yang akan diproduksi selalu menjadikan kehidupan rakyatnya sebagai basis pertimbangan, apakah ini merugikan ataukah menguntungkan kehidupan hajat hidup orang banyak.

### C. Pembangunan di Tengah Kepungan Korupsi

Pembangunan bangsa di segala bidang merupakan cita-cita bersama. Peningkatan akses pendidikan bagi orang-orang miskin adalah sebuah hal niscaya agar mereka selanjutnya bisa mencicipi dunia pendidikan sehingga mereka selanjutnya memiliki masa depan yang baik. Tentunya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kemajuan bangsa pun akan tercapai. Pasalnya, republik ini sudah berkurang anak-anak negeri yang buta aksara, namun sebaliknya mereka sudah memiliki pengetahuan dan keahlian sehingga dengan demikian mereka kemudian dapat memanfaatkan modal tersebut sebagai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut juga seharusnya terjadi di peningkatan kesehatan agar anak-anak di negeri bisa memiliki fisik yang normal, dan lain sejenisnya. Kesehatan sebagai modal utama bagi keberlangsungan manusia Indonesia tentunya merupakan sebuah harga mahal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kebijakan kesehatan harus benar-benar diproduksi agar bisa berpihak kepada kepentingan publik. Infrastruktur jalan, bangunan sekolah, dan lain sejenisnya pun sudah semestinya terus dibangun dengan sedemikian rupa. Pasalnya, keberlangsungan hidup bangsa tetap tidak akan dilepaskan dari bagaimana pembangunan di banyak bidang yang memengaruhi agenda kebangsaan. Persoalannya adalah kini pembangunan bangsa di banyak bidang sedang berada dalam kepingan korupsi yang sangat luar biasa masif. Pendidikan sebagai *leading sector* pencerahan ternyata telah disandera oleh kepentingan elit. Oleh karenanya, banyak anggaran pendidikan mulai dari tingkat pusat hingga bawah disunat untuk kepentingan golongan dan personal. Akhirnya, agenda pembangunan kualitas manusia Indonesia menjadi terhambat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 miliar telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 2003-2013. Untuk 2003 dan 2012, jumlahnya berada di kisaran 8 kasus. Untuk tahun 2003, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 19,0 miliar, sedangkan di 2013 Rp. 99,2 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian merupakan wilayah seksi yang paling sering dikorupsi dengan jumlah kasus sebanyak 84 kasus.

Dari jumlah tersebut, kerugian yang dialami negara terbesar adalah Rp 265,1 miliar. Masih menurut ICW, Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi paling banyak terjadi dengan jumlah kasus sebanyak 151 kasus. Dari jumlah tersebut indikasi kerugian negara paling besar Rp 356,5 miliar.

Kini yang menjadi persoalan adalah mengapa korupsi tidak pernah berhenti menghancurkan bangsa ini? Kemdikbud pun yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah keberlangsungan pendidikan dan budaya yang membangun kehidupan berbangsa kemudian pun harus ikut-ikutan dikoyak moyak. Dalam konteks ini, pendidikan yang mengajarkan pemanusiaan manusia dan budaya yang membangun semangat cinta kasih dan rasa kepada kehidupan bangsa sudah tidak ditunaikan sama sekali. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Sejumlah oknum pun di elit lapis atas justru menjadikan pendidikan dan budaya sebagai jalan untuk mencari keuntungan sektoral belaka. Menghancurkan keadaban publik kemudian dilakukan secara tanpa beban moral. Apa yang sedang terjadi pada Kemdikbud saat ini sesungguhnya bukan persoalan baru, namun justru hal tersebut semakin memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa bangsa ini benar-benar kehilangan harga diri sebagai bangsa yang beradab. Bangsa yang seharusnya dibangun lewat pendidikan dan budaya justru tidak mampu berjalan secara maksimal dan optimal. Bangsa yang semestinya mampu berdiri tegak sebagai masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan kemudian tidak mampu mewujudkan nyata sebab sudah dikotori oleh ulah manusia-manusia jahat serta serakah.

Padahal ketika berbicara tentang bangsa, ini selanjutnya berbicara tentang nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mencerminkan diri sebagai manusia-manusia santun dan baik seharusnya mampu dipertontonkan dengan sedemikian rupa. Bangsa, dengan demikian, berjalani kelindan dengan kemuliaan diri yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal apapun, termasuk di dalamnya uang. Tentu, ketika pendidikan dan budaya justru menjadi kuda tunggangan sejumlah elit beserta oknum-oknum lain untuk tujuan destruktif dan koruptif, ini pun sudah menghilangkan tujuan mulia pendidikan dan budaya itu sendiri. Jauh-jauh

hari Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun kesadaran diri untuk bisa peka terhadap lingkungan.<sup>18</sup> Keterlibatan aktif dan partisipatoris dalam praktik-praktik kebajikan kolektif menjadi agenda penting dalam pendidikan. Setiap dari kita pun perlu menerjunkan diri dalam kerja-kerja kebajikan dan kebaikan. Esensi mendasar dari pendidikan adalah pembangunan mentalitas diri agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dengan sepenuh hati dan jiwa. Setiap yang dikerjakan pun berasal dari hati nurani, bukan direkayasa dengan sedemikian rupa untuk mengelabui orang atau lain sejenisnya. Setiap apa yang dikerjakan pun lahir karena sebuah keinginan dari dalam diri untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Kesadaran personal yang selanjutnya menjadi kesadaran kolektif menjadi fondasi dalam bergerak. Itulah yang disebut tujuan pendidikan seutuhnya.

Budaya, di lain hal, tentunya menjadi sebuah nilai universal yang semakin mengayakan apa yang dikerjakan manusia sebab di dalam budaya ada norma yang berusaha mengenalkan manusia kepada sesuatu yang baik dan tidak, bermoral dan tidak, dan begitu seterusnya. Tentu, apa yang disampaikan oleh Kontjaraningrat bahwa budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, hal demikian memang benar adanya. Sesuatu yang menjadi cipta manusia dan kemudian memiliki nilai rasa tinggi serta dilahirkan dari sebuah karsa akan menjadi penggerak dalam kehidupan manusia. Budaya melembutkan hati manusia dan mengindahkannya kehidupan berbangsa. Budaya tentunya lahir dari bangsa dan kembali untuk bangsa sehingga apa yang dilakukan manusia Indonesia pun harus menjadi refleksi dari budaya itu sendiri. Itulah yang selanjutnya tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, pendidikan dan budaya pun sesungguhnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Kini apa yang sudah menjadi kenyataan pahit di depan mata dimana praktik penggelapan uang negara berlangsung dan dilakukan oknum pejabat negara sangat jelas telah mencoreng moreng dunia pendidikan dan budaya sebagai kebanggaan milik bangsa. Hanya atas nama kerakusan,

---

<sup>18</sup> Yosef Dedy Pradipto. *Belajar Sejati Versus Kerukulum Nasional*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hlm. 54

keserakahan, dan ketamakan, pendidikan dan budaya yang menanamkan kebaikan, kebajikan, dan kesholehan hidup bagi bersama kemudian dihancurkan-leburkan. Tentu ke depannya, kemanakah bangsa ini akan melangkah tatkala pendidikan dan budaya sudah kehilangan identitasnya, kita semua tidak tahu. Ulah elit negeri yang sudah kehilangan akal sehatnya telah menjerumuskan pendidikan dan budaya kepada lubang kehancuran martabat.

Elit negeri yang sudah menggunakan tangan kekuasaannya untuk mengorupsi uang negara melalui dunia pendidikan dan budaya telah semakin menutup harapan besar dan mulia agar bangsa ini menjadi besar. Oleh karenanya, apapun bentuk kinerja para elit di republik ini selama tidak ada komitmen dan kemauan serius dalam menggarap pendidikan dan budaya sebagai ujung tombak identitas bangsa, negara dan bangsa ini akan tetap bangkrut. Tanggung jawab negara kemudian selama ini bisa disimpulkan masih sangat setengah hati dalam mengelola bangsa. Sikap setengah hati yang masih membuka peluang korupsi baik sengaja maupun tidak sengaja sebab tidak ada pengawasan ketat sudah mengilustrasikan bahwa negara belum mampu melakukan yang terbaik bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Akhirnya, selama kondisinya seperti itu, kita selanjutnya tidak akan mampu menjadi bangsa yang maju.

Data korupsi pendidikan pun tidak jauh berbeda dengan data korupsi yang ada di banyak sektor pembangunan lainnya, sebut saja kesehatan, infrastruktur dan lain sejenisnya. Pada prinsipnya, korupsi sebenarnya telah menghambat kemajuan bangsa. Korupsi telah memberikan luka menganga bagi masyarakat Indonesia dan luka tersebut tidak pernah sembuh sampai kapanpun. Ketika luka lama tersebut tidak pernah bisa sembuh, maka sampai kapanpun bangsa ini juga tidak akan pernah sehat untuk melakukan perjalanan kehidupan berbangsanya. Semakin lama negeri ini hidup dengan kemiskinan, maka semakin jelas arah perjalanan bangsa akan terseok-seok.

Harapan untuk menjadi bangsa yang lepas dari jeratan perilaku dan tindakan para koruptor pun adalah sebuah kemustahilan belaka. Pasalnya, semuanya sudah lupa bahwa di balik tanggung jawab yang diembankan

kepada para elit di negeri ini, ada tugas mulia dan suci untuk membesarkan bangsa. Tentunya, tatkala amanat sudah dibuang dengan sedemikian jauh dan masuk ke tong sampah, maka pada saat itulah masa depan ini akan menjadi muram dan suram. Muram dan suramnya bangsa timbul karena tidak ada pemimpin yang mau bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. Semuanya sudah bekerja atas nama tujuan dan kepentingan masing-masing. Tidak ada lagi komitmen dan kemauan kuat untuk mau memperbaiki bangsa. Yang ada justru sebaliknya adalah kian mencabik-cabik martabat dan kedaulatan bangsa dengan cara merampok uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat, apabila harus diterjemahkan secara lebih gamblang, adalah kondisi dimana rakyat yang awalnya tidak bisa apa-apa harus bisa berbuat banyak apa-apa demi kepentingan mereka, dan banyak hal lainnya. Di sinilah lonceng kematian bangsa sedang ditabuh tatkala semua manusia elit di negeri ini sudah kehilangan nalar profetiknya untuk berbuat sebesar-besar kepentingan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, idealisme sudah digantikan dengan pragmatisme golongan dan personal yang hanya mengenal tujuan sesaat dan jangka pendek. Nasionalisme sudah diganti dengan chauvinisme yang lebih dekat kepada golongan masing-masing.

## BAB II

### PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Satu per satu pejabat negara diseret ke meja hijau, mulai dari anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah, mantan anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah, pejabat tinggi Bank Indonesia (BI), mantan pejabat tinggi BI, pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan lain seterusnya. Sebab mereka terlibat dalam kasus korupsi dan telah menghabiskan uang negara demi kepentingan pribadi maupun golongan. Hal tersebut tentu merugikan negara. Contoh kasat mata adalah Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan M.S Ka'ban yang sebelumnya pernah menjadi anggota dewan periode 1999-2004 pun ikut masuk daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab terindikasi turut menerima dan menikmati dana Bank Indonesia (Jawa Pos, 2 Agustus 2008).

Pertanyaannya adalah bagaimana mengupayakan supaya korupsi di negeri ini bisa hilang? Semua pejabat negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah tidak berani melakukan korupsi uang negara. Yang jelas, mengandalkan peran KPK untuk memburu para koruptor sangatlah tidak cukup. Sebab KPK hanya mampu memejahijaukan yang sudah terindikasi. Selebihnya sangat tidak mungkin, ibarat menegakkan benang basah. Yang pasti, persoalan korupsi bukanlah masalah yang terkait dengan praksis korupsi itu sendiri, melainkan mentalitas buruk yang telah membentuk kebiasaan para pejabat negara terbiasa mengorupsi uang negara.

Menurut UU No 20/2001 jo 31/1999, korupsi dilakukan karena dua hal. Pertama, karena terpaksa sebab tidak memiliki uang untuk memperpanjang hidupnya (*survive*) sehingga mengorupsi menjadi jalan alternatif yang harus dilakoni. Kedua, karena serakah dan keserakahan. Namun apabila disebutkan bahwa pejabat negara di negeri ini tidak cukup dengan gaji yang bernilai puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah yang didapat dari negara untuk melangsungkan keberlangsungan hidupnya, seperti makan dan minum, menafkahi anak dan istri serta kebutuhan lain, hal tersebut sangat tidak rasional.

Oleh karenanya, alasan kedua sangat tepat dijadikan tesis utama bahwa mereka korupsi karena serakah, tamak, dan merasa tidak cukup kendatipun sudah hidup berkecukupan atau sangat lebih dari cukup dibandingkan rakyat di negeri ini yang hidup kesusahan dan kelaparan. Ketika ditemukan satu benang merah bahwa persoalan korupsi terletak pada mentalitas serakah dan tamak, menjadi sebuah keniscayaan apabila penanganannya pun melalui penyembuhan mentalitas buruk tersebut. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, diperlukan satu undang-undang khusus yang mengatur sanksi tegas, yakni hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Hal tersebut harus ditopang dengan sistem pelaksanaan yang jelas, rapi serta dilakukan secara profesional. Ini penting dibuat supaya para pejabat takut untuk mengorupsi uang negara. Undang-undang tersebut juga ditujukan supaya pejabat negara tidak berani memperlmainkan hukum dengan seenaknya sendiri. Realitas membuktikan, ketika pelaku korupsi berada di pengadilan, selalu saja berkelit dengan pelbagai alasan sehingga di akhir permainannya, mereka hanya dijerat hukuman sangat pendek, sebut saja lima atau lebih sedikit (baca realitas).

Putusan hakim yang hanya menjatuhkan 4 tahun 6 bulan kepada Angelina Sondakh yang awalnya sudah dituntut oleh KPK 12 tahun penjara menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pemberantasan korupsi masih sangat rendah walau pada akhirnya dia kemudian divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan. Tak hanya itu saja, majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar). Sebelumnya, baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menjatuhkan pidana uang pengganti.

Putusan tersebut diberikan oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin, Rabu (20/11/2013). Terlepas kini Angie sudah divonis lebih berat, pemberantasan korupsi masih diberlangsungkan dengan sedemikian ironis sehingga dari titik inilah kondisi tersebut sangat berbeda

jauh apabila dibandingkan dengan seorang maling yang mencuri ayam, sapi atau kambing yang berstatus kelas teri, terkadang hukumannya bisa berpuluh-puluh tahun, melebihi koruptor kelas kakap. Ini sungguh ironis. Kedua, bagi anak-anak negeri (peserta didik) yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga tingkat atas maupun tingkat perguruan tinggi, maka dibutuhkan satu materi pelajaran khusus yang mengajarkan pendidikan anti-korupsi dan segala akibat buruknya baik bagi bangsa, masyarakat maupun dirinya sendiri.

Namun materi tersebut jangan menggunakan pendekatan teologis normatif bahwa bila berkorupsi akan masuk neraka, dosa, dan lain seterusnya. Penjelasannya harus masuk akal, bisa diterima akal sehat, mampu menggugah naluri sosial peserta didik untuk ikut bertanggung jawab menjaga segala aset bangsa. Tentunya, pendidiknya pun haruslah orang-orang yang bisa berpikir rasional, memiliki cakrawala luas, menguasai materi secara sempurna, tidak mengandalkan teks *an sich*.

Bedanya antara pendidikan anti-korupsi untuk kalangan pejabat dan anak-anak bangsa yang masih menimba pendidikan terletak pada pendekatannya saja. Bagi para pejabat, pendekatannya melalui pendekatan hukum untuk mendidik mereka supaya tidak berani (takut) melakukan korupsi. Pendekatan normatif namun memberikan dampak positif edukatif bagi pembentukan perilaku dan tindakan para pejabat untuk jauh dari dan menjauhi tindakan korupsi. Ini digunakan sebagai cambuk keras dan peringatan tegas bagi semua pejabat yang akan berkorupsi agar mau berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan koruptif.

Sedangkan bagi anak-anak negeri yang masih menimba pendidikan, pendekatannya diarahkan pada pembentukan moralitas dan penguatan kesadaran sosial, termasuk pembentukan mentalitas dan karakter yang bersih dari perilaku dan tindakan koruptif. Sehingga ketika mereka menjadi pejabat di kelak kemudian hari, tidak melakukan korupsi. Mereka menjadi pejabat yang betul-betul bekerja untuk rakyat (pamong praja), menggunakan uang negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan

kemajuan bangsa.<sup>19</sup> Pertanyaannya adalah mengapa pendidikan anti-korupsi kemudian menjadi penting untuk disampaikan ke publik dan kepada semua? Diakui maupun tidak, kondisi tindakan korupsi yang semakin akut dan memprihantikan sesungguhnya menjadi *entry point* dalam konteks pemberantasan korupsi. Uang negara yang dihabiskan oleh para koruptor sudah semakin menggurita dan kondisi ini kian menyembulkan keprihatinan sangat luar biasa. Kita menghendaki agar bangsa ini segera bebas dari korupsi dan menjadi bangsa yang merdeka, namun di sisi lain ternyata masih banyak para pejabat negara yang sangat luar biasa masif dalam menggarong uang rakyat. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi (Banjarmasin Post, 31/1/13). Pucuk pimpinan partai yang konon dikenal sebagai partai bersih, profesional, dan peduli kemudian ternyata juga terlibat dalam korupsi. Ini adalah sebuah ironisitas. Republik tercinta ini pun sangat tepat disebut sebagai negara darurat korupsi. Pasalnya, para elit kita benar-benar sangat hebat mengorupsi uang negara. Negara darurat korupsi yang sangat tepat disematkan ke negeri tercinta ini selanjutnya memberikan sebuah ilustrasi secara telanjang bulat bahwa korupsi sudah menghancurkan masa depan bangsa kita. Bagaimana bangsa ini akan bisa maju, sementara uang negara sudah dirampok oleh para perampok berdasi. Setali tiga uang kalau kita mencoba merefleksikan kepada tahun-tahun sebelumnya, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata total jumlah uang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp. 39, 3 triliun. Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, dan III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa

---

<sup>19</sup> Moh. Yamin. *Pendidikan Antikorupsi Hal yang Niscaya*. (Jawa Pos, 5 Agustus 2008). Tulisan saya yang dimuat ini kemudian coba dikembangkan agar analisisnya menjadi lebih tajam dalam memotret persoalan korupsi yang semakin akut dan rumit.

berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang.

Dari sejumlah para pejabat yang konon akan memperjuangkan kepentingan rakyat, namun kemudian mereka justru melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang menghancurkan kehidupan rakyat, maka di sinilah sebuah momen pentingnya memberikan pendidikan antikorupsi kepada semua kalangan. Pendidikan anti korupsi bukan semata memberikan pencerahan dan penyadaran tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara namun juga potensi buruk bagi segala sendi kehidupan di pelbagai aspek. Pendidikan antikorupsi kemudian mesti dipahami sebagai sebuah landasan gerak dan pergerakan untuk bisa menampilkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kesadaran profetis tingkat tinggi tentang masa depan bangsa. Pendidikan antikorupsi tentu berjaln kelindan dengan kerja-kerja penyadaran diri agar manusia-manusia Indonesia memiliki pemahaman sangat mendasar tentang sebuah pentingnya memegang amanat bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Pendidikan antikorupsi mencoba membangun kesadaran tentang kedirian diri untuk bisa melakukan sebuah pengabdian diri yang bertumpu kepada kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi sebenarnya menekankan pada aspek pengenalan dan pemahaman tentang korupsi yang telah menjarah masa depan bangsa dan rakyat. Ketika berbicara tentang pendidikan antikorupsi, maka yang diharapkan adalah agar masyarakat kemudian mampu memiliki pandangan sangat positif. Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi merupakan gerakan pembangunan kesadaran diri untuk ikut peduli kepada kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Pendidikan antikorupsi menggerakkan setiap anak manusia untuk bisa memberikan kontribusi sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan antikorupsi mendorong sebuah perubahan kehidupan bermakna bagi kehidupan hajat hidup orang banyak sebab tujuan utama dari pendidikan antikorupsi adalah menciptakan wawasan kebangsaan.

Pendidikan antikorupsi bertujuan agar masyarakat selanjutnya memiliki sebuah cara berpikir yang baru mengenai urgensi pembangunan kehidupan rakyat. Realitas mengenai kehidupan rakyat yang berlumpur kemiskinan antah berantah menjadi dasar berpijak dalam implimentasi pendidikan antikorupsi. Realitas mengenai kondisi anak-anak negeri yang kehilangan masa depannya akibat ulah “nakal” para elit negeri lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan pun menjadi sebuah gerak dasar terkait bagaimana sebuah gerakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara masif dengan sedemikian rupa. Pemberantasan korupsi dengan alat pendidikan antikorupsi sebagai gerakan kultural menjadi sebuah harapan bersama agar terjadi sebuah dinamika kehidupan yang kondusif dan positif bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Teriakan para penggiat antikorupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan antikorupsi pun sesungguhnya turut membangun sebuah gerakan penyadaran humanis serta konstruktif bagi sebuah keberlangsungan kehidupan yang semakin bermakna.

#### A. Definisi Korupsi dan Bentuk Korupsi

Jauh sebelum republik ini berdiri atau jauh sebelum terbentuk negara-negara di dunia, korupsi sudah menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Korupsi sudah merasuk dan merusak setiap sendi kehidupan. Karena korupsi, kehidupan yang dilakoni menjadi amburadul. Tentu, ketika berbicara tentang korupsi, kesan yang terbentuk dalam *mindset* kita adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang diselewengkan dengan sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Pengertian praktis dari korupsi adalah menyelewengkan wewenang yang sudah diberikan untuk sebuah tujuan yang anarkis dan destruktif.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951)<sup>20</sup> atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960).<sup>21</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa

---

<sup>20</sup> Fockema Andrea. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan), (Bandung: Bina Cipta, 1951).

<sup>21</sup> Webster Student Dictionary. 1960.

Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.<sup>22</sup>

Sedangkan mengacu kepada *New World Dictionary Of The American Language* (1976), sejak abad pertengahan Inggris dan Perancis sudah menggunakan kata corruption yang mengandung arti sebagai berikut:

- a) Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perbuatan ini kemudian melahirkan sebuah anomali bagi kehidupan sekitar.
- b) Perbuatan jahat dan tercela.
- c) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
- d) Kebusukan atau tengik.
- e) Suatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- f) Pengaruh-pengaruh yang korup.

Sementara M. Dawam Rahardjo memberikan uraian mengenai pengertian korupsi yang mengatakan bahwa ia adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen.<sup>23</sup>

Dengan demikian, korupsi sesungguhnya mengilustrasikan satu keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberikan efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup, dan lain sejenisnya. Korupsi, dengan kata lain, adalah sebuah pengejawantahan dari kerja-kerja manusia yang tidak menghargai norma kehidupan agar di jagad kehidupan ini tidak tercipta sebuah

---

<sup>22</sup> Nanang T. Puspito at all (ed). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), hlm. 23.

<sup>23</sup> Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Ed). *Menyingkap Korupsi, Kkolusi dan Nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Aditya, 1999). Hlm. 19.

keindahan dan kebermaknaan dalam hidup. Korupsi menampilkan sisi gelap dari sebuah kehidupan yang tidak mengenakan sama sekali bagi sebuah keberlangsungan kehidupan. Korupsi, oleh sebab itu, berjaln kelindan dengan dunia yang serba abu-abu dan menjijikkan secara moral. Korupsi sangat dekat dengan segala hal yang sangat menyesatkan dan selanjutnya menimbulkan kegaduhan dan kegaduhan. Kondisi atas korupsi tersebut adalah menciptakan sebuah suasana dan keadaan yang tidak sehat alias sakit. Karena korupsi, segala sendi kehidupan kemudian bisa tercerai berai dengan demikian rupa.

Sedangkan Bank Dunia membatasi pengertian korupsi pada pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi.<sup>24</sup> Mahzar (2003) menyebutkan bahwa korupsi secara umum dipandang sebagai berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Ia selanjutnya menambahkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya korupsi ditekankan kepada penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Hal menarik dari Mahzar adalah ketika ia mengutip pendapat Philip (1997) yang mengatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku dan tindakan seorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berjaln kelindan dengan kepentingan kekerabatan. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) ketimbang merit. Kedua adalah korupsi yang berpusat kepada kepentingan publik karena faktor jabatan dan kekuasaannya sehingga ini selanjutnya dapat merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga adalah korupsi yang berpusat kepada pasar dengan pendekatan pilihan antara publik dan politik sehingga pilihannya selalu jatuh kepada politik kepentingan sektarian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> The World Bank. 2003. *Memerangi Korupsi di Indonesia*.

<sup>25</sup> Mansyur Semma. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 34-35. Asyumardi Azhar, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik; Makalah Seminar Internasional: Praktik-Praktik yang Baik dalam Memerangi Korupsi di Asia (Jakarta: Transparency International Indonesia)*, Tanggal 16-17 Desember. Hlm. 23.

Dengan demikian, korupsi sebenarnya menjadi sebuah penyakit yang sangat mematikan bagi kehidupan di republik ini. Definisi korupsi yang sangat luar biasa membunuh sebetulnya menjadi bagian dari sebuah gerakan yang berkehendak untuk membunuh perjalanan bangsa ke depan. Ada sebuah pandangan umum ketika ditarik dari pelbagai definisi korupsi di atas bahwa korupsi adalah perilaku dan tindakan yang mencerminkan kegagalan diri dalam mengemban mandat publik. Korupsi mengandaikan sebuah tindakan dan perilaku yang menghantam masa depan bangsa sebab segala sendi kehidupan kemudian dicabik-cabik dengan sangat hebatnya oleh mereka yang tidak lagi memikirkan nasib jutaan rakyat Indonesia yang berada dalam himpitan ekonomi antah berantah. Selanjutnya, ada sebuah benang merah yang bisa ditarik bersama bahwa korupsi sangat lekat dengan pembantaian amanat suci rakyat. Menarik apa yang disampaikan oleh Syamsudin Arif bahwa korupsi adalah tindakan curang untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara menyalahi, melangkahi dan mengakali aturan hukum dan undang-undang negara. Perbuatan yang masuk korupsi adalah memberi dan menerima suap, mencuri atau menggelapkan, melakukan pemalsuan, pemerasan dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan.<sup>26</sup> Sementara Robert Klitgard mengajukan rumus tentang korupsi yaitu  $Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability$  (C=D+M-A).

Sementara pengertian tindak pidana Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Pasal 2 adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (Satu milyar rupiah)”. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 3 diterangkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

---

<sup>26</sup> Syamsudin Arif. *Pendidikan Antikorupsi*. (Republika, 25 Maret 2013). Hlm. 4

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)".

Tentu, definisi yang begitu varian tentang korupsi adalah sebuah hal niscaya untuk selanjutnya dijalinkelembungkan dengan konteks fenomena korupsi yang sedang berlangsung di republik tercinta ini. Dengan kata lain, memang ada banyak jenis korupsi yang berlangsung di Indonesia dan ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

Korupsi Individual (Individual Corruption)	Korupsi Struktural	Perpaduan Kedua Jenis Korupsi antara Korupsi Individual dan Struktural yang biasanya "Institutional Corruption"	Korupsi Politis
Karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ( <i>need Corruption</i> )	Telah berakar ( <i>rooted</i> ) dalam sistem administrasi dan birokrasi	Sikap-sikap resistance (Sikap hampir seluruh elemen birokrasi menghalangi serta menghambat upaya pembenahan)	Sikap politisi dan aparat penegak hukum yang tidak memberikan reaksi atau tanggapan terhadap praktek KKN yang

<sup>27</sup> Luthfi J. Kurniawan. *Korupsi Bekerja dengan Pola Mafia*. Tanpa Tahun.

			diketahuinya ( <i>Affirmative</i> )
Karena ingin memaksimalkan harta kekayaan ( <i>greed corruption</i> ).	Melibatkan seluruh komponen Birokrasi	Inertia (Kehilangan motivasi total untuk memerangi korupsi)	Tindakan Pembiaran ( <i>ignoring</i> )
	Berlangsung lama	Melakukan legitimasi (Mentolelir praktek-praktek dan Pola Korupsi)	

Oleh sebab itu, adanya jenis korupsi tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa korupsi begitu telanjang bulat berada di depan mata. Pelbagai definisi di atas sebenarnya menjadi bagian dari pengantar agar mampu memberikan sebuah pemetaan diri terhadap dunia korupsi yang semakin antah berantah. Korupsi dengan demikian memiliki pelbagai wajah dan kebiasaan yang umumnya dipraktikkan banyak manusia berhati keji dan bandit saat ini. Oleh karenanya, menjadi penting apabila secara garis besar modus korupsi yang sering terjadi dan dilakukan oleh para koruptor di republik tercinta ini diruntutkan modusnya dalam rangka semakin memperjelas bagaimana arah kerja korupsi selama ini:

1. Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud "menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada. Pola korupsi ini secara sengaja menyembunyikan program yang ingin dijalankan namun

dengan semata menampilkan jumlah anggarannya. Biasanya, menitipkan anggaran dalam satu pos anggaran tertentu adalah sebuah hal niscaya.

2. Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam Peraturan. Anggaran dibuat dengan seolah menjadi bagian dari rentetan program yang lain dan umumnya dipaksa-paksakan sebangun dengan pos anggaran yang memang diperlukan agar kemudian tidak tampak kepalsuan programnya.
3. Mark up anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam UU. Pembengkakan anggaran dilakukan dalam rangka mencari keuntungan-keuntungan tambahan dan umumnya dilakukan ketika terjadi pembahasan anggaran baik itu sifatnya *ad hoc* atau tidak.
4. Pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya (duplikasi anggaran). Itulah yang disebut penganggaran ganda sehingga dari sinilah sebetulnya anggaran pun menjadi membesar karena faktor ada permintaan dan desakan.
5. Pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Anggaran semacam ini biasanya dinamakan dana gelondongan. Tanpa ada perincian yang pasti, jelas, dan terukur, secara tiba-tiba dana sudah disiapkan pada pos anggaran tertentu padahal urgensinya tidak ada sama sekali.
6. Menghilangkan pos anggaran. Dengan kata lain, pos anggaran tertentu dikaburkan untuk kemudian digarong tanpa sepengetahuan publik dan kondisi semacam ini sangat semakin mengkhawatirkan. Penghilangan pos anggaran bukan berarti benar-benar dihilangkan namun disembunyikan sehingga publik tidak tahu menahu sama sekali. Memang dibahas dalam rapat anggaran namun ketika itu disampaikan ke publik, pos anggaran tersebut kemudian ditutup-tutupi.
7. Pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi dalam bentuk uang. Hal semacam ini sangat

berbahaya dan membahayakan sebab ada potensi terjadinya biaya yang harus dikeluarkan. Analoginya adalah ketika dibentuk dalam asuransi lebih mahal, maka kalau dalam bentuk uang tunai kelihatan lebih besar namun dalam kenyataannya lebih murah dan kecil.

8. Bantuan berbentuk uang diubah barang dan mengurangi spesifikasinya. Dengan kata lain, mengganti spesifikasi dan kemudian berwujud barang terkadang pula menjadi bagian dari strategi licik untuk memudahkan potensi korupsi.
9. Mark down menurunkan target pendapatan. Pengertiannya adalah pendapatan dalam suatu periode tertentu seharusnya sudah bisa dicapai sesuai target, namun itu kemudian diturunkan dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dan sektoral.

Tentu, dengan membaca sejumlah pandangan tentang modus korupsi yang berlangsung tersebut akan membuka sebuah pandangan bahwa korupsi menjadi bagian dari penghancuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, dengan beberapa pandangan di atas, maka korupsi baik secara teoritis maupun praktik wajahnya sudah selama ini menampilkan bangsa yang jauh dari kehidupan yang beradab dan bermartabat. Bangsa yang kehilangan identitas terjadi karena tidak ada kebaikan yang dapat dirasakan bersama. Pelbagai bentuk dan definisi tentang korupsi sebenarnya memberikan satu wajah tunggal bahwa korupsi selama ini sudah mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ada beberapa catatan penting terkait korupsi itu sendiri ketika dipandang secara lebih filosofis:

1. Korupsi merupakan sebuah perilaku dan kerja yang menyimpang dari kepentingan kebaikan bersama. Korupsi berbasiskan kepada pandangan sektarianisme yang mengedepankan pemahaman sempit tentang sebuah amanat yang seharusnya perlu dipegang dengan sedemikian teguh. Korupsi berjaln kelindan dengan keinginan diri yang mengalahkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Menarik apa yang didendangkan oleh Machievelli bahwa seorang penguasa tidak perlu memerhatikan pertimbangan-pertimbangan moral, namun penguasa bisa saja bertindak sangat moralistik

dengan menunjukkan kemurahan hati, sikap saleh, dan lain sejenisnya ketika itu semua kemudian dapat digunakan untuk memuluskan kepentingannya. Kalau keadaan menuntut dalam rangka mempertahankan kekuasaannya, sang penguasa kemudian dapat saja melanggar segala bentuk janji yang pernah diucapkannya. Bahkan, di dalam perang pun, seorang penguasa dianjurkan bersikap realistis dengan memihak yang paling kuat agar dapat memperoleh bagian dalam hasil rampasan perang.<sup>28</sup>

2. Korupsi juga menggambarkan seseorang yang sudah mengalami ketidaksehatan berpikir sehingga kondisi ini mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa ada yang salah dalam tindak tanduk manusia. Kebiasaan mereka yang suka melakukan penyimpangan dan kemudian merugikan kepentingan publik adalah bagian dari rangkaian kehidupan manusia yang kotor secara moral. Sekali lagi harus kita katakan secara bersama bahwa perilaku manusia yang bejat adalah potret yang benar-benar kacau balau.
3. Karena korupsi merupakan kejahatan maha luar biasa dan menghadirkan kehidupan berbangsa yang hancur, maka perilaku dan tindakan ini sesungguhnya merupakan sebuah gambaran tentang kondisi manusia yang sudah rusak dan memilukan. Manusia yang melakukan korupsi atau bersifat koruptif sebetulnya dapat dinamakan sebagai pribadi yang sudah kehilangan jati diri yang baik dan mulia. Manusia yang koruptif sebenarnya sudah mencerminkan kebiasaan hidup dan kehidupan yang lemah dalam konteks pengembangan dirinya agar menjadi baik dan bermakna bagi semua. Manusia yang koruptif dapat digolongkan sebagai pribadi yang tak mampu menjaga dirinya dari godaan-godaan yang anarkis dan destruktif. Manusia yang koruptif sebenarnya menjadi bagian dari kelompok penghancur kehidupan masa depan.

Dengan demikian, korupsi sekali lagi harus dikatakan sebagai tindakan dan perilaku yang menghancurkan atau destruktif. Korupsi sudah

---

<sup>28</sup> Budi Hardiman. F. 2007. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Cet. II. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 19.

merencanakan cara berpikir yang sehat sebab otak dan pikiran telah berada dalam suasana yang tidak kondusif. Tatkala dihadapkan dalam sesuatu hal dan ini berbuah kepada uang, otak sudah menjadi gelap gulita dalam berpikir, apakah uang itu adalah hak publik atau bukan. Kondisi inilah yang sesungguhnya disebut makna korupsi baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

## B. Penyebab Korupsi

Berbicara tentang penyebab korupsi, maka tentu akan banyak hal yang akan mendapat ruang pembahasan. Pada prinsipnya, akar segala bentuk terjadinya korupsi adalah adanya sebab. Analoginya dapat berupa, tidak akan ada api, tanpa adanya asap. Ketika hal ini kemudian dikorelasikan dengan penyebab korupsi, maka secara umum ada satu benang merah bahwa sikap manusia yang serakah dan terlalu silaunya terhadap harta serta hal-hal material akan melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hak publik serta kemudian dapat muncul penyelewengan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Mengutip pendapat Yamamah, perilaku masyarakat yang sangat materialistik dan konsumtif serta masih kuat-cintanya manusia terhadap hal-hal kebendaan akan dengan mudah terjadinya permainan uang dan korupsi.<sup>29</sup> Dengan demikian, kebiasaan masyarakat yang sangat duniawi memicu timbulnya korupsi. Kuatnya masyarakat terhadap pendewasaan kebendaan selalu mengakibatkan sesuatu hal yang sangat buruk. Korupsi dan dunia kebendaan selanjutnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Korupsi muncul karena kuatnya manusia terhadap benda dan cintanya terhadap benda. Manusia sangat mencintai kebendaan sehingga apapun selanjutnya harus dilakukan selama hal-hal kebendaan bisa dicapai dengan sedemikian rupa. Berbicara korupsi tentu selalu menegaskan bahwa masyarakat kita selalu terjebak kepada kepentingan pragmatis *an sich* yang selalu mengukur segala hal dalam konteks kebendaan. Berbicara tentang korupsi mengandaikan bahwa banyak di antara masyarakat selalu

---

<sup>29</sup> Ansari Yamamah (2009) diunduh dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi <http://dellimanusantara.com/index.php>.

mengatakan bahwa hidup tidak lepas dari hal kebendaan sehingga ketika hal-hal kebendaan tidak menjadi bagian dan kehidupan manusia, mereka selanjutnya menjadi gelisah dan susah. Keadaan gelisah dan susah beginilah memicu perilaku dan tindakan korupsi. Sikap manusia yang selalu merasa kurang dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya kebendaan menyisakan sebuah pandangan umum bahwa masyarakat selalu mengindentikkan kehidupannya dengan kebendaan. Masyarakat selalu menyamakan segala bentuk kehidupannya dari sisi kebendaan. Tidak ada hal kebendaan, mereka selanjutnya menjadi mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pola-pola hidup dengan pendekatan ini selanjutnya disebut materialisme. Segalanya berada dalam konteks materi dan begitu seterusnya.

Sementara Akuntan Nikaragua Francisco Ramirez Torres<sup>30</sup> mengatakan bahwa korupsi muncul karena ada godaan. Semakin besar godaan yang muncul, maka semakin besar keinginan untuk melakukan korupsi. Memang diakui maupun tidak, godaan selalu menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Godaan memicu dan menjadi pencetus dari perilaku dan tindakan manusia yang menghalalkan segala cara. Godaan baik yang muncul dari eksternal maupun internal merupakan persoalan tersendiri.

Berikut di bawah ini merupakan faktor-faktor yang memicu tindakan korupsi:

1) Keluarga

Umumnya, keluarga menjadi ruang dan tempat baik bagi pembangunan kehidupan yang damai dan menyejukkan. Berapapun pendapatan suami atau kepala rumah tangga per bulannya perlu disyukuri secara ikhlas dan terbuka. Kendatipun suami atau kepala rumah tangga menjadi pejabat tinggi baik di tingkat daerah, provinsi maupun di Jakarta, hidup sederhana adalah hal utama. Hidup sederhana dengan menjalankan kehidupan sederhana dan tidak berlebihan dalam melakoni hidup sesungguhnya akan menjadikan

---

<sup>30</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Penerj: Masri Maris. Edisi. Ke. 3. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Hlm. 37.

kehidupan rumah tangga menjadi damai. Persoalannya adalah kerap kali pemicu dan pencetus korupsi bisa datang dari keluarga. Karena tuntutan istri atau mungkin keinginan pribadi berlebihan, melampaui batas hidup kewajaran, bisa saja tindakan korupsi akan menjadi sebuah kenyataan. Menjadikan jabatan yang didudukinya untuk memuluskan kepentingan pribadi serta golongan kemudian ditunaikan dengan sedemikian rupa. Tidak peduli lagi, apakah tindakannya itu kemudian sudah melanggar hak hajat hidup orang banyak atukah tidak. Tidak peduli apakah harta yang didapatnya berasal dari penyelewengan wewenang sehingga ini selanjutnya merampok uang rakyat. Sekali lagi karena keluarga bukan menjadi benteng dari tindakan korupsi namun justru menjadi bagian dari pencetus korupsi, maka keluarga sesungguhnya sudah ikut bertanggung jawab terhadap tindakan suami atau kepala rumah tangga. Oleh karenanya, keluarga berada dalam dua sisi baik positif maupun negatif. Dari sisi negatifnya adalah keluarga dapat membawa tindakan korupsi ketika hidup sederhana sudah tidak lagi menjadi landasan gerak dalam kehidupan.

## 2) Pendidikan

Berbicara korupsi tidak akan lepas dari sesuatu hal yang bernama pendidikan. Umumnya mengapa banyak di antara para pejabat sangat gandrung terhadap korupsi walaupun sudah berpendidikan tinggi, ini kemudian berjaln-kelindan dengan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Biasanya pendidikan dimaknai sebagai pembangunan kesadaran profetis, ini tidak menjadi penggerak utama. Umumnya, pendidikan harus dan seharusnya dipahami sebagai penggerak perubahan berpikir masyarakat dari sempit menuju terbuka, ini juga tidak menjadi realitas sama sekali. Umumnya, pendidikan perlu dikerangkakan sebagai langkah pergerakan pemahaman menjadi manusia seutuhnya dimana manusia itu harus berbuat yang terbaik tidak hanya untuk dirinya *an sich* namun juga untuk lingkungannya, itu pun juga tidak dikerjakan sama sekali. Seharusnya pendidikan

dapat merubah serta menggeser cara-cara berpikir lama yang selalu menyamakan pendidikan dengan pekerjaan menuju pada pendidikan dengan kesadaran kritis transformatif, itu pun juga belum disentuh sama sekali dalam konteks implimentasinya. Dalam konteks yang lebih luas, ternyata banyak dan kebanyakan pejabat di republik ini selalu dan kerap mengidentikkan pendidikan sebagai jalan meraih kekuasaan. Padahal dalam konteks yang lebih luas serta universal, pendidikan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, rendahnya pemahaman kritis terhadap pendidikan sebagai langkah memanusiakan manusia selanjutnya melahirkan manusia-manusia kerdil yang berpikiran sempit. Saat mereka selanjutnya dihadapkan dengan apakah harus bekerja untuk bangsa atau bukan, mereka justru memilih mencari keuntungan sektoral.

3) Sikap kepada pekerjaan

Sikap kepada pekerjaan yang berlebihan dan selalu berpandangan bahwa sesuatu yang dikerjakan harus melahirkan kepentingan ekonomi, ini selanjutnya akan memicu terjadinya tindakan korupsi. Biasanya, ketika akan melakukan pekerjaan dan pikiran pertama yang dipasang adalah berapa uang yang didapat dari pekerjaan tersebut, ini kemudian akan lebih banyak menggunakan hitung-hitungan ekonomi atau untung dan rugi. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan kalkulasi ekonomi sedemikian dipastikan tidak akan membawa kemasalahatan bersama. Justru yang terjadi adalah bagaimana setiap pekerjaannya ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Pengabdianya sudah hilang sebab mereka telah silau dan disilaukan dengan kepentingan ekonomi.

4) Dunia usaha

Dunia usaha umumnya juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Pejabat negara atau pejabat di daerah yang masuk dalam lingkaran dunia usaha biasanya akan memanfaatkan jabatannya dalam rangka memuluskan dunia usahanya. Sebut saja, ketika dalam hal tertentu pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan dunia usaha,

maka usaha milik pejabat bersangkutan akan lebih diprioritaskan. Memang terkesan tidak korupsi, namun kalau dicermati secara lebih kritis dan mendalam, apa yang dilakukan pejabat tersebut adalah mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan ini sudah disebut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan dirinya saja.

5) Negara

Negara yang berada dalam kondisi serba permisif sebab pemimpinnya tidak memiliki ketegasan dalam memimpin akan melahirkan kondisi negara yang kacau balau. Pemerintahan yang tidak dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat akan melahirkan para pejabat yang koruptif dan manipulatif. Oleh karenanya, kondisi negara dengan pemimpin yang lemah akan membuat tindakan korupsi tumbuh subur sebab sudah tidak ada lagi pengawasan dan penindakan yang tegas bagi pelanggar hukum.

Selanjutnya menurut Ilham Gunawan dan Theodore M. Smith, ada 6 faktor yang memicu munculnya korupsi, yakni:

1) Faktor politik

Ini terkait dengan kemauan dan etika politik rezim dan politik yang tidak berkehendak sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi. Komitmen rezim yang masih sangat rendah dalam pemberantasan korupsi kemudian semakin menambah kenyataan tak terbantahkan bahwa politik kotor akan mengancam negara. Politik kotor yang selalu sangat lekat dengan tindakan menghalalkan segala cara (permisivisme) melahirkan praktik-praktik berpolitik yang tidak sehat dan kondusif. Praktik berpolitik tidak sehat tersebut tentunya mengundang banyak persoalan baru bagi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi. Justru karena politik kotor, ini memicu dan menjadi pencetus dalam tindakan korupsi baik yang bertaraf rendah, menengah, maupun besar. Praktik berpolitik kotor, dengan demikian, merupakan kerja-kerja rezim yang sudah menjauhkan perjalanan republik ini kepada keadaban publik. Tentu, bagaimana akan melahirkan bangsa yang beradab, sementara praktik-praktik

politik kotor sudah menggurita dimana-mana. Setiap pelaku politik baik di lapis atas maupun bawah telah memberikan sumbangan buruk bagi bangsa yang berada dalam titik kehancuran dan hancur.

2) Faktor yuridis

Masih lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum yang tegas kepada pelanggar hukum, termasuk komitmen dan integritas aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, masih lemahnya supremasi hukum untuk menindak para pelanggar hukum sangat jelas melemahkan pemberantasan korupsi. Hukum yang seharusnya dipahami sebagai penggerak pemberantasan korupsi justru sudah mengalami masa melemah. Hukum yang sedemikian sudah bertekuk lutut di depan para pelanggar hukum. Memang diakui maupun tidak, tidak adanya supremasi hukum akan melahirkan absennya gerakan pemberantasan korupsi yang masif. Tidak adanya kedaulatan hukum, maka kondisi ini akan membuat tindakan korupsi akan kian merajalela.

3) Faktor budaya

Masih berkembangnya budaya feodalistik dan sikap ingin dilayani serta hidup mewah. Itulah realitas yang selama ini menjadi potret para pejabat di republik ini. Seharusnya menjadi pejabat adalah bertugas melayani rakyat, mereka justru ingin dilayani dan disembah dengan sedemikian rupa. Seharusnya, menjadi pamong raja adalah untuk rakyat, mereka justru merubah dirinya menjadi pangreh raja. Seharusnya, mereka bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat, justru mereka kemudian sudah mengabaikan hajat hidup orang banyak sehingga yang kerap mereka lakukan adalah menyakiti rakyatnya. Mereka lebih suka menindih rakyatnya. Jabatan dan kekuasaan adalah untuk diri dan golongannya, bukan diamanahkan untuk kepentingan bersama.

4) Faktor struktur administrasi pemerintah

Lemahnya pengawasan yang membuka peluang untuk berkorupsi. Administrasi pemerintahan yang masih dilakukan secara konvensional menjadi salah satu hal yang dapat melonggarkan

tindakan korupsi. Administrasi yang masih dilakukan secara apa adanya menjadi pemicu dan pencetus dalam kemunculan tindakan korupsi. Ini kemudian ditambah dengan pengawasan dalam pengadministrasian yang tidak rapi, ketat, dan lain sejenisnya.

- 5) Faktor insentif ekonomi yang tidak berkembang  
Insentif yang rendah dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan menjadi pemicu sebab dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Umumnya, sebuah beban pekerjaan akan berkorelasi dengan insentif yang diterima. Ketika kondisinya terbalik, yakni antara pendapatan dan beban pekerjaan tidak seimbang, maka yang terjadi adalah potensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindakan korupsi akan berpotensi terjadi.
- 6) Faktor historis  
Adanya warisan utama kolonialisme, yakni mental koruptif dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan (pangreh raja) yang sudah terjadi saat Orde Baru berlangsung hingga pasca reformasi. Sejarah perjalanan bangsa yang masih kuat warisan sejarah kolonialisme serta mental koruptif umumnya akan terus melekat dengan sedemikian erat. Ketika ini sudah menjadi *imprint* dalam benak manusia Indonesia saat ini yang sedang menjabat, maka perilaku dan tindakan yang kurang lebih sama dengan para pendahulunya akan kembali muncul walaupun dengan modus dan strategi yang berbeda. Secara prinsipil, itu menjadi penimbul bagi tindakan-tindakan korupsi yang baru.<sup>31</sup>

Oleh karenanya, pada abad ke-14, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa. Nafsu berkuasa yang sangat tinggi tentu akan menyebabkan perilaku dan tindakan yang menyimpang. Biasanya amanat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sangat tinggi; kondisi ini sudah tidak menjadi sebuah realitas. Amanat kemudian harus

---

<sup>31</sup> Ilham Gunawan. *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. (Bandung: Angkasa, 1993). Hlm. 13-27. Lihat juga Theodore M. Smith. "Korupsi, Tradisi, dan Perubahan di Indonesia", dalam Mochtar dan James C. Scott (eds). *Korupsi Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993). Hlm. 51-64.

digadaikan atas nama hedonisme, yang lebih dekat dengan gemerlapnya dunia dan kebendaan. Hedonisme yang menawarkan kebahagiaan dan kesenangan semu sudah membius manusia untuk berperilaku dan bertindak yang salah sehingga ini menyebabkan kerusakan bagi kepentingan bersama. Tidak ada lagi yang bernama komitmen teguh untuk kepentingan bersama. Tidak ada lagi yang bernama idealisme untuk bangsa dan negara. Semuanya sudah disibukkan dan sibuk dengan kepentingan ego sektoral yang tentu tidak memiliki dampak nyata serta konkret bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>32</sup>

Bibit Samad Rianto<sup>33</sup> kemudian menyebutkan bahwa tindakan korupsi memiliki akar-akarnya sendiri. Akar korupsi tentu terkait dengan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, perbuatan korupsi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Niat melakukan korupsi (desire to act)

Unsur ini berada dalam diri seseorang. Pembentukan diri seseorang apakah akan menjadi jahat atau baik tentunya dilalui dari proses hidup sejak kecil. Oleh karenanya, apakah seseorang akan berbuat jahat tentunya juga dibentuk oleh lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh sangat tinggi bagi pembentukan diri manusia. Niat apakah akan menjadi jahat atau tidak pun juga dibentuk dari lingkungan.

2) Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act)

Kemampuan untuk berbuat korupsi sebetulnya dapat dimaknai ketika seseorang memiliki kemampuan. Kemampuan itu sendiri selanjutnya dapat dialihkan kepada orang lain yang memang memiliki kemampuan dan atau keahlian dalam melakukan korupsi, sebut saja dengan melakukan penyewaan seseorang, pemaksaan seseorang untuk melakukan tindak korupsi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang apabila berhasil melakukan tindak korupsi.

---

<sup>32</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). Hlm. 428-429.

<sup>33</sup> Bibit Samad Rianto dan Nurlis E. Meuko. *Koruptor Go to Hell: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2009). Hlm. 14-20.

3) Kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption)

Ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Karena wewenang dan kekuasaan ada, peluang untuk melakukan tindak korupsi akan lebih mudah dilakukan. Oleh sebab itu, peluang akan semakin menjadi besar terjadi ketika (1) ketentuan yang diberlakukan sangat longgar, (2) diwakili oleh pejabat yang koruptif, (3) ada sesuatu yang akan dikorupsi, (4) orang-orang yang berhubungan dengan kekuasaan bisa menerima kondisi koruptif sebagai prasyarat untuk berhubungan dengan kekuasaan tersebut, dan (5) rendahnya kualitas pengawasan internal dan eksternal (social control).

4) Adanya sasaran yang dapat dikorupsi (suitable target)

Unsur ini merupakan sesuatu hal yang tidak dapat disubstitusikan, tapi dapat dilakukan sendiri oleh yang memiliki kewenangan atau kekuasaan. Oleh karenanya, target yang akan dikorupsi tentunya berhubungan dengan kepentingan dan tujuan pemilik kepentingan, wewenang, dan kekuasaan.

Budaya feodalisme atau hubungan patron-klien juga menjadi akar korupsi.<sup>34</sup> Feodalisme selanjutnya dapat dirumuskan sebagai bentuk organisasi sosial yang diadakan sedemikian rupa sehingga kekuatan politis, ekonomis, dan militer sebagian besar dipegang secara turun temurun oleh kaum bangsawan.<sup>35</sup> Ketika ini dihubungkan dengan tindak korupsi, maka siapa yang punya kuasa, maka dialah yang akan mengatur segala aktivitas. Semua orang yang berada dalam kuasa dan kekuasaannya kemudian harus menyembah secara *taken for granted* terhadap sang pemilik penguasa. Segala bentuk pelayanan kemudian diberikan kepada sang penguasa. Apakah kemudian harus melakukan korupsi untuk kepentingan penguasa, itu pun sudah tidak menjadi soal. Oleh sebab itu, konteks feodalisme dalam tindakan korupsi adalah mengandaikan bahwa penguasa yang

---

<sup>34</sup> Maria Hartiningsih (Ed). *Korupsi yang Memiskinkan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011). Hlm. 57.

<sup>35</sup> Robert R. Boehlke. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: dari Plato sampai IG. Loyola*. Cet Ke.8. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006). Hlm. 208.

menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sudah dibenarkan. Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki sang penguasa dibolehkan untuk digunakan atas nama kepentingannya. Siapapun yang berada di sekelilingnya kemudian tidak boleh melakukan pelanggaran atas tindak korupsi yang dilakukan sang penguasa.

Abdur Rafi<sup>36</sup> dengan mengutip pendapat Boni Hargens mengatakan bahwa ada tiga wilayah penting yang menjadi locus tumbuhnya akar korupsi, yakni wilayah individu, wilayah sistem, dan irisan kedua. Dalam konteks individu, praktik korupsi terjadi karena individu tidak mempunyai nilai-nilai moral yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Situasi terkait peluang korupsi tidak akan pernah menjadi kenyataan ketika individu sudah memiliki nilai-nilai moral yang terinternalisasi dalam kehidupannya. Dalam konteks sistem, korupsi juga terjadi karena memang sistem yang dibangun sudah buruk dan koruptif. Dalam konteks yang berada dalam dua irisan, maka baik individu maupun sistem memang berada dalam suasana yang tidak menyetakan. Peluang berkorupsi ada; individu juga sudah kehilangan moralitas, dan sistem juga mendukung atas terjadinya tindakan korupsi, maka di sinilah sebuah tindakan korupsi akan menjadi sebuah kenyataan. Dengan demikian, praktik korupsi terjadi karena adanya motif pelaku yang biasanya berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya (materialisme).
- 2) Keinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya (konsumerisme).
- 3) Takut terhadap kemiskinan.
- 4) Ingin cepat kaya dalam waktu cepat.

Motif itu timbul karena individu atau pelaku tidak bisa mengendalikan kondisi jiwanya yang meledak-ledak sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Mengikuti nafsu keserakahan (tamak) terhadap harta.
- 2) Mendewakan kehidupan dunia (hedonis).
- 3) Panjang angan-angan.

---

<sup>36</sup> Abdu Fida' Abdur Rafi'. *Terapi Penyakit Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Republika, 2006). Hlm. xxi-xxviii.

- 4) Lalai dari pengawasan Sang Pencipta.
- 5) Hilangnya sifat jujur dan malu kepada pelakunya.

Sementara itu Mochtar Lubis mengatakan bahwa yang menjadi akar korupsi adalah adanya kehadiran pola birokrasi patrimonial dimana muncul satu anggapan bahwa nilai solidaritas utama harus dilakukan kepada sanak saudara dahulu, baru kemudian kepada teman-teman, masyarakat, dan suku. Ketika ini dihubungkan dalam konteks negara, maka polanya yang terbangun juga kurang lebih sama. Negara yang menggunakan birokrasi patrimonial tentu akan memberikan tugas-tugas negara kepada sekelompok orang yang dianggap memiliki kedekatan tertentu sehingga bisa saling melindungi. Dengan kata lain, bagaimana semua kepentingan bersama yang berpusat kepada kekuasaan dan mapannya sebuah kekuasaan tetap dapat berjalan dengan sedemikian rupa.<sup>37</sup>

Pendekatan yang dibangun dalam rangka menjalankan dan mempertahankan kekuasaan adalah dengan cara membagi kursi agar semakin bisa menghabiskan uang negara. Oleh karenanya, tindakan korupsi akibat kongkalingkong antara pemilik kekuasaan dengan segala turunan di bawahnya akan semakin mempermudah jalannya pelaksanaan korupsi. Budaya patrimonialisme bermakna bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh orang-orang terdekat. Pertimbangan mengapa harus terdekat adalah dengan bisa dikerjakan dalam konteks kekeluargaan, maka keuntungan dapat dibagi secara kekeluargaan. Tentunya, kondisi ini mengakibatkan sebuah potensi tindakan korupsi sebab tidak ada yang melakukan pengawasan dan tidak ada yang memberikan masukan ketika ada kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tidak bisa berharap banyak terhadap sebuah pekerjaan yang diberikan kepada sekelompok orang yang memiliki toleransi sangat tinggi terhadap kelompoknya. Harapan besar agar pekerjaan bisa dikerjakan secara tepat sasaran sudah ibarat menegakkan basah. Justru yang terjadi adalah korupsi akan menggila dan semakin menggila.

---

<sup>37</sup> Mansyur Semma. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 198-199.

### C. Mengapa Perlu Pendidikan Antikorupsi

Dalam tajuk rencana harian Sinar Harapan disebutkan bahwa kebanyakan dan banyak koruptor adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Seharusnya mereka menjadi malu untuk melakukan korupsi, justru secara terang-terangan melakukan tindakan korupsi. Data koruptor terbaru adalah Bupati Bogor, Rachmat Yasin, sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mantan Kepala BPK, Hadi Poernomo, yang tersandung kasus pajak Bank Central Asia (BCA) senilai Rp 5,7 triliun, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan banyak lain. Oleh karenanya, sudah seharusnya korupsi menjadi musuh bersama. Kita kemudian harus belajar dari pemerintah Tiongkok yang sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Hukuman mati kemudian menjadi salah satu efek jera, yang setidaknya dapat diterapkan di republik tercinta ini.<sup>38</sup>

Yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan bangsa ini akan terus menerus berada dalam kondisi yang serba sangat suram dan selanjutnya diperkosa oleh para perampok yang sangat jelas menindas kepentingan publik? Memang sekali lagi harus dikatakan bahwa mereka yang selama ini sudah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin publik sudah tidak bisa diharapkan kiprahnya dalam melayani hajat hidup orang banyak ke depannya. Mereka kemudian tidak tepat untuk menjadi contoh dan suri tauladan bagi para generasi bangsa ke depan. Jalan satu-satunya untuk menindak tegas para perampok adalah dengan menghukum seberat-beratnya; menghukum mati atau sanksi lainnya yang dapat membuat mereka terkaget-kaget yang kemudian disebut *shock therapy*. Persoalannya adalah kendatipun sudah mendapat hukuman yang berat, ternyata korupsi terus menerus berlangsung dengan sedemikian rupa. Penegakan hukum yang dilakukan pun terkadang tidak ditunaikan dengan sedemikian adil. Menghukum para perampok seolah kerap kali menjadi tumpul.

Kita semua sangat tidak berharap atau menghendaki agar para pemimpin masa depan tidak seperti para pemimpin saat ini. Plato dalam

---

<sup>38</sup> <http://sinarharapan.co/news/read/140510131/Korupsi-sebagai-Musuh-Bersama>, diakses tanggal 13 Mei 2014.

bukunya “Republik” mengatakan bahwa pemimpin ideal adalah seseorang yang mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati dan melebihi cintanya kepada keluarga dan dirinya sendiri. Pemimpin yang mampu berjuang untuk kepentingan hajat hidup orang banyak adalah ketika mampu mengalahkan libido pribadi dan golongan. Sementara pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya adalah ketika ia berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok ditunaikan dengan sedemikian rupa. Tentu, generasi masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan harus diselamatkan. Menanamkan semangat nasionalisme kepada para peserta didik agar mampu memiliki pandangan sangat profetis kritis bagi hajat hidup orang banyak merupakan sebuah hal niscaya. Yang lebih penting dari itu adalah generasi pemimpin ke depan (yang kini sedang mengenyam pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi) perlu dibekali dengan pendidikan anti-korupsi.

Pendidikan anti-korupsi yang dimaksud adalah “ternyata korupsi sangat merugikan kepentingan publik” perlu disampaikan kepada para peserta didik. Pembangunan mentalitas diri kepada peserta didik dalam bentuk semangat anti-korupsi merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Memberikan pelatihan-pelatihan anti-korupsi untuk menjauhkan peserta didik dari kebiasaan-kebiasaan hidup koruptif pun perlu digencarkan gerakannya. Membuat buku khusus yang berbicara banyak tentang pendidikan anti-korupsi dan buku tersebut diperkaya dengan nama para pejabat (bila perlu ada fotonya) yang tersandung korupsi dengan segala konsekwensi hukum serta moralnya kemudian menjadi penting untuk dilakukan. Apa pun muatan dalam pendidikan anti-korupsi selama itu kemudian bisa membangun kebiasaan hidup peserta didik untuk berperilaku dan bertindak bersih sangat dibutuhkan implimentasinya. Barangkali kita semua masih ingat kepada Kantin Kejujuran yang sempat menggaung secara nasional dan saat ini sudah mulai meredup ditelan zaman. Kantin Kejujuran sesungguhnya adalah sebuah langkah yang sangat efektif untuk membelajarkan peserta didik untuk hidup jujur, tidak menjadi

orang yang berbohong. Itu kemudian juga mendukung implimentasi pendidikan anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kini yang perlu dipertegas bersama adalah apakah semua muatan substansial yang sangat mendukung pendidikan anti-korupsi sudah dimasukkan dalam kurikulum dengan segala turunannya? Apa pun jawabannya, pekerjaan berat bagi mereka yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap pendidikan dan masa depan bangsa adalah bekerja sebaik mungkin untuk menjadikan pendidikan sebagai landasan gerakan progresif untuk melahirkan manusia-manusia yang tidak kolusif dan koruptif. Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiasi manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Dengan semangat homonisasi dan humanisasi yang terinalisasi, manusia selanjutnya diharapkan mampu dipimpin dengan cara sedemikian rupa agar ia bisa berdiri, bergerak, bersikap, dan bertindak sebagai manusia seutuhnya. Ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi.

Tentu, pendidikan anti-korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari semangat homonisasi dan humanisasi adalah menghendaki agar para peserta didik bisa menjadi manusia-manusia yang bebas dari perilaku koruptif. Ketika ia secara berkelanjutan terus menerus ditempa dengan pembangunan dan pembentukan mentalitas diri anti-korupsi, ia selanjutnya akan mampu menjadi sosok-sosok yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diembannya. Pendidikan anti-korupsi, dengan demikian, melakukan inseminasi tanggung jawab diri, komitmen diri, dan kemauan sangat kuat dalam kehidupan peserta didik untuk berpegang teguh terhadap suara hati nurani paling dalam bahwa ia sedang memegang amanah. Memegang amanah adalah sebuah janji yang tidak boleh dipermainkan. Amanah kemudian tidak boleh diselewengkan untuk tujuan-tujuan sektoral yang lebih menguntungkan sepihak dan mencederai ranah publik.

Para pengajar yang bersentuhan langsung dengan para peserta didik selanjutnya perlu memiliki pendekatan-pendekatan khusus yang bisa mengefektifkan proses pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran. Tentu, figur para pengajar yang memiliki jiwa bersih pun juga perlu ditunjukkan

sebab mereka adalah pemandu bagi kehidupan peserta didik. Jangan sampai terjadi preseden buruk “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” saat pendidikan anti-korupsi digelar. Pengertiannya adalah saat guru mengajarkan kejujuran sebagai salah satu muatan dari pendidikan anti-korupsi, ternyata guru itu sendiri tidak pernah berkata serta bertindak jujur kepada anak didiknya. Ini adalah buah simalakama bagi implimentasi pendidikan anti-korupsi. Oleh karenanya, mari kita lawan dan berantas korupsi mulai dari sesuatu hal yang bisa dikerjakan walaupun itu bersifat kecil dan sepele dalam kehidupan kita masing-masing. Kurikulum 2013 yang dilaksanakan tahun ini pun diharapkan mampu memasukkan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian terpenting dalam rangka memberantas korupsi. Dengan harapan agar para generasi pemimpin bangsa mendatang kemudian menjadi pemuda bersih dari kotoran-kotoran koruptif.

Atas dasar pandangan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut mengapa sangat pentingnya pendidikan antikorupsi:

- 1) Realitas mengenai kian banyaknya uang negara yang dihabisi dan dirampok banyak elit negeri sudah seharusnya menjadi kaca benggala bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja agar terus merajalela. Tindakan korupsi sangat jelas menyengsarakan kehidupan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan korupsi sudah menjauhkan implimentasi kebijakan hajat hidup orang banyak sebab uang negara telah dihisab habis oleh oleh vampir-vampir antikemanusiaan. Tentunya, pendidikan antikorupsi yang menanamkan kesadaran tentang semangat kebangsaan sudah seharusnya dibangun dengan sedemikian konkret dan praksis. Pendidikan antikorupsi yang melembagakan semangat kebangsaan secara kolektif menjadi obat jitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.
- 2) Kian miskinnya manusia-manusia jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat rakyat juga kian menambah deretan persoalan bagi kehidupan berbangsa. Manusia-manusia yang

kering semangat nasionalisme justru lebih sibuk membangun kerajaan sendiri di republik ini untuk mengejar kepentingannya *an sich*. Perilaku buruk dan negatif semacam ini sangat jelas akan menghancurkan bangsa ini secara perlahan namun pasti. Memang saat ini kehancuran bangsa belum terasa dan dirasakan saat ini, namun ke depan kehancuran berbangsa akan menjadi realitas ketika semakin banyak manusia yang serakah dan rakus terhadap kekuasaan. Mereka hanya menjadikan kekuasaan dan kursi untuk meluluhlantakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Tentunya, fungsi pendidikan antikorupsi di sini dimaknai untuk membangun kesadaran kritis tentang pentingnya berbuat demi bersama di atas segala-galanya.

- 3) Sumber daya alam di negeri ini semakin kering kerontang. Sumber daya alam sudah dikeruk habis oleh mereka yang berkepentingan baik secara personal maupun sektoral. Mereka sudah tidak lagi memikirkan nasib anak cucu bangsa di masa depan. Apakah nasib anak cucu di masa depan untuk 50 tahun ke depan akan hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan, para perampok elit tersebut sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat. Atas nama pragmatisme politik kerdil dan sempit, mereka kemudian rela menggadaikan bangsanya. Apakah bangsanya akan kian terjerembab dalam lingkaran kehancuran antah berantah, mereka tidak memedulikan sama sekali. Ini menjadi sebuah kondisi ironis. Keberpihakan untuk bersama sudah menghilang, seiring kuatnya kepentingan golonganisme dan lain sejenisnya. Kepentingan bangsa sudah menjadi terkubur dengan sedemikian mendalam, seiring dengan kian kuatnya politik golonganisme untuk mencapai keuntungan sektoral. Tentunya, atas keadaan tersebut, peran pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi para anak didik menjadi sangat penting. Pendidikan antikorupsi dapat

dimaknai sebagai penggugah diri untuk mau memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan.

- 4) Kebudayaan kita saat ini untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan wibawa bangsa sudah mulai memudar. Sikap menghargai hak setiap individu untuk bisa hidup sama dengan yang lain juga kian menghilang. Tidak ada lagi tindakan-tindakan positif yang bisa menyatukan kebersamaan di tengah perbedaan. Dengan kata lain, semua manusia dari pelbagai elemen sosial sudah berbicara tentang kepentingan masing-masing. Tidak heran apabila keadaban bangsa sudah tercabik-cabik. Kondisi ini kemudian berimbas kepada ketidakharmonisan antar golongan. Akhirnya, yang terjadi adalah saling menghantam satu sama lain. Oleh karenanya, menjadi penting apabila pendidikan antikorupsi perlu dihidupkan. Pendidikan antikorupsi, diakui maupun tidak, tidak sebatas berjalinkelindan dengan perampokan uang negara. Lebih dari itu adalah terkait dengan nilai-nilai keadaban. Kejujuran selalu dijunjung tinggi. Ketika diberikan amanat, kemudian dijalankan dengan sedemikian konkret dan praksis. Dalam konteks ini, melawan tindakan korupsi yang tidak semata berbicara tentang uang negara, namun juga tentang moralitas harus dilaksanakan dengan sedemikian rupa. Korupsi moralitas menjadi kejahatan yang sangat luar biasa berat. Dengan melakukan korupsi moralitas, ini sangat jelas sudah menghancurkan idealisme dalam rangka membangun bangsa. Tatkala idealisme sudah memudar dan menghilang, maka segala bentuk perilaku, sikap, dan tindakan para elit akan menjadi koruptif dan manipulatif. Saat mendapatkan tugas dan mandat, maka tugas dan mandat tersebut kemudian disalahgunakan dengan sedemikian rupa. Ketika telah menjadi bagian dari ruang kekuasaan, maka tugas mulia kemudian dikotori oleh kerja-kerja yang nyinyir dan memalukan. Tak heran, apabila kebiasaan-kebiasaan buruk ini selanjutnya membutuhkan mereka dalam melayani hajat hidup

orang banyak. Imbas utama adalah uang negara kemudian dikorupsi. Uang negara selanjutnya ditilep untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Dari sekian pandangan di atas tersebut, maka memang ada satu benang merah bahwa pendidikan antikorupsi merupakan sebuah hal niscaya yang perlu ditanamkan kepada para peserta didik. Pendidikan antikorupsi menanamkan moralitas, nilai-nilai tentang kejujuran dan tanggung jawab, semangat membangun pribadi yang bersih dari kotoran-kotoran kepentingan sektoral, dan lain sejenisnya. Pendidikan antikorupsi mengarahkan setiap anak manusia agar menjadi sosok yang selalu berkata benar demi kebenaran, melangkahakan gerak kakinya di jalan yang benar, dan lain seterusnya.<sup>39</sup> Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap yang benar dan kebenaran.

Pendidikan antikorupsi menjadi penggerak agar setiap individu kemudian bisa membentengi diri dari tindakan-tindakan yang merusak. Pendidikan antikorupsi menyiratkan semangat dan nilai agar bisa melakukan sterilisasi kepentingan-kepentingan kerdil yang ada dalam diri setiap individu. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi mengilustrasikan tentang keadaan dimana setiap individu kemudian menjalankan kehidupannya secara penuh tanggung jawab dan berkomitmen tinggi. Pendidikan antikorupsi menghendaki setiap pribadi agar menjadi pribadi-pribadi yang adiluhung dan berjuang atas nama kebenaran. Pendidikan antikorupsi mengajarkan setiap pribadi agar tegak berdiri untuk melawan kebathilan dan kerusakan moralitas. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi menjawab persoalan-persoalan manusia.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dengan alat pemerolehan data melalui wawancara, angket, dan *Focus Group Discussion* bersama para guru, kepala sekolah, siswa SMP dan MTs oleh Harmanto dan disampaikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008, ada beberapa alasan

---

<sup>39</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 896.

mengapa pendidikan antikorupsi sangat penting untuk dilaksanakan sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai dasar awal pengetahuan tentang korupsi untuk kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa sehingga mereka kemudian tidak melakukan tindakan korupsi.
- 2) Sebagai pencegahan dini tentang bahaya korupsi dan membangun mental anti korupsi di sekolah.
- 3) Sebagai pengamalan pendidikan agama dan PKn dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.
- 4) Mendidik generasi penerus yang memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, berhati-hati dalam berbicara dan bertidak.<sup>40</sup>

#### D. Darurat Pendidikan Antikorupsi

Kata “darurat” sangat tepat merepresentasikan keadaan yang sangat genting dan mendesak untuk segera mendapatkan perhatian sangat tinggi. Kata “darurat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa darurat ini berkenaan dengan keadaan sukar yang tidak disangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan lain-lain) yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa, dan keadaan sementara.<sup>41</sup> Selanjutnya, apabila harus mendapatkan pembahasan secara lebih mendalam, maka darurat berkenaan dengan kondisi dimana tidak ada lagi jalan-jalan normal yang harus ditempuh atau tidak solusi biasa yang harus ditempuh. Solusi-solusi luar biasa yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan luar biasa harus diambil agar segera terjadi perubahan yang luar biasa atas keadaan yang sedang berada dalam keburukan. Kerja-kerja luar biasa merupakan hal penting yang harus dikerjakan agar keadaan yang semula sudah kacau balau kemudian menjadi baik.

Ketika kata “darurat” dihubungkan dengan pendidikan antikorupsi, maka ada satu hal baru yang perlu mendapat perbincangan serius bahwa darurat pendidikan antikorupsi adalah sebuah hal niscaya.

---

<sup>40</sup> Harmanto. 2008. *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMP dan MTs*. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya). Hlm. 12.

<sup>41</sup> <http://id.wiktionary.org/wiki/darurat>, diakses tanggal 2 Juni 2014.

Menyelenggarakan pendidikan antikorupsi merupakan sebuah keadaan darurat sehingga mau tidak mau penyelenggaraan pendidikan antikorupsi menjadi agenda nyata yang harus segera dilaksanakan. Dalam konteks ini, ada beberapa alasan mendasar baik secara ilmiah maupun moral mengapa pendidikan antikorupsi merupakan agenda darurat yang mesti ditunaikan. Pembahasan selanjutnya tentang kedaruratan pendidikan antikorupsi baik dalam konteks pendekatan ilmiah dan moral akan diuraikan secara lebih mendetail di bawah ini:

1. Kedaruratan pendidikan antikorupsi dalam konteks ilmiah.

Sekali lagi perlu dipasang sebuah pemahaman bersama dan tunggal bahwa pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk membangun kesadaran manusia itu sendiri untuk mengenal dirinya sebelum mengenal orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan dalam konteks ini meletakkan cara berpikir manusia agar bisa menjadi rasional dalam mengerjakan setiap pekerjaan serta perbuatannya. Apa yang dikerjakannya selalu didasarkan atas alasan-alasan rasional yang kemudian bisa diterima secara akal sehat. Dalam konteks ini, perbuatan yang ilmiah adalah ketika selalu memberikan pijakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang juga rasional dalam pembangunan kehidupan manusia. Setiap kerja yang digelar kemudian bermuara untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi menjadi penggerak dasar dalam pembangunan kehidupan manusia yang bermartabat dan beradab.

2. Kedaruratan pendidikan antikorupsi dalam konteks moral.

John Dewey menyebutkan bahwa prinsip pendidikan yang sehat adalah dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang terbaik untuk pelajar maupun masyarakat. Itu harus didasarkan pada pengalaman, yang senantiasa merupakan pengalaman kehidupan aktual individu tertentu.<sup>42</sup> Pendidikan bertujuan

---

<sup>42</sup> John Dewey. *Experince and Education: Pendidikan Berbasis Pengalaman*. (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004).

membangun kesadaran manusia. Dengan pendidikan, manusia diharapkan mengenal mana yang baik dan tidak, mana yang haram dan halal menurut agama, mana yang pantas dan tidak sesuai kadar kepentingan publik. Pendidikan, dengan demikian, menghadirkan dirinya untuk pembangunan moralitas manusia agar mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala tugas kemanusiaan yang diembannya. Pendidikan bergerak secara moral untuk membina manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang adiluhung. Dalam konteks darurat pendidikan antikorupsi, maka ini kemudian berhubungan dengan mendesaknya pendidikan antikorupsi di tengah kian gencarnya gerakan korupsi yang dilakukan sejumlah manusia elit di republik ini. Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi sesungguhnya menjawab persoalan tentang kian rendahnya moralitas manusia elit di republik ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Pendidikan antikorupsi juga menjawab kehidupan manusia secara umum bahwa menyelewengkan tugas sekecil apapun sebenarnya sudah dapat disebut sudah telah menggadaikan nilai suci sebuah tugas kemanusiaan. Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi dalam konteks kepentingan moralitas berjalinkelindan dengan kerja-kerja pemantapan identitas diri untuk mau berpihak kepada keadaban publik. Tidak ada pekerjaan yang rendah dan kinerja yang rendah ketika itu ditopang dengan moralitas yang tinggi. Moralitas yang tinggi akan mengawasi setiap kerja dan langkah agar selalu lurus dalam tanggung jawab dan pekerjaan. Pendidikan moralitas, dengan demikian, memberikan pijakan agar apa yang dilakukan selalu didasarkan atas baik dan buruk. Pendidikan moralitas meletakkan cara berpikir manusia untuk selalu menggunakan norma sosial dalam bekerja. Norma sosial dalam hal ini adalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Sesuatu hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kemudian harus menjadi pedoman. Norma sosial membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Dengan norma sosial yang berlaku, ini kemudian mengarahkan setiap manusia agar tidak melanggar norma sosial itu sendiri. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi berada dalam posisi untuk membentuk watak pribadi-pribadi yang selalu memahami kondisi sosial, norma sosial, dan kehidupan sosial yang berlangsung. Pendidikan antikorupsi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka melahirkan manusia-manusia yang bermoral, yang selanjutnya selalu menjadikan moralitas sebagai landasan bergerak dan bekerja.

Selanjutnya Basri<sup>43</sup> menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah sesuatu hal yang urgen. Berbicara pendidikan kemudian tidak sebatas kepada belajar matematika, Bahasa Inggris, atau pelajaran lainnya namun lebih dari itu adalah pendidikan kemudian harus dikaitkan dengan antikorupsi sebagai langkah dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter setiap pribadi manusia, termasuk di dalamnya peserta didik di sekolah agar mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran. Hasil akhir dari pendidikan antikorupsi adalah untuk melahirkan generasi yang memahami korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara sehingga dengan kondisi demikian akan membangun kesadaran tentang gerakan kesadaran melawan korupsi. Dalam rangka membantu keberhasilan pendidikan antikorupsi, maka menjadi penting untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut ketika dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi di sekolah:

1. Kepala sekolah tidak memonopoli semua kebijakan di sekolah mulai dari proses administrasi, manajemen kepegawaian hingga masalah keuangan.
2. Peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembentuk karakter.

---

<sup>43</sup> <http://m.riapos.co/2053-opini-urgensi-pendidikan-anti-korupsi.html>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

3. Orangtua siswa dan masyarakat tak lagi semata-mata dijadikan sasaran pungutan apalagi pada tahun ajaran baru.
4. Pembentukan komite sekolah mengikuti ketentuan dan teknis, bukan ditunjuk oleh kepala sekolah.
5. Perencanaan APBS/RKAS tidak dimonopoli kepala sekolah dibantu oleh orang-orang kepercayaannya.
6. Pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya diketahui oleh kepala sekolah dan diwujudkan secara transparan.
7. Akuntabilitas keuangan sekolah kepada seluruh stakeholder sekolah.

Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi dalam segala kondisi sesungguhnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat semakin runyam dan ruwet kondisi bangsa ini ke depan. Secara bertubi-tubi dan tiada henti, terlalu kronis penyakit korupsi yang sudah berlangsung di negeri ini. Apabila tidak segera diobati, maka ke depan korupsi akan kian masif berlangsung dan akhirnya bangsa ini akan tetap berada dalam kehancuran.

Dengan demikian, menjadi perlu untuk diuraikan secara mendalam mengapa pendidikan antikorupsi perlu dijadikan sebagai program darurat dalam rangka menyelamatkan bangsa untuk generasi mendatang:

1. Darurat kehancuran moralitas

Korupsi selama ini memang secara hukum telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun lepas dari itu adalah keberadaan korupsi sudah dapat disebut kehancuran moralitas setiap individu, terutama mereka yang selama ini mendapatkan mandat untuk bekerja demi publik. Moralitas yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman para manusia berdasi dan elit dalam menunaikan mandat rakyat telah diabaikan dengan begitu saja. Sudah tidak ada lagi etika publik. Sudah tidak ada lagi yang bernama komitmen sosial untuk pelayanan publik, dan lain seterusnya. Yang ada adalah semakin liarnya pola pikir dan sikap para manusia elit serta berdasi dalam melancarkan aksi kejahatan kemanusiaannya sehingga sudah tidak lagi mengenal mana yang baik dan jahat,

mana yang seharusnya dikerjakan untuk publik dan merugikan publik. Moralitas dalam konteks ini sudah berada dalam lubang kedaruratan sebab sudah tidak lagi dipedulikan sama sekali. Kondisi ironis sedemikian tentunya perlu ditanggapi dan dipahami secara serius agar tidak terjadi pembengkakan imoralitas dimanamana dan kian rusaknya kehidupan berbangsa serta bernegara. Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini perlu menjawab itu. Memang kita tidak akan mungkin mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada manusia elit dan berdasi dengan cara mengajarkannya di sekolah. Kampanye pendidikan antikorupsi dengan segala dampak negatifnya serta sanksi moral lain kemudian harus disampaikan ke tengah publik. Kampanye moralitas untuk menangkal tindak korupsi adalah sebuah hal niscaya.

## 2. Darurat Miskinnya Negara

Realitas tentang korupsi yang sudah menghabiskan miliaran rupiah yang dimakan para koruptor sesungguhnya memberikan potret buram mengenai nasib bangsa ke depan. Dengan kondisi keuangan negara yang sudah menipis dan mengering, ke depannya pembangunan di segala bidang kehidupan akan mengalami kemacetan luar biasa. Yang terjadi selanjutnya adalah kemajuan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemajuan dalam pembangunan kemanusiaan dan sumber daya manusia sudah berhenti akibat negara yang sudah miskin. Inilah yang selanjutnya disebut darurat miskinnya negara. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi yang mengenalkan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap setiap amanat yang dipegangnya, selalu berjalan di jalan yang lurus untuk bekerja demi umat, dan tidak menggunakan wewenang atas nama kepentingan tertentu selanjutnya menjadi penting untuk selalu dikampanyekan dalam bentuk apapun. Negara sudah sakit dan yang membuat sakit adalah para elitnya yang suka menghalalkan segala cara demi memuluskan kepentingan sektoralnya.

## 3. Darurat Hancurnya Peradaban

Peradaban bangsa berkaitan erat dengan cara berpikir yang tinggi, cara bersikap yang tinggi, dan cara bertindak yang juga tinggi. Peradaban, dengan demikian, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan yang dijalankan sebuah bangsa untuk kepentingan bersama di atas segala-galanya. Ketika peradaban saat ini berada dalam kondisi yang hancur lebur, maka ini mengilustrasikan secara tegas bahwa manusia sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang luhur. Yang terjadi adalah *homo homini lupus*. Semuanya saling menerkam untuk tujuannya sendiri. Tidak ada lagi yang bernama semangat kemanusiaan untuk bangsa. Tidak ada lagi yang bernama keutuhan bersama dan tidak perlu untuk bersama dalam membangun kebaikan. Oleh karenanya, kondisi bangsa yang porak poranda kemudian perlu dijawab dengan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi memberikan pelajaran tentang kejujuran, tanggung jawab dan selalu bersandar pada etika publik. Mengapa peradaban menjadi hancur, ini terjadi akibat sudah hilangnya tanggung jawab moral untuk bersama, dan lain seterusnya.

Tiga kondisi darurat di atas kemudian bisa memberikan satu benang merah bahwa pendidikan antikorupsi adalah sebuah harga mati. Menarik apa yang disampaikan Franz Magnis-Suseno dalam Diskusi Koalisi Antar Umat Beragama (KAUB) di Yogyakarta pada akhir Desember 2004. Dia mengatakan bahwa pendidikan untuk anak bertujuan pada pembangunan rasa ingin tahu, ingin meneliti, sikap kritis dengan mempertanyakan sesuatu tanpa menelan mentah-mentah. Pendidikan itu juga harus ditujukan dalam rangka pembangunan kreativitas, intelektual, emosional, berpikir baru, mempertanyakan, dan perasaan bersama. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, anak sejak dini harus diajarkan membedakan milik sendiri, milik orang lain, dan bagaimana memeliharanya. Barang pinjaman harus dipelihara lebih baik dari pada

barang miliknya sendiri. Menguasai milik orang lain adalah awal korupsi.<sup>44</sup> Apa yang dimaksud oleh Magniz-Suseno ingin memberikan penjelasan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan adalah tiga hal penting serta mendasar dalam membangun karakter manusia untuk menjadi diri pribadi yang baik, bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Apa yang dimaksud dengan memelihara barang orang lain lebih baik ketimbang barang miliknya adalah marilah memberikan penghormatan dan perlindungan yang tinggi kepada barang milik lain. Analoginya adalah dengan kita menghormati orang lain, ini sama halnya dengan menghormati diri sendiri. Apa yang kita berikan untuk orang lain sesungguhnya kembali kepada diri kita sendiri.

Magniz-Suseno mengajarkan pendidikan antikorupsi melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan jujur, ini berarti kita telah melakukan kebaikan kolektif. Dengan bertanggung jawab, kita sudah menjaga amanah demi kebaikan kolektif. Dengan bersikap adil, kita berarti telah menempatkan segala hal dalam konteks yang proporsional. Tidak ada yang mendapat ruang istimewa sedangkan hal-hal lainnya tidak. Pendidikan antikorupsi hadir dalam konteks tersebut. Pendidikan antikorupsi menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang selama ini sudah lama tidak tersentuh, sebut saja hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Pendidikan antikorupsi merupakan sebuah penjawab atas pelbagai kondisi manusia dan bangsa yang terus kian berada dalam kondisi karut marut.

Kesarakahan, arogansi, ketamakan, dan lain sejenisnya sesungguhnya memberikan sumbangsih signifikan bagi hancurnya peradaban bangsa, miskinnya bangsa, dan ambruknya moralitas bangsa. Sifat dasar manusia yang merusak dan negatif telah membuat bangsa dan manusia menjadi tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan lain sejenisnya. Atas hal-hal demikian, darurat pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk dikampanyekan. Oleh karenanya, hal-

---

<sup>44</sup> Suhartono W. Pranoto. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah, Merangkai Hasil Kejaharan Pasca-Reformasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008). Hlm. 178.

hal berikut menjadi penting sebagai gerakan mengkampanyekan darurat pendidikan antikorupsi:

1. Selamatkan bangsa

Menyelamatkan bangsa melalui pendidikan antikorupsi adalah hal niscaya dalam rangka membangun bangsa yang beradab.

2. Selamatkan Generasi Bangsa

Pendidikan antikorupsi menjadi jalan terbaik dalam menyelamatkan generasi bangsa. Memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada para peserta didik mulai dari tingkat dasar, lanjut dan tinggi kemudian harus diintensifkan. Ini menjadi gerakan masif untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia masa depan yang ke depannya akan mengelola republik ini di segala lini kehidupan.

### BAB III

#### KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Proses pembelajaran yang membentuk sikap dan pola pikir peserta didik berkarakter adalah ketika kurikulum yang digunakan mendukung tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran akan mampu ditunaikan dengan sedemikian rupa ketika ada sebuah dialog yang terbuka antara pendidik dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dibangun atas dasar semangat mendidik selanjutnya akan melahirkan sebuah proses pendidikan yang dinamis dan konstruktif. Oleh karenanya, pendidikan yang sesungguhnya mampu menjawab persoalan bangsa adalah ketika ia mampu memberikan solusi penyadaran. Pendidikan, sebagaimana yang disampaikan Paulo Freire adalah proses konsientisasi atau sebuah proses penyadaran diri dari statis menuju dinamis, dari terpuruk menuju maju dan begitu seterusnya.<sup>45</sup>

Pendidikan sebagai proses penyadaran, oleh karenanya, berperan penting agar manusia yang hidup kemudian mampu memiliki kesadaran sangat tinggi tentang keberadaan dirinya terhadap yang lain, apakah itu terhadap lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang lebih luas. Pendidikan sebagai proses penyadaran selalu menghadirkan diri sebagai bagian dari pembangunan kehidupan yang berprinsip untuk mengawal sebuah kehidupan yang selalu berbasiskan kepada keluhuran hidup. Pendidikan sebagai proses penyadaran menghadirkan keberadaan manusia untuk selalu melakukan interaksi dan dialog dengan lingkungan sebagai bentuk persahabatan. Pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia sehingga pendidikan harus mampu membentuk manusia menjadi manusia sesungguhnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, menjadi penting untuk merancang sebuah proses pendidikan yang mampu memanusiakan manusia. Rancangan pendidikan yang manusiawi akan terbangun dengan sedemikian rupa ketika ada sebuah langkah rencana terpadu yang dapat mempermudah

---

<sup>45</sup> Moh. Yamin. *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. (Yogyakarta: Arruzz Media. 2009).

proses pendidikan. Yang terpenting lagi, pendidikan sebenarnya membentuk manusia unggul yang mampu membuka dan melebarkan pandangannya sehingga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Berpijak pada hal tersebut, pendidikan sebagai proses penyadaran diri manusia kemudian diharapkan mampu dilakukan atas dasar-dasar yang tepat sasaran. Pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia yang unggul agar mampu terbangun kehidupan dan hidup yang konstruktif.

Tentu di dalam penyelenggaraan pendidikan kemudian diperlukan adanya kurikulum yang tepat agar apa yang ingin dituju dapat sesuai harapan. Tanpa adanya kurikulum, pendidikan yang ditunaikan pun tidak akan mampu mencapai tujuan dan sasaran sebab di dalam kurikulum ada tujuan umum dan khusus yang akan diraih. Di dalam kurikulum juga ada pelbagai instrumen lain yang harus disiapkan untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai harapan. Kurikulum kemudian dapat dianalogikan seperti sebuah rumah dimana kurikulum itu sendiri menjadi fondasi mendasar sebelum sebuah bangunan rumah berdiri kokoh.

Kurikulum yang akan memperkuat dan mempertegas perjalanan sebuah pendidikan sebab di sana ada perekat-perekat penting agar sebuah proses pendidikan dapat diberlangsungkan dengan sedemikian konkret dan praksis. Kurikulum menjadi fondasi utama agar sebuah keberlangsungan pendidikan mampu tegas dan kuat serta tidak melenceng dari tujuan awal yang akan diraih.

Kurikulum memberikan arahan dan kepastian tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kurun waktu tertentu. Tentunya ketika berbicara kurikulum, ini akan berjaln kelindan erat dengan sebuah proyek penyelenggaraan pendidikan yang dimampukan bisa dijalankan dengan sedemikian maksimal dan optimal. Optimalisasi dan maksimalisasi sebuah penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya bergantung sepenuhnya kepada kurikulum. Apabila dalam perjalanan pendidikan di republik tercinta ini pernah ada yang namanya cara belajar siswa aktif (CBSA), kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan mungkin yang lain, di sinilah sebuah peran

kurikulum benar-benar dibuktikan implimentasinya dengan sedemikian konkret dan praksis. Pasalnya kurikulumlah kemudian bisa membawa sebuah proses perubahan penyelenggaraan pendidikan.

Ketika CBSA yang digunakan, maka peran keaktifan peserta didik coba didominasi perannya agar keberlangsungan pembelajaran dalam kelas lebih sepenuhnya kepada mereka. Peran pengajar sangat minus. Pada intinya, peserta didik mampu aktif dalam kelas atau proses belajar mengajar, maka ini sudah disebut berhasil sebuah penyelenggaraan CBSA. Hal tersebut pun juga sama dengan kurikulum-kurikulum yang lain yang juga pernah dilakukan. Dengan demikian, terlepas apa pun namanya kurikulum tersebut, maka muara akhir dari kurikulum adalah sebuah keberhasilan implimentasi pendidikan dalam kelas atau belajar mengajar.

Dengan begitu, sesungguhnya kurikulum kemudian harus mampu menjadi nyawa serta ruh bagi penyelenggaraan pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan tanpa diperkuat oleh keberadaan kurikulum akan kehilangan eksistensinya. Tak ada dalam hidup manusia yang dijalani tanpa adanya sebuah visi dan misi hidup. Hal tersebut sama halnya dengan pendidikan. Tak ada pendidikan yang dilakukan tanpa adanya kurikulum yang menyimpan visi dan misi pemanusiaan manusia. Kurikulum dengan demikian seyogyanya harus selalu berada di depan sebelum proses pendidikan dijalankan sebab keberhasilan pendidikan kemudian dapat terpantau dari keberadaan kurikulum itu sendiri.

Oleh sebab itu, ada beberapa poin penting yang perlu menjadi pendahuluan sebelum semakin mendalam melakukan pembahasan tentang kurikulum:

1. Kurikulum sesungguhnya merupakan sebuah proses insemiasi nilai-nilai dari kehidupan bangsa. Kurikulum memuat pelbagai hal yang kemudian perlu dipelajari oleh peserta didik dengan pendekatan, metode, dan strategi yang sudah ada. Kurikulum pada prinsipnya kemudian mencoba membangun logika berpikir peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam konteks yang lebih luas. Kurikulum kemudian mengajak para peserta didik untuk bisa berkelana dalam kehidupan diri dan lingkungannya bagaimana

sebenarnya hidup dan kehidupan itu perlu dikemas dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum mengilustrasikan sebuah potret pendidikan sebuah bangsa tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negerinya sendiri dan harapan ke depan sebuah pelaksanaan pendidikan yang akan ditunaikan. Kurikulum merupakan sebuah perangkat lunak yang membasisi sebuah perjalanan pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum berbincang tentang harapan ideal yang mesti ditunaikan.

2. Kurikulum itu lahir dari sebuah dialektika kehidupan bangsa. Kurikulum menjadi bagian dari kehidupan bangsa dan diambil dari sari pati perjalanan bangsa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Ada nilai-nilai yang ingin diraihinya setelah setelah sari pati tersebut menjadi dan dijadikan nilai-nilai dalam sebuah kurikulum. Oleh sebab itu, karena kurikulum itu lahir dari sebuah perjalanan bangsa, maka adalah niscaya ketika kurikulum kemudian perlu mencerminkan kehidupan bangsa.
3. Kurikulum merupakan sebuah cermin bagaimana kehidupan dan hidup yang selama ini dijalankan kemudian bisa lebih ditata dengan sedemikian rupa sebab inilah tujuan utama dari sebuah keberadaan kurikulum.
4. Kurikulum merupakan program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melakukan proses akumulasi pengetahuan antar generasi dalam sebuah masyarakat tertentu. Dalam sebuah masyarakat yang homogen, masalah kurikulum tidak merisaukan sebab tidak ada yang melakukan dominasi antar satu dengan yang lainnya. Sementara dalam masyarakat yang heterogen, maka dominasi kepentingan pun kemudian akan berlangsung dengan sedemikian rupa. Dominasi tersebut kemudian diperlihatkan dalam bentuk sistem persekolahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mana yang sedang berkuasa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> A Ferry T. Indratno. *Kurikulum Beridentitas Kerakyatan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* (Editor: A Ferry T. Indratno). (Jakarta: Kompas, 2007). Hlm. 108.

Dari sekian pembahasan awal, maka kurikulum kemudian menjadi harapan dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan konstruktif. Apabila saat ini republik ini sedang dilanda bencana korupsi di segala dimensi kehidupan, maka pendidikan sebagai gerbang terakhir untuk menyelamatkan bangsa kemudian harus segera dilakukan. Pendidikan harus mampu mengubah paradigma masyarakat yang saat ini suka dan sudah melakukan budaya menerabas, mengutip pendapat Kontjaraningrat.<sup>47</sup> Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan korupsi. Apakah yang berkorupsi sudah berpendidikan atau tidak, itu sudah tidak zaman lagi. Ternyata, antara yang berpendidikan dan tidak berpendidikan sudah sama dalam memandang hidup. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Semuanya sudah bekerja atas nama kepentingan pribadi dan golongan. Oleh sebab itu, realitas mengenai perilaku manusia Indonesia yang sudah jauh dari moralitas kemudian menjadi bukti nyata bahwa ada yang salah pendidikan.

Pendidikan yang selama ini diharapkan mampu membentuk mentalitas manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya ternyata tidak bisa dilakukan dengan sedemikian konkret dan praksis. Pendidikan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiasi manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi.<sup>48</sup> Konteks persoalannya adalah ternyata apa yang disampaikan Driyarkara sudah jauh dari harapan nyata. Pendidikan yang sudah diraih para manusia Indonesia tidak sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi perubahan yang baik.

## A. Kurikulum Jantung Pendidikan

---

<sup>47</sup> Rosihan Anwar. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jilid 3* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). Hlm. 38.

<sup>48</sup> A. Sudiarja, et all. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Kompas dan Kanisius, 2006).

Jantung (bahasa Latin, *cor*) adalah sebuah rongga, rongga, organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Istilah *kardiak* berarti berhubungan dengan jantung, dari Yunani *cardia* untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah.<sup>49</sup> Tentu, peran jantung sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa jantung yang memompa darah, manusia tidak akan bisa hidup. Keberadaan jantung tentu sangat vital dalam proses keberkehidupan manusia ke depannya. Dengan jantung yang mampu memompa darah ke seluruh tubuh, maka manusia akan bisa hidup. Ia akan bisa melangsungkan kehidupan. Jantung pada intinya memiliki posisi sangat strategis dalam rangka menghidupkan manusia terlepas apakah perannya itu bersifat langsung atau tidak langsung. Jantung dengan demikian tidak bisa diremehkan keberperannya dalam segala kegiatan kehidupan manusia. Ketika jantung dalam pendekatan biologis ini kemudian dihubungkan dengan kurikulum sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sesungguhnya kurikulum bagi dunia pendidikan pun bisa dianalogikan sebagai jantung yang akan memompa nilai-nilai, visi, program apa pun yang harus diinseminasikan dalam pendidikan.

Kurikulum menjadi sebuah perangkat lunak dan signifikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebab di dalamnya terangkum pelbagai hal yang mesti dikerjakan dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, sesungguhnya dalam konteks apa pun kurikulum merupakan sebuah langkah utama yang mesti dipersiapkan sebelum program pembelajaran diselenggarakan dengan sedemikian rupa. Kondisi kurikulum yang begitu signifikan menempatkan posisinya sebagai penggerak pendidikan sehingga akan mampu menjalankan program-program pencerdasan kehidupan bangsa. Diakui maupun tidak, kurikulum menempatkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bersama di atas segala-galanya.

---

<sup>49</sup> <http://grandmall10.wordpress.com/2010/04/05/jantung-dan-fungsinya/>, diakses tanggal 2 September 2012.

Kurikulum sebetulnya sama halnya dengan kerangka utama dalam sebuah pekerjaan pendidikan. Dari kurikulumlah sebuah tujuan pendidikan akan mampu dicapai dengan sedemikian rupa. Dari kurikulum pulalah tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan bersama kemudian bisa ditunaikan dengan sedemikian rupa. Yamin dalam bukunya menyebutkan beberapa hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam kurikulum:<sup>50</sup>

1. Kurikulum hendaknya harus dirancang dengan sedemikian rapi, cerdas dan akurat sehingga ini melahirkan relasi erat antara mata pelajaran-mata pelajaran.
2. Kurikulum harus bersifat fleksibel, bisa melakukan kontekstualisasi dengan kepentingan-kepentingan pendidikan di tingkat lokalitas tertentu.
3. Kurikulum untuk setiap sekolah hendaknya harus disusun bersama oleh para guru dan sejumlah elemen lain di tingkat sekolah yang juga memiliki kepentingan bersama demi tujuan pendidikan di tingkat lokalitas, namun kendatipun demikian tetap berdasarkan kepada tujuan pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, terjadi sinergisitas dan harmonisasi antara tujuan kepentingan lokal dan nasional.
4. Kurikulum hendaknya mencakup segala pengalaman anak di bawah pimpinan sekolah.
5. Kurikulum juga hendaknya berpusat pada persoalan-persoalan sosial dan pribadi yang sangat bermakna dan penting bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sekolah memiliki tanggung jawab membantu anak supaya lebih mampu berhadapan dengan situasi-situasi dalam hidupnya agar mereka kemudian menjadi anak-anak yang bisa berpikir dewasa dan matang.
6. Kurikulum harus diselenggarakan sebagai wujud guna mencapai cita-cita nasional yang berlandaskan filsafat negara. Sehingga sekolah pun harus bisa bertanggung jawab penuh guna membentuk masyarakat Indonesia yang bersatu, sanggup menempatkan

---

<sup>50</sup> Moh. Yamin. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. (Yogyakarta: Diva Press. 2009).

kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, golongan atau daerah.

7. Kurikulum harus memberikan pengalaman yang luas dan bermakna kepada anak-anak, tidak bersifat tekstual sentries.
8. Kurikulum harus diorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mempelajari teknik belajar, cara kerja efektif dan cara-cara menyelidik serta memecahkan masalah.
9. Kurikulum hendaknya pula membuka kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing.

Atas beberapa prinsip penting tersebut, maka sebenarnya kurikulum harus mampu dirancang dengan sedemikian rupa agar mampu mawadahi pelbagai kepentingan yang bisa memperjuangkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Keberadaan kurikulum dalam proses penyelenggaraan pendidikan adalah sebuah hal niscaya. Ia memberikan arahan yang pasti dan nyata kemanakah sebuah tujuan pendidikan akan diarahkan dengan sedemikian rupa. Oleh karenanya, John McNeil (1984) lebih menegaskan bahwa kurikulum adalah jantung sebuah sekolah. Pengertian praktisnya adalah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan pendidikan agar mampu terpraksiskan dengan sedemikian konkret harus berdasarkan apa yang sudah ada dalam kurikulum.

Dengan demikian, kurikulum dalam sebuah konteks yang lebih besar kemudian harus dimaknai sebagai sebuah perangkat terpenting bagi terjalankannya sebuah penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Kurikulum memandu perjalanan pendidikan agar bisa sesuai harapan. Ia memantapkan sebuah pergerakan pendidikan supaya bisa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan bersama. Dalam sebuah pendekatan filosofis, kurikulum menjadi rumah yang memiliki banyak nilai konstruktif dan kondusif bagi sebuah penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Disebut konstruktif karena kurikulum membangun sebuah bangunan pendidikan yang mencapai tujuan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat pembangunan yang ingin disampaikan dalam kurikulum adalah bagaimana sebuah penyelenggaraan pendidikan bisa

ditunaikan dengan sedemikian berhasil. Sementara dinamakan kondusif karena kurikulum yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa akan menciptakan suasana dan keadaan penyelenggaraan pendidikan yang menyenangkan. Kurikulum lebih mencoba mengharmoniskan pelbagai kebutuhan dan kepentingan yang coba diinseminasikan dalam penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, rancang bangun kurikulum yang sesuai dengan yang diharapkan bersama akan mampu melahirkan sebuah penyelenggaraan pendidikan yang tepat sasaran. Persoalannya ke depan adalah format kurikulum seperti apakah yang sangat tepat diimplimentasikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik, maka ini tentunya tidak lepas dari nilai-nilai kehidupan yang lahir dan dilahirkan dari realitas-realitas sosial kemasyarakatan sekitar. Kurikulum harus dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan akar rumput. Kurikulum yang mampu memberikan pedoman hidup dan kehidupan adalah ketika ia merupakan sebuah refleksi realitas. Kurikulum lahir dan kembali kepada realitas. Ia merupakan sebuah dialektika antara teori dan kenyataan, antara fakta dan harapan. Kurikulum menjadi sebuah pertarungan dari sebuah harapan yang harus dikonkretkan agar bisa memberikan sebuah pandangan hidup dan kehidupan.

Kurikulum yang sebenarnya adalah tatkala mampu mencerminkan segala kenyataan di realitas. Ia berdiri di atas fakta-fakta hidup yang kemudian dilanjutkan menjadi harapan-harapan supaya menjadi sebuah kebermaknaan. Kurikulum menegaskan sebuah gambaran kenyataan sesungguhnya dan ia berada karena adanya harapan-harapan dari kenyataan-kenyataan yang harus diterjemahkan. Kurikulum menunjukkan harapan-harapan besar dari perbaikan pembangunan hidup dan kehidupan. Kurikulum berbicara tentang bagaimana gambaran kehidupan dan hidup ideal bisa dibangun dengan sedemikian konkret dan praksis. Kurikulum mengilustrasikan bangunan hidup dan kehidupan yang niscaya pasti baik dan lebih baik dari pada sebelumnya.

Kurikulum memperjelas tentang bagaimana sebuah perjalanan hidup dan kehidupan dilanjutkan dengan sedemikian rupa untuk melahirkan

bangunan masa depan yang lebih bermakna. Kurikulum, oleh karenanya, menjadi piranti terpenting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan yang bermartabat. Kurikulum menjadi penggerak penyelenggaraan pendidikan yang mampu membangkitkan ruh kemanusiaan dan pemanusiaan. Kurikulum membangkitkan harapan-harapan baru agar mampu menerjemahkan harapan-harapan dari fakta-fakta yang sudah terkonkretkan.

Kurikulum selanjutnya menggali, mengembangkan, dan memajukan kemampuan peserta didik. Pasalnya, dalam kurikulum sudah termuat pelbagai program, visi, dan misi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, kurikulum lahir dari sebuah harapan untuk kemajuan pendidikan. Kurikulum berkomitmen untuk membangun sebuah kehidupan dan hidup pendidikan yang bermartabat. Oleh karenanya, konteks keberperanan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebuah hal niscaya. Kita tidak akan mungkin mampu menciptakan tujuan pendidikan yang tepat sasaran ketika kurikulum tidak ditempatkan sebagai jantung dari sebuah penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum menjadi harga mati yang harus diadakan dalam rangka melahirkan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan benar. Kurikulum berbuat untuk sebuah pemantapan dan pelurusan tujuan pendidikan agar bisa sampai kepada akhir. Kurikulum dalam konteks yang lebih luas adalah ia mengandung pelbagai pandangan ke depan apa yang seharusnya dikerjakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurikulum meniscayakan sebuah pelaksanaan pendidikan yang tepat. Kurikulum menunjukkan bagaimana langkah dan gerakan pendidikan akan ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kurikulum merupakan sebuah bangunan terpenting dan sangat mendasar sebelum penyelenggaraan pendidikan dapat ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. Kurikulum menjadi ruh dari sebuah proses pendidikan yang sesungguhnya.

Selanjutnya sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung sebuah pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruknya sebuah hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak.

Adanya peserta didik yang memiliki pandangan luar biasa dan berpikir ke depan disebabkan oleh kurikulum yang bisa membuka *mindset* peserta didik yang progresif. Adanya peserta didik yang tetap goblok dan lain seterusnya juga dilatarbelakangi oleh kurikulum yang juga buruk. Banyaknya peserta didik yang kemudian tidak memahami realitas sosial disebabkan oleh kurikulum yang terlalu menggiring peserta didik kepada pembelajaran tekstual, bukan pada pendidikan kontekstual. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Sehingga dengan demikian, kurikulum memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan bagi peserta didik. Ia adalah ruh yang memberikan kehidupan bagi dunia pendidikan. Ibaratnya, ia adalah sebuah konstruksi bangunan yang sangat berpengaruh bagi estetika sebuah bangunan, sebut saja gedung, rumah, dan lain seterusnya.<sup>51</sup>

Kurikulum menyimpan semangat reformatif dan transformatif agar sebuah penyelenggaraan pendidikan dapat ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kurikulum sesungguhnya hadir untuk dapat menuliskan apa yang harus dikerjakan untuk mampu menggerakkan penyelenggaraan pendidikan. Ia menjadi pemandu agar proses pendidikan bisa ditunaikan dengan sedemikian rupa.

Oleh karenanya, ada beberapa poin penting mengapa kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan:

1. Ia merupakan gambaran masa kini dan masa depan tentang sebuah pendidikan. Gambaran masa kini berarti bahwa potret pendidikan saat ini menjadi sebuah cerminan bagaimana sebuah penyelenggaraan pendidikan kemudian dapat ditunaikan dengan sedemikian rupa. Gambaran masa kini juga dapat dimaknai bahwa pendidikan yang sedang berlangsung dapat menjadi jembatan bagi perjalanan pendidikan ke depannya. Oleh karenanya, praksis pendidikan saat ini sesungguhnya menjadi sebuah dialektika untuk sebuah penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya untuk melahirkan pendidikan yang lebih baik. Sementara kurikulum

---

<sup>51</sup> Moh. Yamin. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. (Yogyakarta: Diva Press. 2009).

dalam pengertian masa depan adalah ia juga menyimpan pelbagai harapan, keinginan, tujuan, target, dan impian agar sebuah penyelenggaraan pendidikan kemudian dapat ditunaikan sesuai dengan program yang sudah dipatok. Hal lainnya terkait kurikulum dalam pengertian masa depan adalah ia juga berisikan agenda-agenda jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam rangka semakin mempertegas sebuah keberlanjutan tujuan pendidikan baik bagi peserta didik, sekolah, masyarakat, maupun negara.

2. Sebuah penyelenggaraan pendidikan tanpa adanya konsep yang terukur dan dapat dinilai akan melahirkan akhir pendidikan yang salah sasaran. Sebuah penyelenggaraan pendidikan tanpa diramu dengan sedemikian tepat sasaran akan membuat tujuan pembelajaran tidak bisa diraih dengan sedemikian berhasil. Sebuah penyelenggaraan pendidikan tanpa dipersiapkan dengan sedemikian matang dan sempurna akan membuat penyelenggaraan pendidikan tidak mampu berjalan maksimal dan optimal.
3. Kurikulum lahir dan dilahirkan dari realitas. Ia selanjutnya harus dikembalikan kepada realitas dimana sekolah dan ruangan kelas menjadi sebuah sentrum proses pembelajaran. Karena kurikulum harus berada dalam sekolah dan ruangan kelas, maka ia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari praksis pendidikan yang sedang diberlangsungkan. Kemenyatuan antara kurikulum dengan proses pembelajaran merupakan sebuah hal niscaya. Ia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah peran kurikulum dalam memandu dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan kemudian menjadi tak terbantahkan untuk ditunaikan. Kurikulum menjadi kunci strategis dan signifikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan secara *taken for granted* agar program dan target yang ingin dicapai dapat diraih secara tepat sasaran.

Dengan demikian, kurikulum sebagian bagian tak terpisahkan dari sebuah penyelenggaraan pendidikan menjadi peran sangat strategis dalam implimentasi yang berhasil. Apa pun kondisinya, ternyata kurikulum

memberikan pijakan mendasar bagaimana sebuah penyelenggaraan pendidikan akan dikerangkakan dengan sedemikian rupa. Kurikulum menjadi pewarna tersendiri bagaimana sebuah kehidupan dan pola pendidikan akan dijalankan dengan sedemikian rupa. Sebagai perangkat terpenting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan, kurikulum kemudian tidak bisa diremehkan keberadaannya. Terlepas selama ini sudah terjadi bongkar pasang kurikulum yang dilakukan sejumlah rezim, kurikulum secara hakiki menjadi pemandu bagaimana sebuah pendidikan yang baik, kondusif, dan konstruktif kemudian akan ditunaikan dengan sedemikian rupa.

Pendidikan kemudian tidak bisa dipisahkan dari kurikulum sebagai peyangganya. Kurikulum tentu dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan bangunan dasar sebuah bangunan. Tanpa adanya bangunan dasar, bangunan apa pun bentuknya, sebut saja rumah dan lain sejenisnya tidak akan bisa berdiri. Konsekwensi sangat mendasar dengan keberadaan kurikulum adalah bagaimana sebuah implimentasi pendidikan benar-benar dijalankan sesuai dengan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Mengapa disebut demi kepentingan bersama, karena di dalamnya ada visi dan misi yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Kurikulum yang sebenarnya mampu berbicara atas nama kepentingan bersama di atas segala-galanya adalah ketika ia dilandasi oleh visi dan misi. Visi dan misi tentu kemudian membicarakan nilai-nilai yang menjadi ruh penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan dengan hasil yang membangun.

Oleh sebab itu, sebagai jantung pendidikan, kurikulum dalam kondisi terdesak atau tidak terdesak memang selalu ada. Sesungguhnya ketika berbicara tentang kurikulum, hal tersebut berjaln kelindan dengan standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Itulah mengapa kurikulum disebut jantung pendidikan. Menjadi penting apabila memperjelas tiga konsep tentang kurikulum, yakni kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.

Pada konsep pertama, kurikulum menjadi sebuah rencana kegiatan belajar mengajar bagi para peserta didik di sekolah dan menjadi pemandu dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Kurikulum dalam konteks ini kemudian bisa berupa dokumen tertulis yang berisi tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum pun dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah dan lain sejenisnya. Dengan demikian, kurikulum sebagai substansi sesungguhnya mendasari bagaimana sebuah kegiatan belajar mengajar kemudian diformat dengan sedemikian rupa.

Pada konsep kedua, kurikulum sebagai sistem dimaknai sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Sistem persekolahan berarti bahwa kurikulum menjadi bagian terpenting bagaimana sebuah penyelenggaraan sekolah kemudian akan dijalankan. Dalam dunia sekolah, pasti ada media, sarana dan prasarana dan lain sejenisnya untuk mendukung sebuah keberhasilan pendidikan. Sistem pendidikan bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan pasti ada jejaring yang saling bekerja bersama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sehingga dengan demikian sesungguhnya sistem pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu sendiri secara universal mengikat semua komponen dalam pendidikan untuk mencapai sebuah tujuannya.

Pada konsep ketiga, kurikulum sebagai sistem masyarakat dimaknai bahwa kurikulum yang hadir dalam kehidupan peserta didik menjadi miniatur kehidupan sosial bagi mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial coba dibelajarkan kepada peserta didik. Apa yang berlangsung dan menjadi realitas dalam kehidupan sosial diterjemahkan dalam dunia pendidikan, yang bernama dunia sekolah.<sup>52</sup> Dengan demikian, tujuan yang dicapai dalam pendidikan sekolah memiliki korelasi sangat kuat dengan kehidupan di luar sekolah. Sesuatu yang dibelajarkan dalam sekolah menjawab kebutuhan dan kepentingan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat

---

<sup>52</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004). Hal. 27.

dan itu dipelajari baik secara teoritis maupun praktik oleh para peserta didik di dalam sekolah.

## B. Meninjau Definisi Kurikulum

Memahami kurikulum secara etimologis dan epistemologis merupakan sebuah hal niscaya agar kemudian tidak terjebak kapada hitam putih terkait seperti apakah kurikulum itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memahami seperti apakah kurikulum itu sendiri secara etimologis dan epistemologis.

Berikut ini merupakan beberapa hasil pemikiran tentang definisi kurikulum menurut para pakar:

1. Hilda Taba mengartikan kurikulum sebagai a *plan for learning*, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh anak-anak. Pengertiannya adalah dalam sebuah proses belajar yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu, memang itu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang mulai dari pendekatan, strategi, metode, bahan yang akan disampaikan oleh pendidik, evaluasi, refleksi dan lain seterusnya. Dengan demikian, kurikulum sebetulnya menyangkut segala hal yang harus dipenuhi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang holistik dan komprehensif. Dalam belajar, banyak hal yang kemudian harus disiapkan supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diraih. Belajar sesungguhnya adalah ketika semuanya berada dalam wadah yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri sebagai target yang akan dilakukan. Belajar yang sebenarnya adalah ketika ada sebuah permulaan, pertengahan, dan akhir yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, kurikulum dalam konteks yang universal adalah sebuah cerminan bagaimana pendidikan yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan visi pendidikan itu sendiri. Menjadikan pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan kurikulum sebagai perangkat lunak merupakan sebuah hal niscaya.

2. J. Galen Saylor dan William M. Alexander menjelaskan *The curriculum is the sum total of schools effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school*. Jadi segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak itu belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah merupakan sebuah penjabaran dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri berbicara tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam ruangan kelas, dalam sekolah, dan di luar sekolah. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan peserta didik apakah dalam konteks yang lebih sempit atau luas merupakan sebuah elaborasi praksis dari kurikulum. Kurikulum berhubungan dengan segala hal yang bersangkutan paut dengan realitas hidup serta kehidupan peserta didik. Agar kehidupan dan hidup peserta didik dapat sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, maka kurikulum harus mampu mengakomodasi banyak hal yang dibutuhkan dalam pendidikan peserta didiknya. Kurikulum berbicara dan membicarakan segala hal yang mesti dijalani oleh para peserta didiknya ketika mulai bangun hingga tidur dan begitu seterusnya. Totalitas hidup dan kehidupan peserta didik harus mampu masuk dalam kurikulum supaya pendidikan yang mencerdaskan dan memberadabkan kemudian dapat dan mampu ditunaikan dengan sedemikian berhasil. Kurikulum selanjutnya harus mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Itulah yang dinamakan kurikulum sesungguhnya. Ia adalah refleksi dan catatan penting kehidupan serta hidup peserta didik, selanjutnya dikembalikan kepada peserta didik dalam bentuk pendidikan yang membangun.
3. Harold B. Albery cs memandang kurikulum sebagai *all of the activities that are for the students and provided by the school*. Dengan kurikulum, segala kegiatan yang disajikan oleh sekolah diperuntukkan bagi para peserta didik dan tidak diadakan pembatasan antara kegiatan di dalam dan di luar kelas. Sekolah dalam konteks itu benar-benar memberikan ruang seluas-luas dan

selebar-lebarnya bagi aktivitas peserta didiknya untuk dapat belajar serta mempelajari banyak hal. Sekolah membuat jam, ruang, halaman, dan waktu untuk peserta didik untuk dapat belajar seutuhnya karena keberadaan sekolah sebetulnya adalah untuk para peserta didik. Mereka datang ke sekolah untuk belajar. Oleh sebab itu, kurikulum yang dirancang harus mampu memberikan yang terbaik bagi pendidikan peserta didiknya, apakah di dalam sekolah atau pun di luar sekolah.

4. B. Othanel Smith cs. mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak, yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai dengan masyarakatnya. Pengertiannya adalah kurikulum menjadi ruang bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan, menggali dan membangun bakat serta pengalaman baru yang dibutuhkan peserta didik ke depannya. Kurikulum yang sesungguhnya adalah mampu memberikan program-program konstruktif yang bisa mengembangkan potensi serta bakat peserta didiknya agar menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kurikulum menjadi jantung bagi proses pendidikan peserta didik yang selalu mampu melakukan dialektika antara diri dengan realitas lingkungannya. Tentu, kurikulum yang sedemikian mampu lahir ketika banyak program dan agenda pendidikan yang bisa memerdekakan peserta didik dalam belajar. Para peserta didik selalu berpandangan bahwa belajar itu tidak selalu berada dalam ruangan, dalam sekolah namun juga di luar sekolah. Belajar yang sebenarnya mampu dirancang dengan sedemikian bebas dan pendidik menjadi fasilitator terbaik bagi proses pendidikan peserta didiknya.
5. J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller berkata bahwa kurikulum lebih luas dari pada hanya bahan pelajaran, namun juga termasuk metode belajar dan mengajar, cara mengevaluasi kemajuan murid dan seluruh program, perubahan dalam tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah, ruangan serta kemungkinan adanya

pilihan mata pelajaran. Kurikulum adalah sebuah ruang kritis dan transformatif agar peserta didik mampu belajar dengan sedemikian maksimal dan optima.;

6. Alice Miel mengatakan bahwa kurikulum meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Pengertiannya adalah bentuk dan format kurikulum merupakan cerminan kehidupan dan hidup peserta didik dalam sekolah. Bagaimana peserta didik melakukan interaksi dan komunikasi baik antar sesama teman maupun dengan gurunya atau yang lain kemudian dijabarkan dalam kurikulum. Jabaran tersebut kemudian diteruskan dalam sejumlah program yang sangat menentukan proses pembelajaran dalam kelas. Dengan demikian, kurikulum merupakan sebuah refleksi dari kehidupan dan hidup peserta didik dalam segala aktivitas di sekolah.

Dari pelbagai pandangan pakar pendidikan tersebut, kemudian muncul satu benang merah bahwa sesungguhnya kurikulum merupakan suatu usaha, program yang sudah memiliki tujuan dan ditetapkan bersama oleh sejumlah pemangku kepentingan dengan berdasarkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Segala hal yang berada dalam kurikulum sudah ditetapkan bersama dan mengandung seperangkat bahan, alat, evaluasi dan lain seterusnya yang selanjutnya diteruskan dalam sebuah kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kurikulum menetapkan dan memandu segala kegiatan dalam pendidikan peserta didik agar tetap sesuai dengan tujuan bersama di atas segala-galanya. Kurikulum diproyeksikan dalam sebuah rancang bangun yang menitikberatkan kepada sebuah proses pembelajaran yang menyentuh kepada persoalan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Kurikulum telah mempertegas bahwa pendidikan yang digelar harus mampu menyediakan segala kebutuhan dan keperluan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Kurikulum berbunyi tentang segala hal yang penting untuk kemajuan peserta didik dalam segala aspek kehidupan.

Selanjutnya Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi sebagaimana berikut:

1. Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Dialektika teori dari pelbagai pakar kemudian menghasilkan satu gagasan baru yang diharapkan menjadi sebuah kurikulum baru yang lebih baik. Sementara dari hasil penelitian kemudian dapat ditarik satu pemahaman bersama bahwa ternyata ada temuan baru tentang program, strategi, dan lain seterusnya yang dapat diterapkan dalam pendidikan untuk melahirkan sebuah hal baru yang lebih baik bagi dunia pendidikan.
2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum, sebagai suatu ide yang memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Ia mencatat banyak hal yang terkait dengan bagaimana sebuah pelaksanaan pendidikan harus diterapkan dengan sedemikian rupa. Ia mendokumentasikan pelbagai hal yang diperlukan untuk mampu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan peserta didik baik dalam konteks jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Ia berisikan program-program terkait apa saja yang harus digelar dalam kelas.
4. Kurikulum sebagai suatu hasil dari suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Dengan demikian, kurikulum sesungguhnya adalah ia mampu memberikan rangsangan, motivasi, dan pergerakan untuk bisa mendorong peserta didik agar bisa melakukan lompatan-lompatan prestasi.

Atas beberapa pandangan yang dipadu dengan pemahaman awal tentang kurikulum, maka sesungguhnya fungsi kurikulum menjadi sangat signifikan dalam pendidikan. Kurikulum yang sangat baik adalah ketika ia mampu menggerakkan peserta didik untuk dapat berpikir terbuka dan ke depan. Kurikulum membuka pandangan baru terhadap kehidupan dan hidup peserta didik sehingga mereka menjadi mampu berpikir ke depan

dan visioner. Kurikulum yang mampu bervisi ke depan adalah ketika ia mampu memahami kebutuhan dan kepentingan pesera didik baik sebagai pribadi maupun sosial. Kurikulum yang mampu menerjemahkan kebutuhan dan kepentingan peserta didik adalah ketika ia mampu menjadi jembatan bagi peserta didik untuk semakin belajar banyak hal guna mencapai tujuan pendidikan sesungguhnya. Belajar yang sesungguhnya bukanlah mendapatkan angka terbaik di atas kertas, melainkan bagaimana mereka mampu mengerti dan memahami kehidupan serta hidup agar menjadi bermakna bagi dirinya dan lingkungannya.

Dengan demikian, kurikulum ditinjau dari fungsinya sebagai pembentuk kehidupan dan hidup peserta didik kemudian dapat digambarkan sebagai berikut. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi:

1. Fungsi Penyesuaian

Karena individu hidup dalam lingkungan dan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan, sehingga di sinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang *well adjusted*. Kurikulum dalam konteks ini harus mampu membangun kemampuan peserta didik dalam melakukan fleksibilitas. Kurikulum membentuk sikap peserta didik untuk bisa lentur dengan lingkungannya.

2. Fungsi Integrasi

Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.

3. Fungsi Deferensiasi

Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, deferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.

#### 4. Fungsi Persiapan

Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka.

#### 5. Fungsi Pemilihan

Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Pemilihan dalam pendidikan dimaknai bahwa setiap peserta didik belajar untuk memilih. Pasalnya, memilih itu sendiri merupakan dari proses pembelajaran dalam rangka membangun ketegasan dan kecekatan dalam kehidupan dan hidup. Memilih adalah bagian terpenting bagi peserta dalam rangka menggali dan mengembangkan pola hidup yang kokoh dan kuat. Tanpa belajar untuk memilih, peserta didik akan menjadi ragu dan bimbang saat dalam menjalani kehidupan dan hidupnya. Memilih adalah sebuah tahapan untuk bisa menuju satu kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, konteks pelaksanaan kurikulum sesungguhnya berperan penting dalam sebuah pelaksanaan pendidikan yang membebaskan. Kurikulum adalah sebuah bangunan sangat mendasar bagaimana sebuah pembelajaran akan dilaksanakan. Rencana pembelajaran dengan segala perangkat di dalamnya sesungguhnya menjadi sebuah hal niscaya untuk melahirkan praktik pendidikan yang benar-benar dibutuhkan dalam dunia kekinian. Pendidikan adalah sebuah pembebasan bagi kehidupan manusia. Pendidikan adalah sebuah penggerak bagi pembangunan kemanusiaan. Tentu, pelaksanaan pendidikan akan mampu dijalankan dengan sedemikian berhasil ketika didukung oleh adanya sebuah kurikulum yang konstruktif dan dinamis.

Kurikulum menjadi sebuah kerangka berpikir dan bertindak yang akan menjadikan pelaksanaan pendidikan menjadi terarah dengan sedemikian rupa. Kurikulum memberikan arah bagaimana sebuah perjalanan

pendidikan akan ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kurikulum menjadi titik pijak bagaimana sebuah pelaksanaan pendidikan akan dijalankan sesuai dengan visi dan misi yang sudah dipertegas. Sementara Wesley Null mengatakan bahwa kurikulum itu membicarakan sesuatu tentang apa yang harus diajarkan. Kurikulum berkaitan erat dengan bagaimana menggabungkan ide, pemikiran, dan tujuan. Kurikulum juga berbicara tentang substansi apa yang harus disampaikan dalam satu pembelajaran tertentu.<sup>53</sup> Dengan demikian, kurikulum menjadi sebuah ruang bagi implimentasi pendidikan yang sesungguhnya.

Praktik pendidikan yang terarah dan memiliki pijakan adalah ketika ia diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum selalu dan terus menerus menjadi sebuah patokan sangat nyata dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan. Apa pun bentuknya, sebuah pelaksanaan pendidikan yang kemudian dapat mengarahkan sebuah proses pembelajaran yang kondusif adalah ketika ia berada pada panggung yang tepat dan benar. Panggung pendidikan yang tepat adalah ketika ia berada dalam suasana dan keadaa yang sangat kondusif.

Diakui maupun tidak, pendidikan adalah sebuah jalan menuju pencerahan. Pencerahan melalui pendidikan akan tercipta dengan sedemikian rupa ketika ada sebuah pemandu yang memandu penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan adalah sebuah alat membangun kesadaran. Kesadaran melalui pendidikan akan bisa terarah dengan sedemikian maksimal dan optimal ketika berada dalam kerangka sebuah kurikulum yang diciptakan secara konkret dan praksis.

Jauh-jauh hari Mulyasa juga mengungkapkan bahwa kurikulum sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pendidikan sebab kurikulum itu menyangkut persoalan yang terkait dengan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi dasar, dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, masih menurut Mulyasa, kurikulum

---

<sup>53</sup> Wesley Null. *Curriculum: From Theory to Practice*. (United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2011). Hlm. 1-2.

pun mencakup jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang kemudian terjabarkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan.
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, ahlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya serta pendidikan jasmani.
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, olah raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.<sup>54</sup>

### C. Macam Model Konsep Kurikulum

Konsep kurikulum sudah dibahas dalam halaman-halaman selanjutnya namun masih tetap diperlukan untuk memberikan kata pengantar sebelum membicarakan lebih mendetail tentang model konsep kurikulum bahwa secara pengertian harfiah kurikulum itu berbicara tentang perencanaan serta pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Zais selanjutnya mengatakan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari

---

<sup>54</sup> Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. Ke-6. (Bandung: Rosdakarya, 2009). Hal. 46.

dokumen tertulisnya, melainkan dinilai dari proses pelaksanaan fungsinya dalam kelas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional dan beroperasi dalam kelas, menjadi pedoman dan pengatur lingkungan serta kegiatan yang berlangsung dalam kelas.<sup>55</sup>

Oleh karenanya, menjadi penting untuk menawarkan beberapa model konsep kurikulum yang setidaknya bisa menjadi pengantar awal bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat dilakukan bagi para peserta didik:

1) Pendidikan Humanistik

Konsep dasar dalam pendidikan humanistik bersandar kepada aliran pendidikan pribadi (*personalized education*), yakni John Dewey (*Progressive Education*) dan J.J Rousseau (*Romantic Education*). Aliran ini menekankan kepada asumsi bahwa anak didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Anak memiliki potensi dan bakat yang harus dikembangkan. Dalam konsep pendidikan humanis, ia juga berpegang teguh kepada Gestalt bahwa anak merupakan suatu kesatuan menyeluruh. Pendidikan selanjutnya diarahkan kepada pembinaan manusia seutuhnya, bukan semata kepada kemampuan kognitif, namun juga sosial dan afeksi yang mencakup emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain sejenisnya. Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan humanis adalah membangun kesadaran diri anak didik, mengurangi kerenggangan dan keterasingan diri dari lingkungan. Anak didik diminta untuk bisa memahami dirinya terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan humanistik membentuk jati diri anak didik yang bisa berpandangan sangat arif dan bijaksana dalam mencerna realitas kehidupan yang kompleks. Pola berpikir dan bertindak yang dipedomani dengan hati menjadikan setiap apa yang dilakukannya benar-benar diharapkan mampu mengejewantahkan semangat keberkehidupan yang damai dan mendamaikan. Pendidikan humanistik kemudian meneguhkan diri pada pembangunan

---

<sup>55</sup> Robert S. Zais. *Curriculum Principles and Foundations*. (New York: Harper & Row Publisher, 1976).

kehidupan anak didik yang selalu mawas diri dan lebih menggunakan perasaan dalam setiap menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri-ciri mendasar dalam pendidikan humanis, yakni (1) adanya partisipasi dimana anak didik dituntut mengadakan perundingan, persetujuan, pertukaran kemampuan, bertanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut tentunya memperlihatkan bahwa anak didik diminta untuk demokratis dalam hidup dan kehidupan, (2) integrasi dimana dalam setiap kegiatan yang dilakukan anak didik harus terjadi interaksi, interpenetrasi, integrasi dari pemikiran, perasaan dan tindakan, (3) relevansi yang berarti bahwa isi atau muatan dalam pendidikan harus memiliki korelasi langsung dengan kehidupan anak didik yang paling dekat, (4) pribadi anak yang bermakna bahwa pendidikan sesungguhnya harus memberi tempat utama pada pribadi pengembangan diri, aktualisasi diri anak, dan kemudian mampu menempa pribadi anak menjadi sosok yang damai, (4) tujuan yang berarti bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan harus utuh dalam rangka pengembangan diri anak didik baik secara fisik maupun psikis. Tujuan yang dicapai dalam pendidikan humanistik bukan semata menekankan keberhasilan kognitif, namun juga mampu mengembangkan sikap sosial anak didik agar ia mampu bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungannya.

## 2) Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum ini berangkat dari titik tolak pemusatan kepada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Pandangan ini dimulai sekitar tahun 1920-an sebagaimana yang disampaikan Harold Rug dengan melihat dan menyadari kawan-kawannya bahwa selama ini sedang terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia kemudian menghendaki agar para peserta didik bukan semata dicekoki oleh teori-teori yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang benar harus diawali dari persoalan-persoalan yang sedang

terjadi dalam kehidupan sosial. Tujuan pendidikan adalah menyadarkan manusia dari yang sebelumnya tidak sadar. Tentu, ketika manusia dihadapkan dengan persoalan-persoalan, ia pun akan menjadi sadar bahwa dirinya sedang dikelilingi pelbagai persoalan sehingga dari situlah manusia menjadi sadar untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik. Theodore Brameld pun juga menegaskan di tahun 1950-an bahwa dalam masyarakat demokrasi masyarakat dituntut bekerja bersama dalam mengawal pembaharuan kehidupan masyarakat. Sekolah pun menjadi ruang penting yang harus bekerja dalam rangka pembaharuan kehidupan berpikir masyarakat. Dengan demikian, sekolah bukan hanya membantu individu atau anak didik dalam rangka mengembangkan kemampuan sosialnya, melainkan dapat membantu anak didik bagaimana mereka mampu berpartisipasi sebaik mungkin dalam kegiatan sosial. Pembaharuan dalam kehidupan masyarakat ketika dihubungkan dengan sekolah tentu memiliki makna bahwa sekolah berperan cukup strategis bagaimana membangun serta membentuk cara berpikir anak didik yang diwarnai dengan kebaruan. Kebaruan dalam konteks ini adalah sesuatu yang membawa sebuah hal baru. Sesuatu hal adalah sesuatu yang kemudian mampu menggerakkan anak didik berpikir di luar kotak yang pada umumnya orang berpikir. Mereka mencari pola dan rumusan baru bagaimana seharusnya bertindak dalam membaca kehidupan sosial secara kritis. Ada beberapa ciri penting yang selanjutnya penting diketahui terkait kurikulum rekonstruksi sosial, yakni (1) asumsi dimana ini ditujukan agar para siswa dihadapkan kepada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Dengan berasumsi, anak didik kemudian memiliki pandangan dan gambaran awal apa yang sekiranya akan terjadi dalam kehidupannya, (2) masalah-masalah sosial yang mendesak dimana ini dimaksudkan bahwa dengan mengetahui masalah-masalah mendesak yang harus segera dituntaskan, maka anak didik kemudian mampu lebih responsif dalam membaca

kehidupan. Dengan belajar membaca sesuatu secara responsif, ini diharapkan melahirkan cara pandang kritis, (3) pola-pola organisasi dimana ini menegaskan bahwa dalam melakukan pendidikan perlu dirumuskan core atau masalah inti dari sekian masalah yang ada agar kemudian ditemukan inti dari persoalan yang sesungguhnya. Dari pemetaan seperti itulah, anak didik kemudian diharapkan mampu lebih terorganisir dalam membaca dan menganalisis serta mengambil tindakan pemecahan permasalahan.<sup>56</sup>

#### D. Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Korupsi dengan segala anak pinaknya sudah semakin menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah melumpuhkan roda perjalanan republik tercinta. Di segala lini birokrasi, para pejabat menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sehingga di sinilah titik terendah dari kian kecilnya kemajuan bangsa tercinta ini. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa besar dan maju ke depan, sementara isi kantongnya dikosongkan oleh mereka yang tidak berhati nurani kemanusiaan sama sekali. Mereka sebatas berpikiran kerdil dan sempit. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menyenangkan diri sendiri dan golongan. Kondisi ironis tersebut semakin memberikan sebuah ilustrasi tak terbantahkan bahwa ternyata korupsi dengan para pelakunya sudah mematahkan semangat bangsa untuk mampu menjadi beradab, bermartabat, dan berkualitas.

Pertanyaannya adalah mengapa para pelaku korupsi yang konon sudah berpendidikan serta dipercaya mengemban amanat rakyat kemudian tidak bisa menjalankan tanggung jawab sekaligus tugasnya secara tepat sasaran? Memang, kita semua mungkin akan berpikir cukup keras, ada apakah dengan para pejabat kita di negeri tercinta ini. Padahal kebanyakan dari mereka sudah berpendidikan tinggi. Segala fasilitas serta gaji sekaligus tunjangan pun sudah disediakan oleh rakyat yang diambil dari kas negara

---

<sup>56</sup> Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. Ke-6. (Bandung: Rosdakarya, 2009). Hal. 86-92.

namun mengapa mereka tidak bisa bekerja dengan penuh pengabdian tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Tentu, dengan segala kemampuan dan kepemilikan yang dimilikinya tersebut, mereka seharusnya akan lebih bertanggung jawab atas segala bentuk kepercayaan politik rakyat yang dipundakkan kepadanya.

Sangat sederhana untuk menjawab kondisi pejabat saat ini. Pertama, ternyata pendidikan yang mereka tempuh belum mampu membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang bersentuhan dengan realitas sesungguhnya. Kebanyakan pejabat kita hanya mampu menguasai teori namun tidak bisa melaksanakannya di ranah realitas. Paulo Freire mengatakan bahwa manusia yang hanya mampu melihat keadaan yang rusak namun tidak mampu memecahkan serta memberikan solusi terhadap keadaan sedemikian disebut pendidikan naif. Kesadaran kehidupan yang dibangun dan dijalankan tidak berdampak sangat konkret dan praksis terhadap kenyataan kehidupan sesungguhnya sehingga di sinilah sebuah bentuk kegagalan pendidikan.<sup>57</sup>

Kedua, pendidikan adalah sebuah penyadaran manusia dalam arti sesungguhnya, menurut Romo Mangunwijaya. Disebut berpendidikan ketika manusia mampu memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi dalam membangun sebuah kehidupan yang beradab dan berperadaban sangat tinggi, mengutip pendapat Driyarkara. Disebut berpendidikan ketika ada sebuah perubahan sikap dan pikir yang sebelumnya sangat destruktif menuju konstruktif, dari teoritis menuju praktis-konkret, dari tertutup menuju terbuka, dan dari elitis menuju populis. Sepertinya, para pejabat yang sedang mengelola negeri ini tidak memiliki cara pandang dan cara sikap sedemikian sehingga apa yang dikerjakannya melenceng dari tanggung jawab dan mandat dari rakyat. Seharusnya, mereka bekerja dengan sepenuh hati demi melayani hajat hidup orang banyak, para pejabat kemudian mencampakkan amanat suci tersebut ke tong-tong sampah, dan selanjutnya menjadi pembunuh bagi kehidupan rakyatnya. Menjadi pejabat yang berhati kemanusiaan dan kerakyatan sudah ibarat menegakkan

---

<sup>57</sup> Paulo Friere. *Pedagogy of the Oppressed*. (Harmondsworth: Penguin, 1982).

benang basah. Yang terjadi selanjutnya adalah kian menjungkalkan kehidupan rakyat ke jurang kenestapaan dan kemelaran hidup antah berantah.

Tentu, menyelamatkan generasi bangsa merupakan sebuah harga mati. Kita semua yang masih memiliki cita-cita mulia serta nurani tentu berpandangan serta berharap bahwa generasi bangsa ke depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau mungkin di era kepemimpinan selanjutnya perlu mendapatkan pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus menjadi sebuah bagian dari pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Bentuk praksis pelaksanaan pendidikan anti-korupsi kemudian bisa dimasukkan dalam kurikulum dan turunannya adalah berbentuk silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam kelas. Mata pelajaran dan mata kuliah apakah yang bisa dimasukkan pendidikan anti-korupsi, maka baik pelajaran atau mata kuliah sosial dan berhitung sama-sama punya peluang menjadi bagian dari pendidikan anti-korupsi.

Untuk mata pelajaran atau mata kuliah sosial, dampak korupsi terhadap kepentingan bersama bisa dijelaskan dan menjadi pembahasan bersama. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah berhitung, kerugian ekonomi tentu bisa menjadi pembahasan utama. Oleh sebab itu, ketika pendidikan anti-korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil dalam lembaga pendidikan, maka mulai dari miniatur kehidupan yang bernama sekolah, generasi bangsa ke depan akan menjadi manusia-manusia yang akan steril dari kepentingan-kepentingan sektoral. Generasi bangsa bisa lebih bersih dan mempunyai semangat dalam bekerja dengan penuh kejujuran. Apalagi, contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi kemudian menjadi pembahasan di ruangan kelas, maka pembelajaran dalam kelas semakin menarik dan menantang sehingga para anak didik akan kian antusias dalam mengikuti pelajaran. Para anak didik akan lebih cepat memahami apa itu korupsi dan koruptor itu sesungguhnya. Contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi dimaknai sebagai bahan renungan

bersama, terutama bagi para anak didik agar mereka jangan seperti para pejabat koruptif apabila suatu saat memimpin negeri tercinta ini. Mereka tentunya harus menjadi manusia-manusia yang berhati mulia dan bersedia menjadi “pemimpin amanah” apabila kelak mengelola republik ini.

Namun tanpa disadari pula, pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan di sekolah juga membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Guru atau dosen dalam konteks ini juga harus menunjukkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejujuran dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada semua anak didiknya. Guru menjadi inspirasi yang akan membangkitkan kesadaran diri anak didik untuk meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya. Memberikan sebuah potret kehidupan yang asli dan bukan direkayasa dari guru atau dosen kepada anak didiknya merupakan sebuah hal niscaya.

Dengan demikian, ada beberapa bagian penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi:

1. Bahan Ajar yang Membangun Rasa Takut terhadap Korupsi

Dalam bahan ajar semacam ini, diperlukan materi-materi pokok yang menggambarkan bagaimana hebatnya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah contoh kemiskinan dan rakyat miskin di sejumlah tempat akibat terabaikannya oleh pejabat negara kemudian perlu diperlihatkan secara nyata. Hal tersebut setidaknya menjadi pelajaran sangat berharga bahwa berkorupsi sesungguhnya ikut menelantarkan jutaan rakyat dan sama halnya tidak memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kemiskinan lahir bukan karena tanpa sebab, akan tetapi akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada kualitas rakyat. Bahkan, materi dalam bahan ajar tersebut pun juga dimasukkan sejumlah nama mantan pejabat atau pejabat yang sudah menjadi terdakwa dalam korupsi tertentu serta hukuman yang diperoleh dari pengadilan. Akibat berkorupsi, mereka harus mendapatkan sanksi hukum yuridis formal serta di depan seluruh masyarakat mendapatkan stempel sebagai manusia yang cacat secara sosial.

Stigma buruk ini menjadi beban dan sanksi sosial. Ketika ini dikaitkan dengan peserta didik sebagai generasi bangsa, mereka setidaknya sudah memperoleh materi tentang begitu buruknya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Pembelajaran yang Membentuk Mentalitas Antikorupsi  
Memang, tujuan dalam pembelajaran ini sangat abstrak sebab hanya termuat dalam kata-kata yang tercantum dalam tujuan pembelajaran. Namun sesungguhnya kalau dicermati secara lebih seksama, maka yang dimaksud dengan mentalitas antikorupsi adalah bagaimana kelas sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran bisa menggerakkan anak didik untuk memiliki semangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Tujuan yang abstrak tersebut akan menjadi sangat implimentatif ketika dibarengi dengan kelincahan pengajar dalam melakukan proses pembelajaran. Menilai apakah seseorang memiliki mental antikorupsi memang merupakan sebuah pekerjaan berat sebab kita tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki mental antikorupsi atautkah tidak. Namun terlepas dari hal tersebut, pembangunan mentalitas berkelindan erat dengan pembangunan komitmen dan keinginan diri untuk berkata tidak kepada korupsi. Komitmen dan keinginan kemudian akan bisa terbentuk dalam kehidupan anak didik ketika guru mampu melakukan internalisasi nilai-nilai antikoruptif kepada anak didiknya. Bagaimana cara melakukannya, ini selanjutnya berkenaan dengan kemampuan diri guru dalam mengelola kelas dan menyentuh rasa serta karsa diri setiap anak didiknya untuk memahami sekaligus merasakan apa itu korupsi dengan segala efek buruknya bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya.
3. Media dan Strategi yang Digunakan  
Berbicara tentang pemberantasan korupsi dengan menjadikan pendidikan sebagai langkah pemberantasannya memerlukan media dan strategi yang aplikatif. Media berkenaan dengan kemampuan guru untuk menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana para aktor

korupsi kemudian berbuat, ternyata membuat rakyat banyak menderita. Fungsi media dalam pendidikan antikorupsi adalah untuk mampu menerjemahkan apa yang dimaksud dalam tujuan pendidikan antikorupsi. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa media sangat mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi. Sementara strategi berbicara tentang langkah apa yang bisa digunakan untuk menjadikan anak didik bisa menyadari tentang buruknya korupsi bagi hajat hidup orang banyak sangat diperlukan. Strategi dalam menjelaskan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk kian mempermudah anak didik dalam memahami korupsi itu sendiri sebagai penyakit bagi kehidupan rakyat.

Membaca beberapa poin di atas, sesungguhnya kurikulum dalam pendidikan antikorupsi sudah saatnya dimasukkan di sekolah-sekolah, termasuk perguruan tinggi.<sup>58</sup> Dengan demikian, model kurikulum pendidikan antikorupsi yang mesti segera dilaksanakan adalah bagaimana proses pembelajaran mulai dari awal membuka, saat pembelajaran sedang berlangsung dan selanjutnya berakhir mampu dihidupkan dengan semangat membangun moral antikorupsi. Suka atau tidak suka, kurikulum itu berkaitan erat dengan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan membangun suasana kelas serta pembelajaran yang hidup. Kurikulum menjadi piranti lunak dalam memperlancar proses pembelajaran. Sementara pendidikan antikorupsi bagian integral dari pembangunan moralitas anak bangsa. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan antikorupsi sesungguhnya perlu ditempatkan sebagai langkah nyata membangun kehidupan anak didik yang bersih dari praktik-praktik destruktif dan anarkis.

Berikut ini merupakan contoh pendidikan antikorupsi model pendidikan sekolah (*school education*) dengan pelbagai variasi pada tingkat pendidikan, jenis aktivitas di dalam dan luar sekolah, inisiator program pendidikan, termasuk ada tidaknya keterlibatan pemerintah, juga memperlihatkan bagaimana sejumlah negara mendesain pendidikan antikorupsinya, dan sejumlah negara lain yang sudah lebih maju:

---

<sup>58</sup> Muhammad Sholikin. *Filsafat dan Metafisika dalam Islam*. (Yogyakarta: NARASI, 2008).

1. Nigeria

Tidak adanya kemajuan dalam memberantas endemi korupsi yang seharusnya dilakukan oleh *Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC)* maupun lembaga antikorupsi di Nigeria akhirnya mendorong pemerintah untuk menggulirkan upaya terakhir, yaitu pendidikan antikorupsi. Pemerintah negara Afrika kedua paling korup di dunia versi Transparency International (TI) ini kemudian membentuk sebuah tim ahli khusus untuk merancang kurikulum pendidikan antikorupsi sebelum mulai diperkenalkan ke semua sekolah dan universitas negeri di Nigeria (BBC News 22 Juni 2004).

2. Vietnam

*The Government Inspection Agency* pada tahun 2007 menyusun proyek untuk mengintegrasikan pelajaran-pelajaran antikorupsi ke dalam silabus pendidikan di Vietnam. Sebagaimana umumnya dialami oleh pendidikan antikorupsi di negara lain, perjalanan menuju pelaksanaan proyek ini diwarnai dinamika perdebatan atas sejumlah isu. Di antaranya adalah apakah posisi pendidikan antikorupsi menjadi pelajaran terpisah atau merupakan bagian dari pelajaran *Marxism-Leninism Philosophy dan Communist Party History*.

3. Kazakhstan

Mata kuliah "*Preventing Corruption*" sejak tahun 2002 dikoordinasi oleh TI Kazakhstan. Hasilnya adalah munculnya permintaan dari 20 universitas untuk menyelenggarakan kuliah sejenis di tempat mereka. Buku teks ditulis dalam bahasa Russian dan Kazakhstan dan menjadi mata kuliah. Di antaranya bagi mahasiswa Ekonomi dan Hukum. *Civic Foundation Transparency Kazakhstan* dengan dukungan *United States Agency for International Development (USAID)* pada 2003 telah menghasilkan *Educational Anti-Corruption Programme* bagi mahasiswa tahun ke-3 dan tahun ke-4 melalui mata kuliah *Basic of Resistance to Corruption*.

4. Australia

*New South Wales Independent Commission Against Corruption* memperpraktisai mata kuliah *Corruption and Anti-Corruption* yang diajarkan sejak tahun 1998 di *Asia Pacific School of Economics and Government*. Mata kuliah ini merupakan kerjasama kedua institusi di bawah konsultasi *Transparency International* setempat.

5. Hungaria

Mata kuliah *Strategic Corruption Control and Organizational Integrity* diselenggarakan di *Central European University* bekerjasama dengan *TIRI Network*, London dan *the Center for Policies Studies*, CEU, Budapest. Partisipan adalah para praktisi dan akademisi yang mengembangkan kursus sama di universitasnya. CEU dan *TIRI* mengembangkan *Public Integrity Education Network* yang berhasil mendorong lebih dari 20 universitas terkemuka untuk mengembangkan *joint curricula*, silabus, materi pengajaran, dan studi kasus.

6. Amerika Serikat

Salah satu universitas di Amerika Serikat yang menggarisbawahi problem akut korupsi di negara berkembang adalah *Georgetown University*. Melalui mata kuliah *corruption in developing countries*, fenomena korupsi di negara-negara berkembang, faktor-faktor penyebabnya, hingga konsekwensinya bagi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara disoroti, dengan penekanan khusus pada peranan *public managers* yang telah dan bisa dimainkan dalam upaya mereduksi ruang lingkup ataupun intensitas korupsi.<sup>59</sup>

Membaca sejumlah negara dengan pelbagai cara dan pendekatan masing-masing dalam menjadikan antikorupsi sebagai bagian terpenting dari pendidikan, maka ini semakin mempertegas bahwa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi kemudian menjadi sebuah harga mati. Memasukkan nilai-nilai positif dan konstruktif dalam pendidikan antikorupsi merupakan

---

<sup>59</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Gramedia, 2009). Hlm. 933-940.

sebuah hal niscaya. Pendidikan nilai selanjutnya merupakan sebuah harga mati yang mesti disisipkan dalam pendidikan antikorupsi sebab pendidikan yang membawa perubahan adalah pendidikan yang memiliki nilai. Tentu, ketika pendidikan nilai dihubungkan dengan pemberantasan korupsi, maka hal tersebut memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan.

Oleh karenanya, pendidikan nilai adalah proses bimbingan melalui pendidikan suritauladan yang berorientasi kepada penanaman nilai kehidupan dan di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Sangat menarik ketika pola pembelajaran yang dilakukan dalam rangka membelajarkan siswa terhadap anti-korupsi menggunakan pendekatan pendidikan "hadap masalah" (problem posing of education) sebagaimana yang disampaikan Paulo Friere. Berikut ini tahapan pendekatan yang digunakan Freire sebelum menuju hadap masalah atau pendidikan kritis yang kemudian berakhir dengan konsientisasi:

a. Berpikir Magis

Manusia sesungguhnya ketika belum dipengaruhi oleh lingkungan dengan tingkat pendidikan yang merubah kesadaran akan selalu berpikir magis. Pengertiannya adalah orang akan selalu berpandangan bahwa segala hal yang terjadi dalam lingkungan sekitar apakah itu baik dan buruk sudah ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan manusia yang terus menerus miskin dan sangat papa adalah sesuatu yang *given*. Pemerintahan yang koruptif pun sudah bagian dari skenario Tuhan. Tidak pernah ada kesadaran sama sekali untuk berpikir dari pola magis. Semuanya sudah tak perlu dibantah. Rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan para pejabatnya kemudian kaya raya dengan menggarong uang rakyat memang sudah sedemikian ketentuan yang sudah ada.

b. Berpikir Naif

Berbeda dengan berpikir magis, maka berpikir naif mengandaikan bahwa setiap manusia sebetulnya sudah sangat mengetahui bahwa

ketimpangan sosial yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada kepentingan bersama di atas segala-galanya. Kehidupan rakyat yang berkubang dengan kemiskinan adalah bagian tak terpisahkan dari deretan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun kendatipun manusia (rakyat) sudah mengetahui itu, mereka tidak melakukan usaha apa-apa untuk bisa merubah keadaan. Mereka tidak memedulikan sama sekali. Mereka juga tidak memiliki keinginan dan rasa ingin berbuat sesuatu bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Ketika keadaan ini dihubungkan dengan berpikir naif, maka manusia yang serba tidak mau tahu walaupun sesungguhnya tahu kemudian dinamakan berpikir naif.

c. Berpikir kritis

Lingkungan yang hancur lebur akibat kebijakan pemerintah mengandaikan setiap orang bukan hanya mengetahui sebuah persoalan yang sedang dihadapi. Ini menuntut setiap orang, termasuk para anak didik berpikir secara kritis, mengapa persoalan tersebut muncul dan apa yang mendasari kemunculannya. Proses berpikir yang cukup panjang dengan sangat dialektis mengandaikan setiap orang dan para anak didik untuk kemudian menyadari bahwa tersebut sudah merugikan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Kebijakan yang sudah memporak-porandakan kehidupan sosial mengindikasikan bahwa ada yang salah dalam kehidupan saat ini. Konsientisasi sebagai akhir dari berpikir kritis mendorong kita semua untuk menjadi sangat menyadari benar-benar bahwa kita perlu dan harus mencari akar dari akar persoalan sesungguhnya. Oleh sebab itu, paradigma konsientisasi sesungguhnya berusaha menyadarkan diri kita untuk kemudian bukan hanya mengetahui persoalan tersebut, menganalisis persoalan tersebut, memetakan persoalan tersebut dan begitu seterusnya. Lebih dari itu adalah menjadi sangat diperlukan untuk segera memberikan jawaban-jawaban atas

persoalan-persoalan yang sudah bermunculan itu. Diakui maupun tidak, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia kemudian dimaknai bahwa disebut manusia ketika ia benar-benar sadar tentang posisi dirinya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagai makhluk sosial yang tentu harus mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan.<sup>60</sup>

Membaca sejumlah pandangan di atas, maka pola pemberantasan korupsi lewat pendidikan menjadi sebuah hal niscaya. Pembangunan nalar kritis anak didik yang disertai dengan keterbentukan hati agar kokoh terhadap segala godaan destruktif sekaligus anarkis menjadi sebuah langkah sangat tepat dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi yang dikerangkakan dengan sedemikian rupa dengan berbasiskan pada pembentukan mentalitas setidaknya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan.

---

<sup>60</sup> Paulo Freire. *Education for Critical Consciousness*. (New York: Continuum, 1981).

## BAB IV

### GERAKAN KOLEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI

Gerakan kolektif pemberantasan korupsi harus menjadi penggerak bersama dalam membangun bangsa yang steril dari para perampok uang rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerakan itu berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam konteks untuk terus maju. Dengan kata lain, gerakan merupakan wajah dari perbuatan atau keadaan bergerak baik air, laut, maupun mesin. Ia juga menjadi usaha dan kegiatan kelompok sosial.<sup>61</sup> Ketika gerakan itu sendiri dikaitkan dengan kolektif, maka kolektif itu sendiri juga dapat ditelusuri dari KBBI yang menyebutkan bahwa ia terkait dengan secara bersama atau secara gabungan.<sup>62</sup> Dengan demikian, gerakan kolektif adalah sebuah usaha sadar dalam rangka membangun keinginan bersama untuk mewujudkan sebuah impian. Gerakan kolektif berdasarkan kepada harapan bersama untuk bisa bekerja demi sebuah tujuan mulia.

Gerakan kolektif berkenaan dengan kerja-kerja yang bergerak untuk menggerakkan dan gerakan itu sendiri harus dimulai dari semangat kebersamaan sebab kunci dari gerakan berbasis kepada kolektivitas. Kolektivitas, dengan demikian, menjadi unsur utama dalam setiap pembangunan gerakan. Gerakan kolektif sama dengan koleksi dari gerakan-gerakan personal. Gerakan personal yang berbentuk usaha dan kemauan kemudian dikoleksi menjadi setumpuk gerakan baru dan ini yang selanjutnya disebut gerakan bersama. Gorektif kolektif, dengan demikian, merupakan tumpukan banyak gerakan pribadi ke pribadi yang diwujudkan dalam konteks menyatukan semangat dan komitmen dalam satu tujuan, yakni kepentingan bersama. Gerakan kolektif bermakna untuk semua dari semua. Gerakan kolektif dilahirkan dari gerakan-gerakan personal dalam rangka melahirkan kerja kolektif, yang selanjutnya didarmabaktikan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Gerakan kolektif adalah untuk semua dan sesama. Oleh sebab itu, dalam konteks pemberantasan korupsi,

---

<sup>61</sup> <http://kbbi.web.id/gerak>, diakses tanggal 21 Juni 2014.

<sup>62</sup> <http://kbbi.web.id/kolektif>, diakses tanggal 21 Juni 2014.

gerakan kolektif dapat dimaknai sebagai bentuk kebersamaan dari gerakan pribadi ke pribadi untuk bisa melawan korupsi.

Pemberantasan korupsi dalam konteks gerakan kolektif adalah sebuah usaha sadar kolektif untuk bersama memikirkan persoalan-persoalan korupsi. Kesadaran kolektif dalam pemberantasan korupsi terjadi akibat kejadian gerakan kolektif. Dengan kata lain, tidak akan ada yang bernama kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi apabila tidak ada gerakan kolektif. Oleh karenanya, kunci sebuah gerakan kolektif berjalan kelindan dengan kesadaran kolektif itu sendiri. Menurut Durkheim, kesadaran kolektif merupakan seluruh kepercayaan dan perasaan bersama kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat yang membentuk suatu sistem tetap yang memiliki kehidupan sendiri. Dengan demikian, dalam kesadaran kolektif sebagaimana yang dimaksud oleh Durkheim, maka ini berkaitan dengan kepercayaan dan sentimen kelompok yang ada dalam masyarakat, menjadi fakta sosial tersendiri, dan terwujud dalam kesadaran-kesadaran individual.<sup>63</sup>

Ketika kesadaran kolektif tersebut ditarik dalam konteks pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya mengapa perlu ada gerakan kolektif pemberantasan korupsi, ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat secara bersama untuk membunuh korupsi yang selama ini sudah menjadi penyakit kronis sekaligus mematikan. Korupsi telah melahirkan banyak bencana sosial yang selanjutnya menghambat tujuan pembangunan kemanusiaan. Korupsi telah menceraikan harmoni sosial sehingga terjadi kerusakan hidup serta kehidupan. Kunci awal dan mendasar dari kesadaran kolektif terkait pemberantasan korupsi adalah karena masyarakat sudah menyadari bahwa masyarakat tidak bisa maju dan mengalami kemajuan akibat korupsi yang memiskinkan masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat sedemikian kemudian menjadi dasar terbentuknya keinginan kolektif untuk bisa keluar dari karut marut korupsi yang sangat buruk dan mematikan.

---

<sup>63</sup> Doyle P Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. (Jakarta: Gramedia, 1988) dan George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Jilid 6. (Bantul: Kreasi Wacana, 2011).

Sementara dalam teori lain menyebutkan bahwa kesadaran kolektif sama dengan memori kolektif. Memori kolektif berhubungan dengan *sharing of experience*, merasakan pengalaman yang sama. Memori kolektif menjadi sebuah usaha bersama untuk melakukan design tindakan publik. Memori kolektif berada dalam subyektivitas anggota masyarakat dan merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan design publik sebuah masyarakat. Ia dapat disebut sebagai potensialitas-potensialitas dalam diri pribadi setiap individu untuk mengaktualisasikan penghayatan makna masyarakat. Oleh karenanya, memori kolektif menggenggam makna kolektif atas sebuah peristiwa. Oleh karena, makna kolektif berperan dalam menjaga keutuhan sebuah masyarakat. Ia menjadi simpul yang memungkinkan keutuhan masyarakat akibat berasal dari identitas yang sama.<sup>64</sup> Tatkala masyarakat kemudian memiliki makna kolektif dalam ruang-ruang kesadarannya, maka ini memerlukan penghayatan. Penghayatan dalam konteks ini bermakna untuk melakukan internalisasi kesadaran agar kemudian menjadi bagian dari kehidupan dalam praksis. Dalam rangka semakin menguatkan akar kemunculan kesadaran kolektif, ada baiknya beberapa hal mendasar terkait kemunculan kesadaran perlu diuraikan secara lebih mendalam:

1. Bangkit dari keterpurukan

Kesadaran adalah sebuah hal niscaya. Kesadaran tentunya muncul saat sedang terjadi persoalan yang sangat akut dan berpandangan bahwa adalah mustahil untuk selalu berada dalam persoalan yang berlarut-larut. Dengan kata lain, kondisi terpuruk akan menjadikan diri untuk bangkit. Kondisi yang terpental dari sekitar akan melahirkan keinginan untuk bangkit. Dengan kondisi demikian, akar kesadaran dapat ditelisik dari kesadaran atas kenyataan diri yang sedang terpuruk. Oleh karenanya, kesadaran kolektif muncul akibat keterpurukan.

2. Komitmen untuk maju

Komitmen untuk maju adalah langkah nyata. Komitmen adalah bentuk panggilan hati nurani untuk kemudian melakukan

---

<sup>64</sup> Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Eds). *Teori-Teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005). Hlm. 104-105.

pembangkitan niatan. Oleh karenanya, kesadaran lahir karena adanya komitmen yang mendorong untuk maju.

### 3. Realitas kejumudan

Realitas jumud adalah ekspresi dari kondisi yang tidak berubah dari fase ke fase. Jumud menggambarkan keadaan yang terus terjebak dalam keadaan yang tidak bisa keluar dari kekalutan. Keadaan sedemikian ini jika terus berlangsung akan melahirkan labilitas. Bagi mereka yang ingin bangkit, maka realitas kejumudan kemudian menjadi penggerak untuk bisa melahirkan kesadaran. Kesadaran dalam konteks ini adalah bagaimana kondisi jumud bisa diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga segala bentuk kekacauan dapat dicari akar masalahnya. Di sinilah yang kemudian disebut sebagai kemunculan kesadaran. Kesadaran adalah bentuk gerakan yang muncul karena harus menjawab persoalan-persoalan.

### 4. Mimpi menjadi bangsa besar

Setiap bangsa yang ingin maju tentu memiliki mimpi besar, yakni dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Bangsa besar, oleh karenanya, adalah keadaan dimana rakyat menjadi cerdas dan melek terhadap pelbagai kehidupan yang mengelilinginya. Tentunya, dengan kesadaran yang tinggi, ini akan menjadikan bangsa menjadi besar. Ketika dihubungkan dengan kemunculan kesadaran kolektif, ini selanjutnya memberikan sebuah penegasan bahwa sesungguhnya kita akan mampu melepaskan dari tindakan korupsi dan kemudian mampu menjadi bangsa besar tatkala memiliki mimpi besar. Mimpi besar tersebut berjalinkelindan dengan apa yang terbaik bagi masa depan bangsa dan rakyat.

Menurut Ferdinand Toennies sebagaimana yang dikutip oleh Bagja Waluya, kesadaran kolektif sesungguhnya muncul akibat adanya ikatan hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal yang kemudian dinamakan *gemeinschaft* atau *paguyuban*.<sup>65</sup> Dalam konteks kesadaran kolektif seperti ini, masyarakat diikat atas nama kebersamaan yang memang lahir dan

---

<sup>65</sup> Bagja Waluya. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Tengah Masyarakat*. (Jakarta: PT Setia Purna Inves, 2007). Hlm. 103.

dilahirkan atas nama jangka panjang. Tatkala sebuah kelompok masyarakat berinteraksi, tidak ada interaksi yang berbungkus kepentingan tertentu. Tak ada kepentingan tertentu, selain untuk memupuk kebersamaan. Tatkala kesadaran kolektif ini dikaitkan dengan tindak pemberantasan korupsi, maka masyarakat sesungguhnya memiliki keinginan besar dan bersama dalam konteks pemberantasan korupsi. Pasalnya, yang ada dalam benak masyarakat adalah bagaimana korupsi yang selama ini merugikan hajat hidup orang banyak kemudian dibunuh dengan sedemikian rupa.

Atas nama ikatan nilai yang luhur untuk membangun bangsa yang bermartabat dan beradab, maka semuanya berkumpul dan mendeklarasikan diri untuk memberantas korupsi. Atas nama kepentingan bersama untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara, kesadaran kolektif yang diikat oleh semangat kolektif kemudian bangkit dan menjadi sandaran dalam bergerak serta menggerakkan agenda pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, sebenarnya kesadaran kolektif selalu kait mengkait dengan kesadaran alamiah setiap anggota masyarakat atas sebuah terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang bersih dari segala bentuk yang kotor dan najis. Kesadaran kolektif yang memang muncul dari tujuan yang baik adalah berfungsi untuk memayungi semua anggota masyarakat untuk bisa bekerja dan bergabung dalam pencapaian tujuan yang baik dan mulia.

Kesadaran kolektif memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghimpun energi-energi personal menjadi energi kolektif yang bisa digunakan untuk memunculkan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif, baik disadari maupun tidak, adalah cermin dari kerja kebaikan dan kebajikan untuk mencapai pembangunan kehidupan yang lebih bermakna dan lebih baik ke depannya. Kesadaran kolektif menjadi magnet untuk bisa melakukan kerja-kerja bersama untuk kemudian melahirkan hasil-hasil yang dilahirkan dari kerja bersama. Kesadaran kolektif, dengan demikian, merupakan sebuah penggerak progresif agar setiap anggota masyarakat dapat menyamakan persepsi dan pandangan atas sesuatu hal yang akan dilakukan dalam konteks tujuan tunggal: bangsa dan semua. Kesadaran kolektif menjadi *trigger* agar melahirkan kerja-kerja kolektif yang kemudian

melahirkan hasil yang maksimal dan optimal. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kesadaran kolektif sangat dibutuhkan masyarakat.

#### A. Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi adalah harga mati yang harus disampaikan kepada semua. Dengan mendapatkan pendidikan antikorupsi, ini diharapkan dapat membuka pandangan dan pikiran baru bahwa sesungguhnya tindakan korupsi sangat merugikan hajat hidup orang banyak. Tindakan korupsi menyebabkan uang negara masuk ke kantong-kantong pribadi dan golongan. Tentunya, persoalan tindakan korupsi yang sudah semakin membabitkan serta masif di banyak tempat sudah melahirkan pesimisme bangsa untuk menuju bangsa yang beradab dan maju. Tindakan korupsi telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun kemudian sudah teracuni pengaruh korupsi sehingga masyarakat pun cenderung menjadi jamak untuk ikut-ikutan melakukan tindakan korupsi walaupun itu dalam jumlah yang kecil. Persoalannya adalah kendatipun jumlahnya kecil, ini akan meningkat kepada jumlah yang sedang dan besar sehingga kondisi ini juga merupakan sebuah kebiasaan yang amat buruk dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi walaupun dikerjakan dengan jumlah tidak seberapa sesungguhnya telah membuat masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Diakui maupun tidak, korupsi dapat disebut sebagai tindakan tidak bermoral sebab sudah membohongi kepentingan publik. Tindakan tidak bermoral tersebut sesungguhnya kemudian mengilustrasikan bahwa sudah tidak ada yang bisa diharapkan dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, ada baiknya perlu internalisasi pendidikan antikorupsi di banyak lini kehidupan sosial sebagai antisipasi untuk mengurangi kebiasaan dan pikiran buruk dalam masyarakat bahwa korupsi mempercepat diri menjadi kaya. Berikut di bawah ini adalah beberapa cakupan area yang perlu dimasuki pendidikan anti korupsi, setidaknya sebagai upaya untuk melakukan internalisasi pendidikan antikorupsi:

1. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.<sup>66</sup> Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak sebagaimana yang dikutip dari Friedman.<sup>67</sup> Ketika ini dihubungkan dengan pendidikan antikorupsi dalam keluarga, maka keberadaan keluarga sangat menentukan pendidikan dan perkembangan pendidikan anak. Keluarga yang dibangun dengan kejujuran, keterbukaan, dan dialog terbuka akan melahirkan bangunan keluarga yang juga konstruktif. Tidak ada yang disembunyikan baik oleh orang tua maupun anak, terutama dalam hal keuangan. Memang dalam hal tertentu, orang tua tetap perlu menyembunyikannya karena masih bukan domain anak untuk ikut tahu. Keluarga yang bisa menjadi rumah bagi semua yang ada di dalamnya akan memampukan setiap individu di dalamnya untuk bisa berinteraksi secara baik. Orang tua merasa memanusiakan anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk diajak berdiskusi dalam kegiatan apapun yang meyangkut kepentingan keluarga secara umum. Orang tua selalu dan kerap melibatkan anak dalam konteks kegiatan yang dapat menumbuhkan perkembangan dan pendidikan anak dalam rangka mengembangkan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan memahami perannya dalam keluarga. Anak juga demikian. Dia selalu menyampaikan segala kegiatan kesehariannya kepada orang tua secara jujur dan apa adanya. Anak menjadi pribadi-pribadi yang rajin mengkomunikasikan apa yang terbaik bagi dirinya kepada orang tua. Anak menempatkan dirinya sebagai seseorang yang terbuka terhadap orang tuanya, terutama terkait keuangan yang diberi oleh orang tuanya. Anak, sebut saja yang bersekolah, membelanjakan uang jajannya di sekolah dan ternyata sudah habis juga menceritakan kepada orang tua, dibelikan

---

<sup>66</sup> Nan Van Den Bergh (Ed). *Emerging Trends for EAPs in the 21st century*. (USA: The Haworth Press. Inc, 2000).

<sup>67</sup> Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2003). Hlm. 1.

untuk apa dan lain seterusnya. Atau ketika uang jajannya masih ada, anak tidak minta lagi kepada orang tua, namun kemudian menggunakan sisa uang jajan untuk hari selanjutnya.

Tentu, membaca hal-hal tersebut, ada beberapa poin mendasar yang kemudian dapat diambil saripati mengenai strategi internalisasi pendidikan antikorupsi kepada anak di dalam keluarga:

- a) Pentingnya keterbukaan komunikasi terhadap anak dari pihak orang tua terkait hal apapun, termasuk keuangan walaupun tidak semuanya harus dikomunikasikan. Pasalnya, ini dapat membentuk keterbukaan anak dan tentu ketika dihubungkan dengan korupsi, maka ia bisa terjadi tatkala ada keterbukaan antar sesama.
- b) Pentingnya memberikan tauladan kepada anak tentang pentingnya kejujuran.
- c) Pentingnya melibatkan anak untuk berdiskusi tentang banyak hal dan ini dapat membantu cara berpikir anak menuju kebaikan.

## 2. Masyarakat

Masyarakat terdiri atas individu-individu manusia yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi. Masyarakat adalah organisasi. Masyarakat adalah perpaduan antara heterogenitas dan keteraturan.<sup>68</sup> Ibnu Khaldun selanjutnya mengatakan bahwa masyarakat memiliki watak, kedirian, dan kenyataan khusus. Rasa cinta dan kasih sayang selanjutnya membentuk komunitas dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kemudian dapat dipandang dalam beberapa perpektif, yakni sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan karena dibentuk oleh individu-individu dan eksistensi individulah yang sebenarnya hakiki; masyarakat ibarat mesin yang merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antar bagiannya; dan masyarakatlah yang membentuk manusia.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho. *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul dalam Persaingan Global*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005). Hlm. 112.

<sup>69</sup> Ali Nurdin. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). Hlm. 2-4.

Pembangunan kehidupan bermasyarakat yang beradab tentu tidak akan lepas dari rasa cinta antar sesama sebagai bagian dari meletakkan dasar membentuk mental masyarakat yang bersih. Mental yang bersih tidak akan lepas dari perbincangan seputar transparansi. Masyarakat yang bermental bersih adalah mereka yang mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Korupsi sebagai penyakit bersama tentu dapat diberantas ketika masyarakat dalam segala bentuknya, sebut saja organisasi sosial masyarakat (ormas), kelompok masyarakat di tingkat desa dan sejenisnya, organisasi agama, dan lain seterusnya kemudian menjadikan semangat keterbukaan dan kejujuran sebagai gerakan pembangunan mentalitas yang bersih. Mentalitas yang bersih berjaln kelindan dengan bagaimana setiap apa yang dikerjakan kemudian selalu melibatkan banyak pihak agar yang dilakukannya memang bersentuhan dengan kepentingan orang banyak. Manajemen keuangan yang berada di dalamnya pun juga dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Gerakan kebudayaan untuk mempertanggungjawabkan hal apapun dan hal sekecil apapun benar-benar dijalankan secara konkret dan nyata. Ketika hal-hal demikian kemudian secara konsisten dilakukan oleh masyarakat, maka korupsi akan bisa dihilangkan secara bertahap. Memang menjadi sebuah pekerjaan terberat untuk menggelar hal tersebut, yakni sikap jujur dan bertanggung jawab. Ini membutuhkan komitmen dan keteguhan hati yang luar biasa masif. Masyarakat yang terdiri dari banyak individu perlu memiliki keyakinan tunggal bahwa kebiasaan yang selalu menampilkan kebaikan kolektif tentu akan memberikan kebaikan secara kolektif dan tentu akan berdampak kebaikan kepada setiap pribadi. Dengan demikian, strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di tengah masyarakat dapat dijalankan sebagai berikut:

- 1) Perlunya menggelar kegiatan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban secara tertulis. Apabila pertanggungjawabannya mampu dilakukan secara penuh tanggung

jawab dan jujur, masyarakat sudah mulai memahami tugas dan pekerjaan. Masyarakat sudah memiliki sebuah cara pandang bahwa setiap tugas adalah amanah dan kemudian perlu diakhiri dengan pertanggungjawaban yang tidak melukai nurani publik. Pertanggungjawaban di dalamnya berisikan keuangan dan ini kemudian harus bisa diterangkan seterang-terangnya kepada anggota mengenai pemasukan dan pengeluarannya agar semuanya bisa tahu. Ketika masyarakat sudah mengetahui makna sebuah pertanggungjawaban, ini sesungguhnya dapat memberikan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan di dalam pandangan dan kesadaran mereka selaku manusia yang bertanggung jawab.

- 2) Perlunya pembentukan semangat kasih sayang antar sesama bahwa semuanya adalah satu tujuan untuk membentuk kepentingan bersama. Apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan dengan sedemikian rupa sebagai gerakan membangun manusia yang berpandangan profetik.
- 3) Perlunya sanksi sosial bagi individu yang melakukan kesalahan, terutama yang dapat mengganggu kepentingan publik. Sanksi sosial di sini berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kesalahan terhadap publik dapat menceraiberaikan cinta kasih. Kesalahan sosial telah merusak tujuan mulia untuk kebersamaan. Sebut saja, ketika ada orang yang menyalahgunakan wewenang sebagai ketua pelaksana kegiatan tertentu, maka sanksi yang dapat dikeluarkan oleh masyarakat adalah dengan cara mengucilkannya. Mengucilkan dalam konteks ini bermakna positif agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran yang kedua kali dan seterusnya. Memang, mengucilkan di sini sangat tepat untuk digunakan sebagai cara efektif untuk membentuk manusia-manusia yang selalu bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaannya agar menjadi baik hasilnya. Mengucilkan adalah langkah tepat untuk membuat pelaku pelanggaran menjadi jera.

### 3. Sekolah

Keberadaan dan fungsi sekolah secara ontologis adalah untuk membangun keunggulan sumber daya manusia.<sup>70</sup> Sekolah tentunya berperan membentuk dan menggali potensi dan bakat yang dimiliki setiap peserta didik agar menjadi implimentatif dalam kehidupannya. Sekolah adalah untuk pembangunan identitas diri sumber daya manusia agar bisa bernilai, setidaknya untuk diri sendiri sebelum untuk yang lain. Sekolah merupakan sebuah miniatur kehidupan sebab ia memberikan perspektif baru terkait upaya memaknai setiap hidup dan kehidupan yang dijalani. Sekolah bukan semata memintarkan anak didik di atas kertas namun membangun kecerdasan sosial sehingga mereka memiliki kedewasaan hidup dalam mencerna realitas hidup, tidak selalu menggunakan logika hitam dan putih. Bahkan, sekolah perlu memerankan diri untuk mengembangkan kemampuan diri anak didik untuk berprestasi dalam segala aspek. Prestasi selanjutnya jangan hanya dipandang dalam bentuk angka, selain itu bisa dalam bentuk kemampuan lain yang tidak akademis.<sup>71</sup>

Harefa selanjutnya juga mengatakan bahwa sekolah tidak hanya memiliki tugas untuk pembangunan pendidikan yang bernilai serta berguna, namun ikut bertanggung jawab membentuk jati diri yang memiliki kesadaran diri terhadap lingkungannya.<sup>72</sup> Dalam konteks ini, anak didik harus dibentuk dengan sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Tentunya, ketika pemahaman sekolah tersebut kemudian dihubungkan dengan praktik internalisasi pendidikan antikorupsi, maka kaitannya sangat erat. Pasalnya, di dalam sekolah sesungguhnya internalisasi pendidikan antikorupsi lebih bisa ditanamkan secara lebih kuat dan cepat. Dalam sekolah, banyak mata pelajaran yang dapat dikonsep dan dirancang dengan

---

<sup>70</sup> Munif Chatib. *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intteligences di Indonesia*. (Bandung: Kaifa, 2009). Hlm. xxi.

<sup>71</sup> Moh. Yamin. *Sekolah yang Membebaskan: Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis*, (Malang: Madani, 2012).

<sup>72</sup> Andrias Harefa. *Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hlm. 163.

sedemikian rupa agar pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan kepada kehidupan anak didik. Sekolah, dengan demikian, sangat berfungsi sebagai pembangunan moralitas anak didik yang sangat luar biasa besar. Memang mendidik manusia-manusia dewasa yang sudah berusia di atas 35 tahun lebih sulit ketimbang anak didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak didik lebih mudah diarahkan dan tentunya mereka lebih fleksibel dalam belajar. Tingkat kemudahan dalam belajar dan mudahnya untuk dibentuk adalah dua hal yang saling kait mengkait satu sama lain.

Dalam teori perkembangan peserta didik, anak didik yang berada di bangku sekolah menjadi momen emas untuk memasukkan nilai-nilai positif yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka sebab kehidupannya belum terlalu terkontaminasi oleh banyak lingkungan yang kotor. Menurut Zuchdi, metode keteladanan menjadi sesuatu hal yang diperlukan dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi. Guru dalam konteks ini selanjutnya perlu memiliki keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Keterampilan asertif di sini melatih anak didik untuk memiliki keterampilan mengemukakan pendapat secara terbuka dengan cara-cara yang tidak melukai perasaan orang lain. Sementara keterampilan menyimak adalah untuk melahirkan kemampuan anak didik dalam mendengarkan dengan penuh pemahaman dan secara kritis.<sup>73</sup> Ada benang merah yang kemudian ingin disampaikan Zuchdi bahwa menanamkan nilai pendidikan antikorupsi perlu dilakukan dengan kemampuan asertif dan menyimak dimana anak didik dibelajarkan untuk menjadi peka terhadap realitas yang berada di lingkungan sekitar dan kemudian mengkomunikasikan apa yang didapatnya dari realitas. Dengan kata lain, semakin rutin dan partisipatif terhadap pelbagai aktivitas kasus korupsi, anak didik tentu akan semakin kaya wawasan tentang tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terjadi. Mereka kemudian bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dan

---

<sup>73</sup> Darmiyati Zuchdi. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 48.

bernilai guna. Kemampuan anak dalam mencerpah hal demikian semakin menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi semakin bagus dalam perkembangan kehidupan anak didik.

Yulita TS kemudian mempertegas peran guru dalam konteks pendidikan antikorupsi sebagaimana hal-hal berikut:

- 1) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya.
- 2) Mempromosikan intoleransi terhadap korupsi.
- 3) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi.
- 4) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:
  - a) Penanaman nilai-nilai.
  - b) Penguatan kapasitas siswa, sebut saja berpikir kritis, bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik, mengelola diri dalam berkehidupan sosial baik di sekolah maupun masyarakat.<sup>74</sup>

Selanjutnya, Sumiarti mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi. Pengetahuan moral ini berjaln kelindan dengan *moral awareness* (kesadaran moral) tentang korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral) mengapa korupsi dilarang, *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *self-knowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor. Tak hanya itu saja, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral juga harus didasarkan kepada *moral feeling* terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan bangsa, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi sebab korupsi

---

<sup>74</sup> Yulita TS. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*. Tulisan ini disarikan dari bahan training *Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010. Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata Semarang.

mengotori hati dan jiwa, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan) sebab korupsi adalah tindakan kejahatan yang sangat luar biasa buruk bagi kemanusiaan sementara kebaikan itu adalah antonim dari korupsi yang membawa kebijakan untuk semua serta sesama, *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan sebab penyakit ini dapat menimbulkan tindakan korupsi yang dapat menghancurkan masa depan bersama dan bangsa, *humility* (kerendahan hati) sebab ini akan membuat setiap manusia untuk selalu menerima kehidupan apa adanya dan dengan kerendahhatian itu pula, manusia menjadi tahu diri dan memahami posisinya. Tentu, ketika hal-hal tersebut kemudian dapat menjadi cara berpikir, bersikap, dan bertindak setiap anak didik, maka lahirlah manusia-manusia anak didik yang sangat kuat untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan maha luar biasa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi, anak didik sebagai generasi bangsa akan memiliki komitmen untuk melawan tindakan korupsi walaupun nilai rupiahnya sangat sedikit atau nilai rupiahnya juga besar.<sup>75</sup>

Sementara menurut Lukman Hakim, model pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi itu sendiri kepada anak didik. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi tersebut dalam rangka melakukan internalisasi kemudian perlu melalui hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Materi

Materi pembelajaran antikorupsi perlu mencakup tiga area, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif berhubungan dengan pemberian wawasan pengetahuan tentang hakikat korupsi. Afektif berkaitan dengan pembentukan karakter antikorupsi. Psikomotorik berjalinkelindan dengan perilaku antikorupsi.

---

<sup>75</sup> Sumiarti. *Pendidikan Antikorupsi*. (INSANIA|Vol. 12|No. 2|P3M STAIN Purwokerto | Sumiarti 12 Mei-Ags 2007|189-207).

## 2) Metodologi

Pendidik dapat menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan pendidikan antikorupsi kepada anak didik dan itu perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kematangan berpikir anak didik. Metode pembelajarannya bisa berupa ceramah dan penugasan, melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran antikorupsi, pemberian keteladanan, telaah tentang berbagai modus tindak korupsi, studi kasus dan pemecahan masalah, pelatihan kejujuran dan kedisiplinan.

## 3) Sumber Belajar

Banyak sumber belajar yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pengayaan antikorupsi bagi anak didik yang bisa diperoleh dari koran, majalah, CD, dan internet. Semuanya itu merupakan berita tentang kasus korupsi yang terjadi serta sanksi hukum serta sanksi sosial yang juga dialamatkan kepada para koruptor. Apabila diperlukan sebagai penguat, mengundang penegak hukum sebut saja polisi, hakim, jaksa, dan KPK sebagai narasumber semakin memperkaya wawasan pengetahuan anak didik.

## 4) Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi atas belajar anak didik, maka pendidik tidak semata dituntut menilai secara kognitif. Dengan kata lain, evaluasi otentik terkait karakter, keterampilan, kewaspadaan, cara berpikir dalam mengatasi masalah serta memberikan *problem solving* kemudian menjadi ukuran otentik untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bagi anak didik di sekolah. Oleh sebab itu, evaluasi komprehensif dan holistik kemudian perlu dilakukan yang mencakup tes tulis, kinerja dan keterampilan, kumpulan hasil kerja siswa, portofolio terkait pengalaman dan pemikiran tentang tindak korupsi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Lukman Hakim. *Model Pendidikan Antikorupsi*. (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10 No. 2 – 2012. Hlm. 147-149).

Untuk mata pelajaran yang tepat dan dekat dengan pendidikan antikorupsi adalah agama, PKn, dan IPS. Sedangkan materi yang layak digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah:

- 1) Apa, di mana korupsi itu, dan sebab-sebab korupsi.
- 2) Isu moral.
- 3) Korupsi dan hak asasi manusia.
- 4) Memerangi korupsi.
- 5) Korupsi dan ekonomi pasar.
- 6) Korupsi dan hukum.
- 7) Korupsi dan masyarakat demokrasi.
- 8) Hak dan kewajiban warga negara.
- 9) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 10) Tata kelola pemerintahan yang baik.
- 11) Peran siswa sekolah dalam memerangi korupsi.<sup>77</sup>

Apa yang kemudian menjadi pembahasan tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa internalisasi pendidikan antikorupsi sebagai bekal bagi anak didik di masa depan adalah sebuah hal niscaya. Memasukkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam sekolah apakah itu tergabung dalam mata pelajaran tertentu atautkah kemudian dibuat mata pelajaran khusus, yang diajarkan dalam pelajaran tambahan menjadi sesuatu hal urgen. Tak hanya itu saja, peran keluarga dan masyarakat secara luas kemudian juga ikut memberikan pengaruh luar biasa terhadap perkembangan pendidikan anak didik. Itulah mengapa pendidikan antikorupsi memerlukan banyak strategi dan cara dalam rangka mempercepat terbentuknya mental anak-anak bangsa yang berkarakter kuat. Akhir dari internalisasi pendidikan antikorupsi adalah melahirkan manusia-manusia yang menjalani kehidupan dan hidupnya secara sederhana tanpa kemudian terpengaruhi gaya-gaya hidup, yang belum tentu mereka bisa menjalaninya. Gaya hidup yang terus berkembang dan maju tentu akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan setiap manusia. Ketika manusia sudah tidak

---

<sup>77</sup> Yulita TS. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*. Tulisan ini disarikan dari bahan training *Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010. Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata Semarang.

mampu menyaringnya dan justru terjebak ke dalam perangkap gaya hidup dan sementara di sisi lain mereka tidak memenuhi keinginan-keinginan gaya hidup tersebut karena faktor-faktor tertentu, maka jalan pintas yang disebut budaya instan kemudian menjadi jalan alternatif. Di sinilah potensi korupsi kemudian muncul.

## B. Melawan Korupsi dengan Hidup Sederhana

Epikuros sebagai tokoh hedonisme sebagaimana yang dikutip oleh Franz Magis-Suseno mengatakan bahwa kenikmatan hanya dapat dinikmati sesaat dan hanya kalau kita melupakan masa lalu (dimana banyak hal membuat kita sedih) serta tidak memikirkan masa depan (dimana banyak hal membuat kita menjadi takut). Berpeganglah pada saat sekarang dan itulah pokok pemikiran Epikuros. Dengan kata lain, hedonisme akan selalu hadir ketika secara konsisten menjadi ahistoris dan hidup semata-mata untuk tujuan sesaat dengan menegasikan segala refleksi atas hidup kita.<sup>78</sup> Selanjutnya, akar korupsi adalah ingin selalu hidup mewah tanpa berusaha memikirkan kepentingan masa depan. Hidup mewah yang kemudian disebut hedonisme muncul ketika manusia merasa ingin senang-senang saja atas apa yang sudah diperoleh. Gaya hidup hedonisme, padahal, merupakan sebuah penyakit yang dapat menggiring manusia jatuh ke jurang kehancuran. Akibat hedonisme, manusia kemudian seringkali malas, berpikiran pendek, tidak memiliki idealisme, hanya ingin hidup enak saja, dan hal ini sangat merusak kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, kemewahan hidup menjadikan orang lalai untuk memikirkan hal-hal lain di luar dirinya, kecuali untuk kepentingan dirinya yang sesaat. Biasanya, pemimpin yang bergaya hedonis pun juga demikian. Ia akan melalaikan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Sangat jamak terjadi, yang dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan tindak korupsi walaupun sadar atau tidak dia mengetahui itu. Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa kehidupan mewah merusak kehidupan manusia sebab pada dirinya tertanam

---

<sup>78</sup> Franz Magis-Suseno. *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005). Hlm. 248.

kejelekan, kebohongan, dan perilaku hidup buruk lainnya.<sup>79</sup> Akhir dari kebiasaan hidup mewah tersebut adalah tatkala uang yang dimilikinya sudah mulai habis, maka yang bersangkutan kemudian menjadi bingung. Umumnya, yang dilakukan dengan jalan pintas, yakni dengan berkorupsi.

Sejalan dengan itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa manusia hedonis adalah mereka yang serba melandaskan kehidupannya secara duniawi. Tujuan hidup mereka hanya untuk kesuksesan duniawi sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap kepribadiannya.<sup>80</sup> Oleh karenanya, kehidupan yang selalu dibangun di atas kebendaan tentunya akan melahirkan manusia-manusia rakus dan tamak serta serakah. Timbulnya korupsi pun juga demikian. Korupsi yang semakin menggila dan terus menerus menggilas kepentingan hajat hidup orang banyak disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia yang tidak lagi memikirkan kepentingan publik. Mereka yang memiliki mandat untuk mengurus rakyat seolah tidak merasa cukup dengan gaji yang didapat serta tunjangan dari negara yang luar biasa mewah. Hidup bermewah-mewah tanpa kemudian melihat terhadap kehidupan sekeliling dimana banyak orang miskin yang hidup di garis kemiskinan dan lain seterusnya semakin membutuhkan mereka untuk memikirkan kepentingan rakyatnya.

Oleh sebab itu, akar korupsi kemudian sesungguhnya dapat diberantas ketika ada komitmen untuk mau menjalani kehidupan dan hidup secara apa adanya. Hidup sederhana tentunya menjadi jalan damai dan tepat dalam menyelesaikan persoalan. Melawan hedonisme yang menggambarkan kehidupan yang mewah dan lain sejenisnya dengan hidup sederhana akan mengantarkan bangunan kehidupan bangsa menjadi damai. Hidup sederhana tentu berkaitan dengan pola hidup yang tidak berlebihan. Semuanya serba didasarkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan tentunya sangat berbeda dengan keinginan. Kebutuhan itu bersangkut paut dengan hal-hal dasar untuk mempertahankan keberlanjutan hidup. Sementara keinginan adalah hal-hal terkait untuk semakin menambah asesori kehidupan sehingga menjadi lebih tampak

---

<sup>79</sup> Didin Hafidhudin dkk. *Sederhana Itu Indah*. (Jakarta: Penerbit Republik, 2001). Hlm. 103-104.

<sup>80</sup> Rani Anggraeni Dewi. *Menjadi Manusia Holistik*. (Bandung: Penerbit Hikmah, 2007). Hlm. 144.

mewah dan gemerlap. Memang apabila kemudian perlu ditelusuri secara lebih jauh, maka korupsi yang terjadi akibat hedonisme kemudian sangat berakar kuat kepada hati yang selalu tidak merasa puas terhadap apa yang sudah diperoleh. Hati yang merasa gelisah akibat tidak dapat terpenuhinya kemewahan hidup atas kekayaan yang ada menjadi pemicu atas persoalan-persoalan baru yang dapat berpotensi terjadinya tindakan korupsi. Ahmad Salafuddin dengan mengutip pendapat Abu Fida' Ab dur Rafi' kemudian memberikan beberapa catatan penting terkait jalan menuju hidup sederhana agar terhindar dari tindakan korupsi:

- 1) Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas.
- 2) Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran agama.
- 3) Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta.
- 4) Menjaga pikiran yang terlintas dan langkah nyata untuk perbuatan.
- 5) Selalu berserah diri atas apa yang sudah ada kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya.
- 7) Membentuk sifat jujur dalam diri.
- 8) Membangun sifat malu untuk berbuat maksiat.
- 9) Muhasabah (intropeksi diri).
- 10) Menumbuhkan kecintaan (mahabbah) kepada Allah.
- 11) Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi.<sup>81</sup>

Dengan demikian, hidup sederhana sesungguhnya adalah bagian dari memulai hidup yang bebas dari godaan. Hidup sederhana merefleksikan bahwa jiwa dan hati sudah mulai tidak terjebak kepada gemerlapnya dunia yang kemudian sudah menghilangkan batas-batas normalitas dalam menjalani kehidupan. Hidup sederhana kemudian dapat disebut sebagai pelakonan kehidupan yang tidak melebih-lebihkan keadaan. Pejabat atau mereka yang mendapatkan amanat dalam pelayanan hidup orang banyak sudah semestinya menjalani hidup sederhana. Keterpanggilan dari hati

---

<sup>81</sup> Ahmad Salafuddin. *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-nisa' Ayat 58: Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlily* (Tidak Diterbitkan). (Semarang: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010). Hlm. 23.

nurani untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melukai nurani rakyat dapat disebut sebagai awal memulai hidup sederhana. Pasalnya, apa yang mereka lakukan tidak menyeleweng dari tugas. Apa yang mereka kerjakan selalu bersumber kepada aturan yang berlaku. Tidak mau mengerjakan apapun jikalau tidak didasarkan atas peraturan yang ada.

Ketika ini dihubungkan dengan pendidikan antikorupsi bagi anak-anak sebagai generasi masa depan, maka hidup sederhana juga dapat dicontohkan kepada mereka. Memberikan contoh adalah penting, namun lebih penting lagi adalah menjadi contoh kepada mereka sehingga anak-anak akan lebih mudah mencerapnya dengan mudah. Berikut di bawah ini merupakan langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan dalam rangka menanamkan pendidikan hidup sederhana kepada anak-anak sebagai bentuk menanamkan pendidikan antikorupsi:

#### 1) Orang Tua

Orang tua adalah figur bagi anak-anaknya. Apa yang diperbuat dan menjadi kebiasaan orang tua baik sadar maupun tidak sadar juga akan ditiru dalam keseharian anak-anaknya. Perilaku hidup sederhana yang dilakukan orang tua di rumah dipastikan akan terbenam dengan sangat kuat dalam sikap hidup anak-anak. Sebut saja, apabila orang tua dalam kehidupan sehari-hari terbiasa makan tahu tempe dengan sayur, ini juga akan membentuk anak. Ketika orang tua terbiasa memanfaatkan barang yang ada di rumah selama tidak rusak, maka anak pun juga menirunya, sebut saja walaupun sandalnya sudah cukup berumur namun masih layak pakai, orang tua tetap menggunakan, maka anak pun akan ikut terbiasa menirunya. Dalam hal berpakaian pun juga demikian. Ketika orang tua terbiasa menggunakan baju yang bernilai rupiah tidak mahal dan itu pantas untuk dipakai, maka anak-anak pun juga pasti akan menirunya. Ketika orang tua selalu membiasakan untuk menghemat barang-barang apapun di rumah dalam konteks pemakaian namun itu bukan dimaknai pelit, maka anak-anak pun juga demikian. Oleh sebab itu, perilaku dan tindakan orang tua sehari-hari akan menjadi cermin bagaimana anak-anak kemudian akan memaknai

kehidupannya di hari kelak. Oleh sebab itu, ajaran hidup sederhana dari orang tua terhadap anak di dalam keluarga sangat penting dan serta berperan besar dalam membentuk anak-anak yang selalu hidup sederhana.

## 2) Sekolah

Guru selalu diibaratkan digugu dan ditiru. Dengan kata lain, apabila guru kencing berdiri, maka anak-anak didiknya akan kencing berlari, dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, kesederhanaan hidup guru baik dalam hal berpakaian, makan, dan lain sejenisnya akan menjadi pelajaran tersendiri bagi anak-anak didiknya. Guru sesungguhnya memberikan ketauladanan hidup sederhana yang luar biasa. Guru sebetulnya tidak perlu banyak memberikan contoh tentang hidup sederhana, namun bagaimana guru itu sendiri menjadi contoh bagi anak-anak didiknya. Guru yang sederhana, dengan demikian, dapat dilihat tatkala ia berpenampilan, apakah dilebih-lebihkan atau tidak. Semuanya itu menjadi potret tersendiri bagi anak-anak didiknya di kelak kemudian hari. Oleh karenanya, menjadi guru yang sederhana dalam banyak hal merupakan pekerjaan yang sangat berat namun mulia apabila menghendaki lahirnya anak-anak didik yang juga menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhaan hidup anak didik menjadi penentu bagi keberhasilan pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri yang berorientasi kepada pemanusiaan manusia.

## 3) Masyarakat

Perkembangan dunia semakin ketat dengan kian mengglobalnya dunia. Lingkungan dimana anak-anak hidup dan berinteraksi menentukan kualitas kehidupan anak-anak. Anak-anak yang hidup di desa sudah pasti berbeda dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Perbedaan tersebut tentu berkaitan dengan penampilan, gaya bicara, dan lain sejenisnya. Terlepas dari hal tersebut, ada satu hal penting yang harus tetap dipertahankan, yakni selalu menegakkan hidup sederhana. Orang tua dalam konteks ini kemudian perlu memfasilitasi lingkungan anak dengan lingkungan yang baik dan mendidik. Boleh saja, anak itu tinggal di desa atau perkotaan, namun yang tidak boleh terlupakan adalah

bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas selalu berada dalam naungan lingkungan yang baik. Lingkungan masyarakat yang selalu menampilkan kesederhanaan dalam berperilaku, bergaul, dan lain sejenisnya akan memberikan suasana kehidupan sendiri bagi keberlangsungan kehidupan anak yang baik dan lebih baik ke depannya sehingga ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan.

Oleh sebab itu, tujuan hidup sederhana adalah untuk kesederhanaan itu sendiri. Tampil menjadi dirinya sendiri tanpa dipoles dengan sedemikian rupa adalah cermin hidup sederhana. Menarik apa yang disampaikan Men Jung untuk menjadi manusia sederhana dengan diawali sejumlah pertanyaan, sebut saja “tanyakan pada diri anda, apa yang benar-benar anda inginkan dalam hidup ini, kenali diri anda, apa yang paling senang anda lakukan, apa yang memotivasi anda, hal berarti apa yang anda inginkan, anda ingin diingat sebagai apa ketika sudah tiada.”<sup>82</sup> Tentu, sejumlah pertanyaan kemudian dapat dikaitkan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Apa yang dimaksud Men Jung adalah bahwa saat akan melakoni hidup dan kehidupan, silahkan semuanya diukur berdasar kadar kemampuan masing-masing. Kendatipun demikian, janganlah melakukan apapun itu dengan berlebihan.

Selanjutnya Dalai Lama menambahkan perkataan-perkataan bijak sebagai berikut dalam rangka memberikan makna hidup sederhana:

Kadang-kadang ketika saya berjumpa dengan teman-teman lama, peristiwa itu mengingatkan saya tentang betapa cepat waktu ini berlalu dan kesadaran ini membuat saya bertanya dalam hati tentang apakah saya telah memanfaatkan waktu saya dengan baik atau tidak. Pemanfaatan waktu penting sekali. Dengan memiliki tubuh ini, terutama otak manusia yang begini mengagumkan, saya merenungkan bahwa setiap menit kita adalah sederhana. Kehadiran kita sehari-hari akan jauh lebih hidup bila disertai dengan harapan walau tidak seorang pun dapat menjamin masa depan kita. Tidak ada jaminan bahwa besok pada waktu seperti sekarang kita akan berada di sini. Akan tetapi kita masih bekerja untuk hari esok semata-mata karena harapan tadi. Maka, kita perlu memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa menggunakan waktu secara baik adalah

---

<sup>82</sup>Men Jung. *Go to the Next Level!: 50 Tips Transformasi untuk mendapat hidup gemilang, sukses, dan bahagia*. (Jakarta: Gramedia, 2010). Hlm 3.

begini: sedapat mungkin, berbuatlah sesuatu bagi orang lain, mahluk hidup lain. Kalau belum sempat, paling tidak berhentilah merusak kebahagiaan mereka. Menurut saya hanya itulah dasar filsafah hidup saya.

Jadi, marilah kita merenung tentang apa yang betul-betul berharga dalam hidup, yang memberi makna pada hidup kita, kemudian menjadikannya dasar untuk menetapkan prioritas-prioritas kita. Tujuan hidup kita harus positif. Kita tidak dilahirkan dengan tujuan untuk membuat masalah, mencelakai orang lain. Agar hidup kita bernilai, menurut saya kita harus mengembangkan sifat-sifat dasar yang baik-hangat, ramah, dan pengasih. Maka, hidup kita menjadi bermakna dan lebih damai-lebih bahagia.<sup>83</sup>

Dalam nasehat-nasehat yang disampaikan Dalai Lama, ada satu pesan penting yang kemudian diambil bahwa melakukan dan menebarkan kebaikan untuk semua adalah penting. Kesederhanaan hidup yang ditunjukkan kepada orang lain saat mengerjakan kebaikan dan kebajikan kemudian harus diperlihatkan dengan sedemikian rupa. Tatkala hal tersebut dihubungkan dengan tindakan pemberantasan korupsi, maka hidup sederhana dengan selalu menebarkan kebaikan dan kebajikan untuk semua sesungguhnya menjadi kunci untuk bisa melawan korupsi. Dengan kata lain, tujuan hidup sederhana adalah untuk kebaikan dan kebajikan, sementara tujuan korupsi adalah memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan banyak orang. Dua hal berbeda tersebut sudah pasti tidak bisa disatukan. Karena keduanya berbeda, maka yang pertama dapat menjadi jalan damai untuk bisa bergerak memberantas korupsi. Untuk apa kita memiliki banyak uang, namun dengan cara yang tidak benar dan kemudian merusak tatanan kehidupan bersama. Untuk apa kekayaan melimpah ruah namun ternyata dihasilkan dari jalan-jalan yang tidak benar, dan lain seterusnya. Sudah seharusnya, hidup sederhana harus ditempuh apabila ingin berbuat kebaikan dan kebajikan untuk semua serta sesama. Sudah seharusnya hidup sederhana harus digunakan untuk melawan korupsi. Kita semua sudah mengetahui bahwa akar korupsi adalah keserakahan. Akar keserakahan itu sendiri adalah nafsu untuk berkuasa dan lain sejenisnya. Ini tentu timbul dari sifat buruk yang berakibat kepada kehancuran, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain.

---

<sup>83</sup> Dalai Lama dan Howard C. Cutler. *Seni Hidup Bahagia: Buku Petunjuk untuk Hidup*. Penerj: Alex Tri Kantjono Widodo. Cet. Ke-4. (Jakarta: Gramedia, 2004). Hlm. 64-65.

Ketika kita sudah mengetahui itu, untuk apa korupsi menjadi jalan hidup. Lebih baik kita menjatuhkan pilihan kepada hidup sederhana dimana di situ ada banyak nilai kebaikan dan kebajikan untuk semua. Kasih sayang, cinta kasih, tolong menolong, dan lain seterusnya merupakan varian-varian dari hidup sederhana. Setiap manusia yang hidup dengan kesederhanaan, tidak sombong, tidak angkuh, dan lain sejenisnya pasti disenangi banyak orang. Orang baik, dengan demikian, memiliki banyak sahabat, kawan, saudara, dan lain sejenisnya. Orang baik akan selalu didoakan agar selalu sehat wal afiat. Sementara orang yang berkorupsi adalah sebaliknya. Banyak orang sangat membencinya sebab sudah menebar bencana kerusakan terhadap banyak orang. Akhirnya, sangat wajar, sangat sedikit orang yang mau dekat dengannya.

### C. Revolusi Mental dalam Pemberantasan Korupsi

Manusia yang bermental bersih adalah sosok yang bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab. Manusia yang bermental bersih akan mampu melakoni hidup dan kehidupannya secara bermoral sehingga dia hadir sebagai pembawa kebaikan dan kebajikan. Selanjutnya mental adalah sistem nilai budaya dan ini berarti suatu rangkaian dari konsep abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Dengan demikian, mental sesungguhnya merupakan cerminan kehidupan apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mental berjalinkelindan dengan sikap seseorang. Tentunya, ketika ini berbicara tentang sikap, maka selanjutnya hal tersebut menjelaskan sikap mental itu sendiri. Dalam pandangan Koentjaraningrat, sikap dapat dikategorikan sebagai potensi pendorong yang ada dalam jiwa individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya beserta hal yang ada di lingkungannya. Graham T kemudian menambahkan bahwa sikap merupakan karakteristik individu dengan tata cara seseorang bereaksi terhadap objek atau situasi tertentu. Reaksi kemudian bergantung kepada pengalaman pribadi masing-masing dan akhirnya menghasilkan perilaku atas pendapat tertentu. Selanjutnya Marvin E. Shaw & Philip R. Constazo

mengatakan bahwa sikap mental merupakan sebuah pemorelehan sikap itu sendiri. Sikap mental adalah pemerolehan sikap yang berlangsung secara otomatis dan kongkruen dengan formasi konsep. Dengan demikian, sikap mental adalah konsepsi perilaku yang muncul dari jiwa seseorang sebagai reaksi atas dasar situasi yang mendasarinya.<sup>84</sup>

Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang mental, maka hal ini sesungguhnya sangat berpengaruh besar bagi pembentukan pribadi seseorang. Seseorang yang memiliki mental terbuka, ia akan mampu berkomunikasi secara lebih baik sehingga hubungan dengan orang lain juga akan baik. Mental yang positif tersebut akan menjadi gerak dalam membangun pribadi yang kuat. Tatkala mental secara konseptual tersebut dihubungkan dengan kondisi kekinian dimana korupsi di republik ini sangat masif terjadi dengan sedemikian rupa, maka persoalan mendasar yang memicu korupsi adalah mental bangsa ini yang sudah rusak. Mengutip pendapat Koentjaraningrat, sikap menerabas yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan manusia Indonesia sesungguhnya telah menciptakan sikap manusia Indonesia yang sudah merusak.<sup>85</sup> Apa yang kemudian mereka lakukan menunjukkan sikap yang buruk. Konsekwensinya adalah tatanan kehidupan menjadi kacau balau. Banyak manusia Indonesia bekerja kemudian tidak atas norma dan standar hidup yang sudah dibuat bersama demi kebaikan dan kebajikan bersama. Seharusnya norma menjadi pandu dalam menjalani kehidupannya, ini pun sudah tidak dijalankan sama sekali. Korupsi yang terjadi dimana-mana sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya merupakan bentuk dari sikap yang menerabas. Karena sudah merasa memiliki kekuasaan di tingkat elit dan kemudian menginginkan cepat kaya, maka segala bentuk jalan yang tidak benar kemudian dilakukan dengan sedemikian mudahnya. Tidak peduli, apakah yang dilakukan itu kemudian membawa keburukan dan kehancuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama itu kemudian memberikan kepuasan dan kelancaran bagi kepentingan serta tujuannya, sikap-sikap

---

<sup>84</sup> F.X. Oerip S. Poerwopoespito dan T.A. Tatag Utomo. *Menggugah Mentalitas Profesional & Pengusaha Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2010). Hlm. 44-45.

<sup>85</sup> Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hlm. 46.

destruktif sekaligus menerabas kemudian tetap dipertahankan dengan sedemikian rupa. Atas nama kepentingan jangka pendek, semuanya kemudian dengan sangat resmi ditunaikan padahal itu sudah sangat jelas merusak dan membawa kehancuran.

Akhirnya, perbincangan seputar mental kemudian sangat tepat untuk dihubungkan dengan revolusi mental sebagaimana yang disampaikan Joko Widodo sebagai presiden terpilih di 9 Juli 2014 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan kemenangannya tanggal 22 Juli. Dalam pandangan Joko Widodo, revolusi mental adalah sebuah langkah untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa, di antaranya tentang korupsi. Pentingnya revolusi mental adalah karena ini terkait dengan sikap bangsa yang selama ini sudah terlalu lama memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia-manusia Indonesia yang selalu menggunakan cara berpikir sempit, cara memaknai hidup secara sektoral, cara berperilaku secara permisif, dan lain sejenisnya merupakan bentuk nyata dari praktik kehidupan manusia yang sudah keluar dari kenormalan.

Oleh karenanya, revolusi mental dalam dunia pendidikan kemudian harus menjadi *entry point* dalam membangun perubahan bangsa yang lebih baik. Nation building (pembangunan bangsa) dapat dilakukan melalui pembangunan kepribadian sosial dan budaya bangsa. Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini.<sup>86</sup> Apa yang dimaksud tersebut tentunya adalah bagaimana kepribadian sosial dan budaya bangsa kemudian dihidupkan kembali. Semuanya sudah jamak mengetahui bahwa akibat arus globalisasi yang semakin masif, maka kepribadian bangsa yang bernilai adiluhung sudah menghilang dan hal ini harus kembali digali dengan sedemikian rupa. Mengapa perilaku kejujuran, kesantunan, etika, dan lain sejenisnya sudah menghilang, ini tentunya tidak lepas dari tergerusnya oleh globalisasi.

---

<sup>86</sup> Joko Widodo. Revolusi Mental. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental>, diakses tanggal 24 Juli 2014.

Masih menurut Joko Widodo, agama yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moralitas kemudian harus dibangkitkan kembali sebagai bentuk untuk menjawab persoalan-persoalan amoralitas bangsa, seperti korupsi. Diakui maupun tidak, mengapa korupsi semakin membabi buta dan pelakunya tidak hanya berasal dari orang umum, namun juga yang lahir dari pendidikan agama, maka ini tidak terlepas dari semakin keringnya pemahaman tentang agama itu sendiri. Dengan kata lain, akibat kerakusan, ketamakan, dan arogansi, maka korupsi kemudian menjadi jalan untuk mencapai tujuan dan kepentingan sektoralnya.

Untuk lebih jelasnya, maka menjadi penting untuk menerjemahkan revolusi mental dalam konteks pendidikan. Menarik apa yang disampaikan oleh Karlina Supelli bahwa revolusi mental harus didasarkan kepada strategi kebudayaan dimana di dalamnya ada haluan umum yang berperan memberi arah bagi pembentukan kebudayaan. Tentunya, strategi tersebut kemudian harus didasarkan kepada tahapan, target setiap tahap, langkah pencapaian, dan metode evaluasinya. Apa yang kemudian ingin disasar dalam revolusi mental adalah transformasi etos. Transformasi etos tersebut mengenai perubahan mendasar tentang cara berpikir, cara merasa, cara memercayai dan itu semuanya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, tidak akan ada yang bernama revolusi mental apabila tidak ada perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Memberantas korupsi pun harus dimulai dan dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berbicara tentang strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi, maka kejujuran kemudian harus ditanamkan dan menjadi way of life. Selanjutnya, langkah operasionalnya adalah dengan siasat kebudayaan membentuk etos warga negara (citizenship). Mengutip pendapat Yudi Latif, etos adalah karakter dan sikap dasar manusia terhadap diri dan dunianya. Ia merupakan aspek evaluatif yang memberi penilaian atas berharga tidaknya sesuatu serta memberi orientasi atas tindakan manusia, yang tercermin dalam sikap dan pilihan-pilihan yang dikembangkannya.<sup>87</sup> Tentu, untuk keperluan pendidikan kewarganegaraan, kemudian

---

<sup>87</sup> Yudi Latif. *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). Hlm. 149.

diperlukan untuk menyusun pertanyaan, sebut saja keutamaan/karakter baik (virtue) apa yang harus dipelajari oleh siswa agar menjadi warga negara yang baik, keutamaan atau karakter baik (virtue) apa yang perlu dipelajari siswa untuk menemukan kembali Indonesia yang dicita-citakan bersama. Selanjutnya, keutamaan (virtue) adalah pengetahuan praktis. Dengan kata lain, bagaimana nilai kejujuran dan hal-hal keutamaan lainnya terbentuk dalam pribadi diri, terutama untuk anak didik. Sebut saja, ketika dia dihadapkan pada soal yang tidak bisa dijawab dan kemudian yang bersangkutan akan mencontek, maka si anak tersebut berpikir ulang, apakah harus mencontek untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar ataukah berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan yang ada. Di sinilah anak sedang dilatih untuk menjadi jujur. Inilah yang dikehendaki dari revolusi mental.<sup>88</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut, maka ada beberapa hal penting yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama terkait implimentasi revolusi mental di sekolah sebagai lokus pendidikan yang akan membentuk mental anak didik:

a) Penguatan moralitas di sekolah harus berjenjang dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

a. Tingkat Dasar

Porsi pendidikan moralitas dan kewarganegaraan harus mencapai 75% sementara porsi pendidikan umum yang lainnya adalah 25%. Pertimbangannya adalah menanamkan pendidikan moralitas dan kewarganegaraan sejak dini akan membentuk kebiasaan dan perilaku anak didik yang positif. Pembentukan kebiasaan dan perilaku yang positif akan mendukung terpolanya kehidupan anak yang baik.

b. Tingkat Menengah

Porsi pendidikan moralitas dan agama sudah dikurangi menjadi 50% saja dengan pertimbangan karena sudah dikuatkan dan

---

<sup>88</sup> Karlina Supelli. <http://www.jokowi.id/opini/mengartikan-revolusi-mental/>, diakses tanggal 23 Juli 2014.

dibentuk di tingkat dasar. Sehingga dengan lebih pada penguatan pendidikan umum lainnya, maka anak didik juga akan terlatih berpikir rasional dan ilmiah. Kemampuan berhitung juga sudah dilatih dengan sedemikian rupa sehingga antara ilmu moralitas dan non moralitas mulai berimbang.

c. Tingkat Atas

Pada sekolah tingkat atas atau yang biasa disebut pendidikan menengah atas, maka pendidikan moralitas dan agama hanya diajarkan dengan volume 25%. Anak-anak didik kemudian diarahkan untuk berusaha membangun kerangka berpikir yang ilmiah dalam rangka menjawab tantangan global. Berpikir ilmiah menjadi sandaran agar mereka kemudian lebih mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapinya.

d. Pendidikan Tinggi

Akhir dari belajar secara formal adalah di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dengan segala bentuk titelnya. Terlepas dari hal tersebut, perbincangan di pendidikan tinggi terkait revolusi mental bukan lagi pendekatan hitam putih sebagaimana umumnya diajarkan di sekolah baik dasar, menengah maupun atas. Pendekatan belajar terkait moralitas adalah dalam konteks kajian ilmiah dan akhir yang akan dibidik adalah kemampuan mahasiswa melahirkan pandangan-pandangan moralitas dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara belajar di pendidikan tinggi harus berangkat dari sebuah pemahaman mendasar bahwa moralitas adalah sesuatu yang harus diabstraksikan dan kemudian dikonkretkan. Belajar tentang moralitas adalah terkait dengan pembentukan diri untuk bisa melakukan kerja-kerja ilmiah. Ketika mahasiswa pun kemudian masuk dalam disiplin yang digelutinya, bagaimana mahasiswa bisa memasukkan nilai-nilai moralitas tersebut. Sebut saja, mahasiswa yang sedang belajar sejarah, maka tugas mereka adalah menghubungkan antara moralitas dan sejarah. Itu juga terjadi kepada disiplin ilmu lain yang ada di perguruan tinggi. Ketika hal-hal demikian dapat dilakukan, maka revolusi

mental sebagaimana yang diharapkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih harus menjadi gerakan nasional untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang maju, bermartabat, beradab, dan berdaulat kemudian akan dapat terwujud.

- b) Konkretisasi revolusi mental sebagai gerakan kampanye pendidikan
- Berbicara tentang revolusi mental sebagai gerakan kampanye pendidikan, ini kemudian perlu dikonkretkan dalam pelbagai banyak kegiatan. Baik sekolah maupun perguruan tinggi perlu membuat program-program baru yang mendukung tujuan pemberantasan korupsi melalui revolusi mental. Menghidupan komunitas-komunitas kecil namun masif dalam bentuk diskusi non formal adalah salah satu contoh nyata dalam mengkonkretkan agenda dan program revolusi mental. Pimpinan sekolah dan perguruan tinggi tentunya harus memiliki keberpihakan terhadap itu. Inilah yang disebut kesadaran moral dalam mengampanyekan revolusi mental. Tentu, harapannya adalah gerakan yang dikerjakan itu tidak bersifat sporadis, namun semua elemen saling mendukung. Yang lebih penting dari itu adalah jangan sampai bersifat musiman. Kerja semacam ini membutuhkan komitmen, keteguhan hati, dan keseriusan.
- c) Revolusi Mental sebagai Kesadaran Moral
- Inti dari revolusi mental adalah transformasi etos dari kinerja yang rendah menuju yang tinggi. Revolusi mental dalam pendidikan adalah membangun etos belajar untuk terus progresif. Revolusi mental dalam pembangunan kepribadian adalah pembentukan etos diri untuk selalu mau bertahan atas prinsip yang sudah dipegangnya untuk kemudian bisa selalu konsisten atas apa yang diucapkannya dalam ranah tindakan. Oleh sebab itu, revolusi mental kemudian perlu dibangun dan dibentuk dengan kesadaran moral sebab kesadaran moral adalah membangkitkan kesadaran profetik untuk melakukan setiap tindakan atas nilai sebuah tindakan. Nilai sebuah tindakan itu sendiri adalah apakah membawa manfaat, kebaikan, dan kebajikan bagi semua. Kesadaran moral adalah keinginan diri untuk selalu meletakkan

pandangan bahwa apa yang dilakukan selalu berangkat dari pandangan paling halus. Setiap tindakan akan membawa nilai bagi semua. Dengan demikian, kesadaran moral sesungguhnya respon dari revolusi mental. Kesadaran moral lahir saat sedang membaca keadaan sekitar. Kesadaran moral adalah bertugas untuk bisa membangkitkan semangat diri terhadap pelbagai situasi dan keadaan yang sedang terjadi di sekitar. Kesadaran moral adalah sama dengan keinginan yang didasarkan atas nurani untuk mau melihat sesuatu secara tulus dan ikhlas. Dalam kesadaran moral, tergambaran keterpanggilan hati dan jiwa untuk membicarakan kebaikan dan kebajikan. Kesadaran moral mengilustrasikan nurani nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang kemudian perlu diimplimentasikan dalam ranah tindakan. Ia meliputi suara hati (kesadaran tentang yang baik dan tidak baik), harga diri seseorang, sikap empati terhadap orang lain, perasaan mencintai kebaikan, kontrol diri, dan rendah hati. Apa yang kemudian muncul dalam kesadaran moral tersebut kemudian perlu diaplikasikan dalam tindakan konkret yang selanjutnya disebut kompetensi. Tentunya, kemampuan melaksanakan hal tersebut harus didukung oleh adanya komitmen dan kemauan.<sup>89</sup> Oleh karenanya, kehadiran mental tidak akan lepas dari kesadaran moral. Analoginya adalah orang yang bermental baik pastinya memiliki kesadaran moral. Karena mental itu berhubungan dengan sikap, cara merasa, dan cara bertindak, maka di sinilah keberadaan kesadaran moral harus ditumbuh-kembang-biakkan sebagai pemantik progresif dalam keberkehidupan. Anak didik yang berada di lembaga pendidikan kemudian tidak hanya perlu dibangun dengan pembentukan mental, namun juga pada pembangunan kesadaran moral. Semuanya kemudian memiliki keyakinan tunggal bahwa pemberantasan korupsi harus dibentuk dengan memiliki mental yang kokoh dan tangguh. Ini kemudian disertai dengan kesadaran moral yang tinggi. Sebagai anak bangsa yang sedang menimba ilmu,

---

<sup>89</sup> Paul Suparno. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah: Suatu Tinjauan Umum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002). Hlm. 36.

tentu mereka akan lebih mudah dibentuk dan dikondisikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan.

#### **D. Kearifan Lokal dalam Pemberantasan Korupsi**

Setiap daerah sangat niscaya memiliki nilai-nilai kehidupan partikular dan itu pastinya berbeda dari satu daerah kepada daerah-daerah lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut tentunya merupakan sebuah produk nilai abstrak yang selanjutnya menjadi pedoman masyarakat setempat dalam menjalani kehidupannya. Dengan kata lain, norma-norma yang terbentuk tersebut merupakan hasil dari pergulatan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan hal-hal demikian kemudian menjadi sebuah penggerak agar masyarakat setempat tidak melanggarnya. Setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial. Memang sesungguhnya norma sosial tidak pernah memberikan sanksi konkret, kecuali sanksi moral. Kendatipun kemudian ada sanksi konkret dalam bentuk hukuman fisik tertentu, itu pun sesungguhnya adalah hal biasa sebab ada yang lebih substansial dari pada itu, yakni sanksi sosial.

Sanksi sosial memiliki dampak sangat luar biasa bagi orang-orang yang melanggarnya, seperti dikucilkan dari komunitas dimana mereka tinggal dan melakukan interaksi sehingga mereka yang sudah melanggar norma sosial baik secara langsung maupun tidak langsung akan tersingkirkan. Sanksi sosial lainnya adalah diusir secara langsung oleh masyarakat setempat karena sudah dipandang telah mempermalukan daerah dan leluhur. Merujuk kepada hal-hal sedemikian, maka kita semua meyakini bahwa setiap daerah yang berada di republik tercinta ini pasti telah memiliki norma sosial tersendiri dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan. Dengan keberlangsungan kehidupan yang dijaga oleh norma-norma, maka tidak akan terjadi pelanggaran sosial dan lain sejenisnya. Keberlangsungan hidup suatu masyarakat berada dalam suatu sistem sosial yang diamankan oleh aturan-aturan yang dibentuk dan dilahirkan dari tubuh masyarakat itu sendiri.

Tentunya, ketika berbicara tentang kehidupan setiap daerah, maka setiap lapisan masyarakat yang dibentuk oleh kebudayaannya sendiri akan

memiliki cara hidup, bersikap, dan bertingkah masing-masing. Perbedaan cara keberkehidupan tersebut selanjutnya dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam konteks ini adalah dilahirkan dari tubuh masyarakat itu sendiri dan fungsi sekaligus keberadaan nilai kearifan lokal tersebut diperuntukkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal berproses dan berdialog dengan kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya Suyatno mengatakan bahwa kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup. Ia merupakan pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional, sebut saja gotong royong, toleransi, etos kerja, dan lain seterusnya. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa. Ia menjadi filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada beberapa pepatah lama yang kemudian dapat menjadi pengantar awal untuk pembahasan tentang kearifan lokal, sebut saja "gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit", "bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian". Itu semua memberikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan.<sup>90</sup>

Berikut di bawah ini merupakan beberapa contoh kearifan lokal pada beberapa daerah:

a. Papua

Masyarakat ini memiliki kearifan lokal yang bernama *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg selanjutnya dipercaya sebagai kepala mama dan tanah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam harus dipergunakan secara hati-hati demi sebuah keberlangsungan kehidupan ke depan.

b. Serawai, Bengkulu

---

<sup>90</sup> Suyono Suyatno. *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>, diakses tanggal 26 Juli 2014).

Dalam masyarakat ini terdapat keyakinan *celako kumali* yang bermakna bahwa kelestarian lingkungan terwujud. Kuatnya keyakinan ini ditunjukkan dengan tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.

c. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur

Dalam masyarakat terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah selanjutnya diatur dan dilindungi oleh aturan adat.

d. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat

Dalam masyarakat ini, muncul kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman dengan cara mengelompokkan hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.

e. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat

Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu sehingga pemanfaatan hutan harus dilakukan secara hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat.<sup>91</sup>

f. Banjar

Pada masyarakat Banjar, sistem organisasi dikenal dengan istilah bubuhan. Bubuhan(Banjar), Bubohan (Melayu Kayung), Bubuan (Tidung) adalah unit kesatuan famili atau kekerabatan biasanya sampai derajat sepupu dua atau tiga kali, bersama para suami atau kadang-kadang dengan para istri mereka. Anggota bubuhan tinggal di rumah masing-masing, (dahulu) dalam suatu lingkungan yang nyata batas-batasnya. Di antara anggota bubuhan ini terdapat seseorang yang menonjol sehingga dianggap sebagai pemimpin bubuhan yang disebut tatuha bubuhan. Pemukiman terbentuk dari satu atau beberapa bubuhan. Pemukiman bubuhan ditandai dengan tinggalnya

---

<sup>91</sup> Elly Burhainy Faizal. <http://www.papuaindependent.com>. 31 Oktober 2003.

sekelompok kekerabatan di sekitar rumah tua yang merupakan rumah bubuhan. Rumah bubuhan biasanya ditinggali oleh garis keturunan perempuan.<sup>92</sup>

g. Madura

“*Poteh mata poteh tolang angok potena tolang.*” Itulah slogan orang Madura untuk menunjukkan harga dirinya. “Putih mata putih tulang, lebih baik putih tulang” memberi makna daripada malu lebih baik mati.<sup>93</sup>

h. Jawa

Masyarakat Jawa banyak melakukan laku batin untuk menciptakan kehidupan yang harmoni selaras dan seimbang dengan melakukan laku tertentu, seperti (1) berpuasa weton atau tiga hari apit weton, (2) puasa mutih, (3) puasa ngrowot, (4) puasa pati geni, (5) meditasi, (6) bersih desa.<sup>94</sup>

Membaca sejumlah nilai kearifan lokal yang tersebar di beberapa daerah tersebut, tentunya bangsa ini, semua memiliki keyakinan tunggal, akan tetap bisa maju dan besar selama itu dipegang secara teguh dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Perjalanan bangsa ini akan tetap bisa terselamatkan sebab dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut bangsa ini akan bisa memiliki sandaran berpijak. Apabila hal-hal demikian selanjutnya dihubungkan dengan upaya pemberantasan korupsi, maka nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat menjadi modal untuk bangsa agar bertahan dengan kemandirian dan kedaulatannya. Mengapa kini bangsa ini berada dalam kepungan korupsi yang sangat luar biasa masif, maka ini tidak terlepas dari lupanya bangsa terhadap nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal sudah tidak menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. Banyak elit dan pemimpin di negeri ini sudah melupakan itu akibat arogansi, keserakahan, dan kepentingan sektoral tertentu. Nilai-nilai kearifan lokal sudah tergerus dan digerus oleh kepentingan sesaat dan jangka pendek sehingga menafikan penyelamatan bangsa ke depan. Itulah yang kemudian pernah disampaikan Radhar Panca

---

<sup>92</sup> Sosiologi dan Budaya Banjar. <http://yusmabjm.blogspot.com/>, diakses tanggal 26 Juli 2014.

<sup>93</sup> Kumara Adji. *Bersikap Pragmatis, Loyal pada Kiai*. Surabaya Post, Jumat, 5 Desember 2008.

<sup>94</sup> Nanik Herawati. *Kearifan Lokal Bagian Budaya Jawa*. Magistra No. 79 Th. XXIV Maret 2012. ISSN 0215-9511.

Dahana bahwa akibat perilaku elit di negeri ini yang sangat rakus dan culas serta picik alias licik untuk mencapai kepentingannya, maka segala bentuk jalan kemudian dilakukan. Sesungguhnya akar korupsi muncul akibat sudah terlupakannya nilai-nilai kearifan lokal dalam diri mereka.<sup>95</sup>

Kini yang harus dipikirkan bersama adalah langkah dan strategi untuk menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai filosofi dan pandangan hidup bangsa agar semua manusia Indonesia kemudian menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai penguat dan penahan masa depan bangsa dari kebangkrutan. Tentunya, banyak jalan yang kemudian dapat ditempuh. Jalan tersebut tentu harus menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhannya sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

a) Keluarga

Keluarga dan nilai-nilai kearifan lokal merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan keluarga, maka nilai-nilai kearifan lokal dapat tumbuh subur dan berkembang biak secara mudah. Dengan keluarga pula, maka nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi perekat antara kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ajaran tentang kebaikan dan kebajikan yang disampaikan para leluhur akan terus hidup sepanjang masa ketika para orang tua juga ikut menyapaikan kepada anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Ajaran tentang kejujuran dan lain sejenisnya tersebut akan membekas dan terinternalisasi dalam kehidupan mereka sehingga dari sinilah nilai-nilai kearifan lokal sudah memiliki andil untuk ikut membangun bangsa yang bersih. Dari keluarga sebagai unit terkecil itulah, maka bangsa besar yang bernama Indonesia akan lahir.

b) Sekolah

Anak didik menjadi penting untuk mengenal dan dikenalkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan bagaimana menghargai sesama, menghargai kejujuran, memegang teguh tanggung jawab, memiliki prinsip yang teguh, dan lain seterusnya. Sekolah sebagai kawahcandradimuka tentunya harus bisa menyemaikan semangat

---

<sup>95</sup> Radhar Panca Dahana. *Saya Mohon Ampun*. Kompas. 20 April 2011.

untuk menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal. Pasalnya, dari sekolahlah, mereka akan menjadi semakin belajar memahami hidup dan kehidupan. Mengapa kehidupan dan hidup saat ini menjadi karut marut di segala dimensi, ini selanjutnya tidak terlepas dari hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan manusia Indonesia. Mengapa korupsi kemudian secara terus menerus menggurita di banyak sisi, ini juga tidak lepas dari absennya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pemersatu kehidupan berbangsa, terutama bagi elit di republik ini. Seharusnya nilai-nilai kearifan lokal menentukan arah kehidupan bangsa, hal tersebut sudah tidak menjadi realitas sama sekali. Oleh karenanya, peran sekolah perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan sedemikian rupa. Beberapa mata pelajaran terkait yang dapat dimasuki dan diselipi dengan nilai-nilai kearifan lokal harus diagendakan sebagai kekuatan moral untuk tetap membesarkan bangsa ini.

c) Masyarakat

Masyarakat menjadi kunci dan pertaruhan dalam mengimplimentasikan nilai-nilai kearifan lokal. Masyarakat tersebut bisa berbentuk dalam komunitas, arisan ibu-ibu, dan segala bentuk kegiatan masyarakat lainnya. Peran masyarakat sedemikian memiliki sumbangsih dominan bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Ketika kehidupan masyarakat sudah inheren dengan nilai-nilai kearifan lokal, maka agenda pembangunan bangsa akan bisa dijalankan dengan sedemikian berhasil, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Salafuddin. 2010. *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-nisa' Ayat 58: Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlily* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Anwar, Rosihan. 2009. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*. Jilid 3 Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- A Ferry T. Indratno (Ed). 2007. *Kurikulum Beridentitas Kerakyatan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas.
- Abdu Fida' Abdur Rafi'. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Penerbit Republika.
- A. Sudiarja, et all (Eds). 2006. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Kompas dan Kanisius.
- Al. Suroyo FM dkk. 2006. *Agama & Kepercayaan Membawa Pembaruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Andrias Harefa. 2002. *Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, dan Bryan S. Turner. 1988. New Edition. *Dictionary of Sociology*. England: Penguin Book.
- Asyumardi Azhar. *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik; Makalah Seminar Internasional: Praktik-Praktik yang Baik dalam Memerangi Korupsi di Asia*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Tanggal 16-17 Desember.
- Bibit Samad Rianto dan Nurlis E. Meuko. 2009. *Koruptor Go to Hell: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Budi Hardiman. F. 2007. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Cet. II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bagja Waluya. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Tengah Masyarakat*. Jakarta: PT Setia Purna Inves.
- Darmiyati Zuchdi. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Dewi, Rani Anggraeni. 2007. *Menjadi Manusia Holistik*. Bandung: Penerbit Hikmah.
- Dalai Lama dan Howard C. Cutler. 2004. *Seni Hidup Bahagia: Buku Petunjuk untuk Hidup*. Penerj: Alex Tri Kantjono Widodo. Cet. Ke-4. Jakarta: Gramedia.
- Didin Hafidhudin dkk. 2001. *Sederhana Itu Indah*. Jakarta: Penerbit Republika, 2001.
- Doyle P Johnson. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Ed). 1999. *Menyingkap Korupsi, Kkolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya.
- F.X. Oerip S. Poerwopoespito dan T.A. Tatag Utomo. 2010. *Menggugah Mentalitas Profesional & Pengusaha Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Franz Magis-Suseno. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fockema Andrea. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta, 1951. Webster Student Dictionary. 1960.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi*. Jilid 6. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho. 2005. *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul dalam Persaingan Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Gunawan, Ilham. 1993. *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Bandung: Angkasa.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harmanto. 2008. *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMP dan MTs*. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- John Dewey. 2004. *Experince and Education: Pendidikan Berbasis Pengalaman*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Ibnu Khaldun. 2000. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lukman Hakim. 2012. *Model Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10 No. 2 – 2012. Hlm. 147-149.

- Maria Hartiningsih (Ed). 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ..... 2009. *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Luthfi J. Kurniawan. *Korupsi Bekerja dengan Pola Mafia*. Makalah. Tanpa Tahun
- Maria Hartiningsih (Ed). 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Men Jung. 2010. *Go to the Next Level!: 50 Tips Transformasi untuk mendapat hidup gemilang, sukses, dan bahagia*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyasa. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. Ke-6. Bandung: Rosdakarya.
- Munif Chatib. 2009. *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intteligences di Indonesia*. Bandung: Kaifa.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Eds). 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nanik Herawati. Kearifan Lokal Bagian Budaya Jawa. Magistra No. 79 Th. XXIV Maret 2012. ISSN 0215-9511.
- Nanang T. Puspito at all (ed). 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2004. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nan Van Den Bergh (Ed). 2000. *Emerging Trends for EAPs in the 21st century*. USA: The Haworth Press. Inc.
- Paul Suparno. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.

- Panjaitan, Merphin. 2000. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: BPK Mulia.
- P. Bourdieu. 1994. *The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature*. Cambridge: Polity Press.
- Paulo Friere. 1982. *Pedagogy of the Oppressed*. Harmondsworth: Penguin.
- Paulo Freire. 1981. *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum.
- Robert R. Boehlke. 2006. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: dari Plato sampai IG. Loyola*. Cet Ke.8. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Penerj: Masri Maris. Edisi. Ke. 3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robert S. Zais. 1976. *Curriculum Principles and Foundations*. New York: Harper & Row Publisher.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Shidqi, Ahmad. 2008. *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhartono W. Pranoto. 2008. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah, Merangkai Hasil Kejaharan Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sholikin, Muhammad. 2008. *Filsafat dan Metafisika dalam Islam*. Yogyakarta: NARASI.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Antikorupsi*. INSANIA|Vol. 12|No. 2|P3M STAIN Purwokerto|Sumiarti 12 Mei-Ags 2007|189-207.
- Sachs, Jeffrey. 2005. *The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime*. USA: Penguin Press.
- Suprajitno. 2003. *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarsono, Soemarno. Tanpa Tahun. *Membangun Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Titik Handayani. 2008. *Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan Kritis*. Jakarta: Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI, Jilid XXXIV, No. 2, 2008.
- The World Bank. 2003. *Memerangi Korupsi di Indonesia*.
- Theodore M. Smith. "Korupsi, Tradisi, dan Perubahan di Indonesia", dalam Mochtar dan James C. Scott (eds). 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wesly Null. 2011. *Curriculum: From Theory to Practice*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Yulita TS. 2010. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*. Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010. Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata Semarang.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yosef Dedy Pradipto. 2007. *Belajar Sejati Versus Kerukulum Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yamin, Moh. 2012. *Sekolah yang Membebaskan: Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis*. Malang: Madani.
- ..... 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- ..... 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Arruzz Media.

#### **Dari Internet**

- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi*  
<http://dellimanusantara.com/index.php>.
- Elly Burhainy Faizal. <http://www.papuindependent.com>. 31 Oktober 2003.
- <http://sinarharapan.co/news/read/140510131/Korupsi-sebagai-Musuh-Bersama>, diakses tanggal 13 Mei 2014.
- <http://id.wiktionary.org/wiki/darurat>, diakses tanggal 2 Juni 2014.
- <http://m.riapos.co/2053-opini-urgensi-pendidikan-anti-korupsi.html>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

<http://grandmall10.wordpress.com/2010/04/05/jantung-dan-fungsinya/>, diakses tanggal 2 September 2012.

<http://kbbi.web.id/gerak>, diakses tanggal 21 Juni 2014.

<http://kbbi.web.id/kolektif>, diakses tanggal 21 Juni 2014.

Joko Widodo. Revolusi Mental.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental>,  
diakses tanggal 24 Juli 2014.

Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Karlina Supelli. <http://www.jokowi.id/opini/mengartikan-revolusi-mental/>,  
diakses tanggal 23 Juli 2014.

Suyono Suyatno. *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>, diakses  
tanggal 26 Juli 2014.

Sosiologi dan Budaya Banjar. <http://yusmabjm.blogspot.com/>, diakses tanggal 26  
Juli 2014.

#### Dari Koran

Febri Hendri AA. 2009. *Korupsi Menggerogoti Dunia Pendidikan Kita*. Kompas, 24  
September 2009.

Hasbullah, Jousairi. 2013. *Memaknai Angka Perilaku Korupsi*. Kompas, 12 Januari  
2013.

Kumara Adji. 2008. *Bersikap Pragmatis, Loyal pada Kiai*. Surabaya Post, Jumat, 5  
Desember 2008.

Muh. Kholid AS. 2013. *Ironi di Kementerian "Santri"*. Solopos, 18 Januari 2013.

Radhar Panca Dahana. 2011. *Saya Mohon Ampun*. Kompas. 20 April 2011.

Syamsudin Arif. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Republika, 25 Maret 2013.

Yamin. Moh. 2012. *Genderang Mendukung Korupsi*. Sinar Harapan, Kamis 6 Desember  
2012.

..... 2008. *Pendidikan Antikorupsi Hal yang Niscaya*. Jawa Pos, 5 Agustus  
2008.

## GLOSARIUM

Ascriptive = hubungan kekeluargaan

An sich = saja

BOS = bantuan operasional sekolah

Common enemy = musuh bersama

Corruptio, corruptus, corrumpere, corruption, corruptie/korruptie, corrupt = korupsi

DAK = Dana alokasi khusus

Entry point = titik masuk

Etos = sifat dasar atau karakter dasar manusia

Feodalisme = paham yang mendasarkan diri kepada kebangsawanan

Good governance = pemerintahan yang bersih

Gerakan kolektif = sebuah kesadaran bersama

Hedonisme = paham yang mendewakan kenikmatan dan kesenangan

Homo homini lupus = sikap manusia yang saling menerkam satu sama lain

Homonisasi dan humanisasi = manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia

Internalisasi = memasukkan nilai – nilai dalam kehidupan sehari-hari

KKN = Korupsi, kolusi, dan nepotisme

Kroni = antek atau anak buah

Kurikulum = rancangan dan skenario dalam pendidikan

Kearifan lokal = nilai-nilai hidup yang menjadi ruh bagi keberlangsungan sebuah masyarakat

Mark up = membengkakkan (untuk anggaran)

Masyarakat akar rumput = masyarakat kelas bawah

Mindset = pola pikir

Merit = kebaikan

Nasionalisme = paham yang mendasarkan diri kepada kebangsaan

Nation building = membangun bangsa

Optimisme = sikap untuk maju

Pendidikan antikorupsi = pendidikan untuk melawan korupsi

Pragmatisme = bersandar kepada kepentingan sesaat dan jangka pendek

Primordialisme = berbasis kepada golongan sempit

Permisivisme = paham menghalalkan segala cara

Pamong praja = pelayan rakyat

Revolusi mental = sebuah gerakan untuk membangun mental baru

Survive = bertahan hidup

School education = pendidikan sekolah

Wide-spread, deeply rooted = tersebar luas dan berakar mendalam

## INDEKS

### A

Alexander Inglis 99

### C

Common enemy 7

Capaian ekonomi lipstick 23

### E

Elias 6

Etos 16

Ekonomi makro 22

Ekonomi mikro 23

### G

Gerakan kolektif 121

### I

Indikator bangsa redup 13

Ilham Gunawan 54

Ibnu Khaldun 56

Internalisasi pendidikan antikorupsi 126,  
127, 128, 131

Implimentasi revolusi mental 148, 149,  
150

### K

Korupsi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 25  
32, 34, 41, 43

Koruptor 4, 5, 6, 11, 36, 37, 38

Korupsi pendidikan 8

Kerja tanpa visi 15

Kemiskinan 20, 24, 25, 30

Kurikulum 80

Kontjaraningrat 82, 144

Kurikulum sebagai Jantung Pendidikan 89

Kesadaran kolektif 124

Karlina Supelli 147

Kearifan lokal 152

### B

Beradab 6, 12, 14, 54

BPIH 10

BPK 26

Bibit Samad Rianto 57

Boni Hargens 59

### D

Driyarkara 63, 109

Durkheim 122

Dalai Lama 142, 143

### F

Franz Magnis–Suseno 74, 75

### H

Haryatmoko 19

Habitus 19

Hedonisme 57

Hamid Hasan 98

Hidup sederhana 139

### J

John Dewey 69

John McNeil 85

### L

Lukman Hakim 134

## M

Mennel 6  
Moralitas 16  
M. Dawam Rahardjo 42  
Mahzar 43  
Modus korupsi 46  
Machievelli 46  
Mochtar Lubis 60  
Mulyasa 102, 103  
Men Jung 142  
Marvin E. Shaw 145

## O

Oscar Lewis 25

## Q

## S

Sektarianisme I, II, 20, 29, 43  
Survei Perilaku Antikorupsi 7  
Survei integritas 9  
Syed Husein Alatas II  
Shidqi II  
Soedarsono 17  
Sachs 24  
Selo Soemarjdan 24  
Syamsudin Arif 44  
Suyatno 153

## U

## W

Wesly Null 102

## N

Negara darurat korupsi 39

## P

Permisivisme 6  
Pendidikan 7, 31  
PPATK 10  
Pragmatisme 14, 15, 35  
Primordialisme 14, 15  
Pendidikan antikorupsi 38, 40, 41, 64, 67, 72  
Philip 43  
Pemicu korupsi 51  
Plato 62  
Paulo Freire 77  
Pendidikan humanis 105, 106  
Philip R. Constazo 145

## R

Reformasi birokrasi 27  
Romo Mangunwijaya 33, 109  
Robert Klitgard 44  
Revolusi mental 144  
Radhar Panca Dahana 156

## T

Torres 51  
Theodore M. Smith 54

## V

## X

Y

Yudi Latif 16, 17

Yamamah 50

Yamin 84

Z

Zais 104

## Tentang Penulis



**M**oh. Yamin merupakan Dosen Tetap di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. Ia lahir di Sumenep, Madura pada 16 Juli 1980, di sebuah desa bernama Lalangon. Merupakan anak dari orangtua yang bernama Moch. Dahlan (alm) dan Aliya (alm). Penulis merupakan alumni SDN 1 Lalangon, SMPN 3 Sumenep, dan MAN Sumenep. Untuk program strata 1 dan program pascasarjana, penulis menyelesaikan studinya di Universitas Islam Malang (Unisma). Selama mahasiswa, ia aktif di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Tahun 2004-2005, ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Al-Kindi FKIP Koms. Unisma. Di tahun itu pula, ditunjuk sebagai pemimpin redaksi UKPM Kanjuruhan Unisma. Tahun 2005-2006, Direktur SAINS PMII Koms. Unisma. Di tahun itu pula, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unisma. Di 2006-2007, menjabat sebagai sekretaris BASIS PMII Cab. Malang. Pasca Konfercab NU

Kota Malang 2006, menjadi Co. Devisi Penerbitan dan Publikasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang masa khidmat 2006-2011. Sempat mendirikan *Freedom Institute for Social Reform (FISoR)* Malang di awal 2007 yang *concern* terhadap kajian sosial-keagamaan. Menerjemahkan buku "*Tumbal Modernitas (The Consequences of Modernity)*" karya Anthony Giddens diterbitkan IRCISoD Jogja tahun 2001 dan "*Sosiologi Agama (Sociology of Religion)*" karya Max Weber diterbitkan IRCISoD tahun 2002. Menerjemahkan buku berjudul "*A Muslim View of Christianity*" karya Mustafa Mahmoud Ayoub yang diterbitkan oleh Dioma Publishing Malang (proses terbit). Menulis buku "*Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara* (Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2009) dan "*Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*" (Divapress Yogyakarta, 2009), merupakan kontributor buku "*Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kebangsaan*" (Penerbit Buku Kompas, 2010), menulis buku "*Meretas Pendidikan Toleransi; Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*" (Madani Malang, 2011), menulis buku "*Sekolah yang Membebaskan: Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis*" (Madani Malang, 2012), menulis buku "*Ideologi dan Kebijakan Pendidikan: Menuju Pendidikan Berideologis dan Berkarakter*" (Madani Malang, 2013), dan menulis buku "*Teori dan Metode Pembelajaran: Konsepsi, Strategi, dan Praktik Belajar yang Membangun Karakter*" (Madani Malang, 2015). Tulisan-tulisannya lebih dari 300 artikel sudah tersebar di sejumlah media massa baik lokal maupun nasional, seperti Malang Post, Koran Pendidikan, Duta Masyarakat, Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, Bali Post, Surabaya Post, Radar Surabaya, Suara Karya, Sinar Harapan, Surya, Harian Joglosemar, Suara Merdeka, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Suara Pembaruan, Kompas Jawa Timur, Kompas Nasional, Koran Jakarta, Republika, Jurnal Nasional, Majalah Syir'ah, Majalah al-Madinah, Jurnal Edukasi, majalah Suara Pendidikan, dan beberapa jurnal ilmiah perguruan tinggi. Penulis juga merupakan penyunting pelaksana Jurnal Vidya Karya FKIP Unlam dan tim Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan (PPJP) Unlam. Selain aktivitasnya dalam tulis menulis dan mengajar serta editor *freelance*, penulis juga aktif dalam penelitian terkait dengan pendidikan, kebijakan pendidikan, pembelajaran, dan sosial baik yang didanai DIKTI maupun Pemerintah Daerah. Pengalaman kerja sebelumnya adalah pernah mengajar di Unisma dan SMK Plus ALMAARIF Singosari. Sementara pengalaman mengajar lainnya adalah di Pusat Pelayanan Bahasa (PPB) IAIN Antasari dan STIENAS Banjarmasin. Alamat email: yaminmoh@yahoo.com. Rumah mayanya bisa dikunjungi di [www.mohyamin.wordpress.com](http://www.mohyamin.wordpress.com).